

PERKEMBANGAN POLITIK INTERNASIONAL ERA PERANG DINGIN DAN GLOBALISASI

DR. DRS. HARUN UMAR., M.SI



Perpustakaan Nasional RI : *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*
Copyright : **Umar, Harun**

***PERKEMBANGAN POLITIK INTERNASIONAL ERA PERANG
DINGIN DAN GLOBALISASI***

Editor : Dr. Drs. Harun Umar., M.Si
Penata Letak/Cover : Asngadi/Ines Syamsiah Putri
Penulis : Dr. Drs. Harun Umar., M.Si

Cetakan Pertama : 2022
ISBN : **978-623-7376-14-9**

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Penerbit :
Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)
Jl. Sawo Manila, No. 61. Pejaten. Pasar Minggu.
Jakarta Selatan. 12520. Telphon : 021-78837310/021-7806700
(hunting). Ex. 172. Fax : 021-7802718
Email : bee_bers@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Pada perkembangan era perang Dingin (Cold-War) berlangsung sejak Amerika Serikat menggunakan doktrin Harry Truman (1948) dengan penerapan politik pembendungan (*containment policy*) untuk menghadapi ancaman komunisme internasional, yaitu perang ideology. Kebijakan politik luar negeri pada masa awal dan kejatuhan Presiden Soeharto dengan reformasi politik pada tahun 1998, sebelumnya era tersebut terjadi kehancuran dan pembubaran negara Uni Soviet. Pembubaran Uni Soviet terkait erat dengan masalah ideology komunisme semakin terpuruk dan tidak lagi membahayakan negara-negara liberal dengan ideology kapitalisme yang tetap menunjukkan eksistensi ekonomi liberalisme dengan mempertahankan demokrasi liberal yang dianggap lebih unggul dan mampu mensejahterakan rakyat.

Perkembangan politik internasional mengalami perubahan dan transisi politik, ekonomi, sosial serta budaya dinantara negara-negara dunia ketiga yang menyebabkan pecahan menjadi beberapa negara, baik Uni Soviet, dan Yugoslavia. Perubahan dan munculnya berbagai negara-negara tersebut masuk menjadi organisasi di Uni Eropa (UE). Negara Rusia tidak lagi menjadi saingan, competitor baru Amerika

Serikat dengan munculnya RRC sebagai negara dalam aspek ekonomi dan perluasan wilayah pengaruh (sphere of influences). Pergolakan politik internasional mengalami fluktuasi antar negara-negara adidaya dengan pengembangan pada diplomasi dan kemajuan persaingan ekonomi global, dimana hal tersebut sering menimbulkan konflik kepentingan yang menjurus pada peningkatan militer dan persenjataan dalam bentuk perluasan kekuatan militer yang didukung oleh kekuatan dan kemajuan diplomasi ekonomi.

Berikutnya adalah lebih fokus terhadap penggunaan ideology dan intervensi militer yang lebih banyak masalah. Polarisasi antara ideologi kapitalis dan komunis telah membuat pragmentasi antar negara, dan cenderung menyebabkan negara-negara blok komunis mengalami kehancuran (entropis) dengan bubarnya Uni Soviet, Polandia dan gesekan antar kawasan, seperti yang terjadinya intervensi Amerikat Serikat ke Irak bagi kepentingan di antara kelompok-kelompok didalam negara. Philipina pasca regim Ferdinand Marcos dengan darurat militer merubah tatanan masyarakat tersebut.

Kajian ini pada aspek globalisasi lebih cenderung akan melibas mengenai perkembangan ilmu ekonomi antar kawasan dalam persaingan yang lebih ketat, terutama kawasan Asia akan mendominasi berbagai dimensi dari manpower, teknologi dan

sumber daya alam dan manusia, kekuatannya melebihi kekuatan eropa di masa depan, terutama masalah keamanan, perdagangan, perlombaan persenjataan dan pertahanan mengarah ke kawasan Asia secara komprehensif menjadi Uni Asia dan Pasifik dari kemajuan era globalisasi. Globalisasi akan meraup berbagai aspek kehidupan dan masyarakat madani dunia.

Demikianlah pengantar Buku ini semoga bermanfaat bagi para pembaca semuanya dan saran dan kritik dari Buku ini kami nantikan.

Jakarta, 10 Nopember 2022

Penulis,

Dr. Drs. Harun Umar., M.Si

DAFTAR ISI

BAB I : PERSPEKTIF POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA : SUATU PERGESERAN POLITIK INTERNASIONAL

1.1	Pendahuluan	1
1.2	Hubungan Amerika Serikat-Cina Sebagai Minggu Yang Telah Merubah Dunia.....	9
1.3	Konsepsi Politik Baru	10
1.4	Peranan yang Konstruktif.....	14
1.5	Nixon Doctrin dan Perubahan Cina.....	16
1.6	Strategi Diplomasi Clinton Dari Coercive Ke Accomodative	21

BAB II : INTERVENSI UNI SOVIET DI AFGANISTAN

2.1.	Pendahuluan	31
2.2.	Sejarah Pemerintahan Afganistan	33
2.3.	Polandia Di Persimpangan Jalan.....	35
2.3.1	Pendahuluan	35
2.3.2	Serikat Buruh Bebas Solidaritas	40
2. 3. 3.	Ajaran Internasionalisma-Proletariat Fase Pelapukan.....	49
2.3.4.	Keputusan Politik	52
2.4.	Dampak Krisis Keamanan Jepang –AS	55

2.5. Supremasi AS dan Pelajaran Bagi Irak	61
2.5.1 Strategi dan Supremasi AS	64
2.5.2 Era Reformasi DK-PBB	70
2.5.3 Pelajaran dan Perubahan Bagi Irak	71

BAB III : KEMELUT POLITIK DI FILIPINA

3.1 Ppendahuluan.....	74
3.2 Tragedi Manila.....	75
3.3 Undang-Undang Darurat Militer	78
3.4. Post-Marcos.....	79

BAB IV : PEREKONOMIAN INDONESIA: KRISIS DAN STRATEGI ALTERNATIF

4.1 Pendahuluan.....	83
4.2 Fundamental Ekonomi Indonesia	84
4.3 Strategi adalah Set Alternatif	86
4.4 Krisis Moneter Internasional.....	88
4.5 Utang Luar Negeri	90
4.6 Restrukturisasi dan Rekapitalisasi.....	92
4.7 Letter Of Intens	92
4.8 Peran Rezim Moneter Internasional	94
4.9 Era Kesuksesan Jepang. Ezra F. Vogel : Jepang Jempol Pelajaran Untuk Amerika	103

**BAB V : PERANG DINGIN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP SISTEM POLITIK INTERNASIONAL
DALAM TINJAUAN TEORI HIGH POLITICS**

5.1	Pendahuluan	108
5.2	Kekalahan Jerman	139
5.3	Indikator-Indikator Integrasi ialah :	155
5.4	Sejarah Proxy War	158
5.5	Maksud dan Tujuan	160
5.6	Pengertian	161
5.7.	Kegiatan Proxy War Modern	173
5.7.	Pengetian Umum	173
5.8.	Humanisme dan Pembangunan	192

BAB VI : SISTEM KAPITALISME DI ERA GLOBALISASI

6.1.	Pendahuluan.....	198
6.2.	Pendekatan Era Globalisasi	215
6.3.	Pembahasan Pandangan Tentang Strategi Global.....	227

BAB VII : PENUTUP.....	241
-------------------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA.....	246
----------------------------	------------

BAB I

POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA : SUATU PERGESERAN POLITIK INTERNASIONAL

1.1 Pendahuluan

Dalam tahun 1980-an, keadaan dunia tidak semakin membaik, melainkan semakin sulit dan kompleks dengan timbulnya bentrokan-bentrokan terbuka serta adanya campur tangan negara-negara super power. Keadaan ini diperkirakan masih akan berlangsung dalam tahun 1990-an. Kegagalan-kegagalan dalam perundingan senjata-senjata strategis menimbulkan ketegangan dunia akan ancaman kiamat nuklir (*doomsday nuclear*).

Namun masalah yang sangat mendesak dewasa ini adalah peningkatan anggaran pertahanan yang semakin santer di kalangan masyarakat dunia yang berkaitan erat dengan perkembangan konstelasi politik Internasional. Resultante persaingan politik, ekonomi dan militer mempunyai implikasi terhadap kepentingan nasional. Pergeseran kekuatan dari bipolarisma ke multipolarisma sekurang-kurangnya telah

mengancam eksistensi kekuatan Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam tatanan internasional.

1. Dengan demikian, peta politik internasional adalah tidak mudah untuk meneliti sasaran yang sebenarnya dan kehendak yang lain dari sesuatu bangsa. Walaupun ada tiga pra-anggapan yang dapat dipakai dalam perkembangan politik internasional, yaitu :
 - a. Sifat dari kekuatan sesuatu negara memberikan kemampuan dan batas kemampuan kepada pemimpin-pemimpinnya dalam kaitan dan pemakaian kekuatan tersebut.
 - b. Sesuatu negara akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya dan mendahulukan kepentingannya daripada kepentingan negara lain atau desakan dari negara lain.
 - c. Negara-negara yang puas akan tetap mempertahankan status quo dan negara-negara yang tidak puas akan ingin merubah status quo.
2. Perbedaan kekuatan antara negara-negara maju dan negara-negara yang sedang berkembang sangat menyolok sekali. Sebab negara-negara yang kekuatannya berada dalam taraf potensial tidak banyak menimbulkan masalah, maka yang ditakutkan adalah mengenai perkembangan negara-negara

yang kekuatannya berada dalam taraf “transisi” yakni negara-negara karena penduduk, kemampuan potensi sumber daya alam, organisasi politik dan juga industrialisasi yang menjadi kuat. Karena faktor-faktor ini jelas menuntut dan menghendaki adanya perubahan kekuatan yang lebih merata di dalam percaturan politik internasional.

3. Selama tatanan dunia masih kapitalis dan imperialis seperti sekarang ini, maka kita akan terus berada di dalam dan dikelilingi lingkaran kapitalis maupun imperialis. Betapa baiknya usaha-usaha kita, kita sendiri tidak akan cukup kuat untuk menghancurkan lingkaran tersebut. Ketergantungan kita terhadap dunia barat telah memperlihatkan suatu kelemahan ekonomi. Dalam keadaan bagaimanapun, Indonesia masih membutuhkan pinjaman luar negeri sedikitnya 16 milyar dollar dalam tiga tahun mendatang untuk menutup defisit neraca berjalan dan membayar kewajiban utang. Jumlah utang Indonesia akan meningkat menjadi 30.5 milyar dollar dalam tahun 1985. Hal ini tentunya meningkatkan perbandingan kewajiban membayar utang dengan penerimaan ekspor menjadi 26.3 persen dari 22 persen sekarang ini.

4. Memang tidak dapat disangkal bahwa dalam pembuatan kebijaksanaan luar negeri akan mengalami hal-hal yang rumit dan kompleks. Akhir-akhir ini dunia dilanda perubahan dan pergeseran yang menyebabkan terjadinya saling ketergantungan yang simpang siur seperti politik, ekonomi, kebudayaan dan pertahanan keamanan. Maka setiap negara mau tidak mau menciptakan dan meningkatkan peranan-peranan mereka untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan penyelesaian masalah kebijaksanaan luar negeri. Kesulitan lain yang dihadapi adalah bagaimana mengaplikasikan suatu model diplomasi yang rasional, sehingga suatu keputusan kebijaksanaan luar negeri dapat diambil. Adalah tidak mungkin untuk mengevaluasi suatu keputusan dengan mengatakan bahwa itu telah sukses atau gagal. Suatu hal yang sangat berbahaya untuk mencoba menghubungkan motif-motif murni dalam kebijaksanaan luar negeri kepada pembuatannya serta menyelusuri keaslian dari pada keputusan-keputusan tersebut (Holsti, K.J. 1977-4).
5. Lantas bagaimana dengan gaya diplomasi Indonesia di masa mendatang? Apakah kita masih tetap mempertahankan sikap “low profile”? Ataukah kita mulai beranjak dengan “gaya diplomasi perjuangan” yang lebih

menonjolkan peranan di mata dunia yang dinamis dan bukannya bersikap stais. Kemudian kita bertanya apa benar masalah Timor Timur yang selalu diributkan di forum PBB, (dan di tempat lain belum tentu), sudah dapat kita ukur sebagai kegagalan diplomasi Indonesia?. Selain masalah Timor Timur, adanya keterikatan Australia dalam masalah pertahanan keamanan dengan PNG, yang merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak politik, baik intern maupun ekstern. Perbedaan di dalam sistem pemerintahan yang dianut Australia, secara sadar dapat menimbulkan kerikil-kerikil tajam. Apabila hal ini tidak dapat diselesaikan dengan tuntas, maka perbedaan-perbedaan tersebut akan menimbulkan pertentangan yang berkepanjangan. Perbedaan antara Indonesia-PNG adalah sejarah yang berbeda, pembangunan ekonomi yang tidak merata, geopolitik (persepsi yang berbeda mengenai negara tetangga) dan kebudayaan yang tidak sama (PNG menganut kebudayaan Melanesia).

Pada pertengahan tahun 1950-an terdapat pemikiran di pihak pemerintah Belanda dan Australia untuk melakukan suatu referendum menentukan penyatuan kedua belah

pulau Irian, dengan pembentukan satu negara yang merdeka. Pada akhirnya Irian Barat dapat kita miliki, sekalipun dengan tekanan militer dan politik. Dalam perjuangan mengembalikan Irian Barat, kita mendapat kritik yang keras dari John Foster Dulles bahwa politik luar negeri yang bebas aktif itu immoral. Ada juga yang melontarkan bahwa kasus Irian Barat sama dengan masalah perebutan kepulauan Malvinas antara Inggris – Amerika.

6. Politik luar negeri itu janganlah hanya merupakan kebijaksanaan dan keputusan taktis belaka, akan tetapi harus dilandaskan kepada suatu sistem yang dapat menjangkau timbulnya masalah-masalah sebelum masalah itu menjadi krisis bagi kita. Kalau kita mau bicara tentang mutu diplomasi, maka perlu diperhitungkan secara matang bahwa pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif hanya terlihat pada tahun 1950-an, di mana kita tidak memihak kepada salah satu blok yang terlibat perang dingin (*cold war*).
7. Suatu kebijaksanaan luar negeri dapat dipakai untuk memperkuat kedudukan suatu golongan tertentu, sambil memukul lawannya melalui isu-isu politik luar negeri. Terjadinya Gerakan 30.S/PKI memperlihatkan kepada kita

adanya hubungan yang mesra antara Jakarta-Beijing-Hanoi, karena bantuan persenjataan dari RRC terhadap Indonesia sebagai “pukulan terakhir” dari politik bebas aktif dengan merombaknya menjadi negara komunis yang mengekor Beijing (Franklin B. Weinstein).

8. Peringatan pemerintah Amerika Serikat bahwa dalam waktu sepuluh tahun komunis akan mengambil-alih kekuasaan di Filipina, kecuali Ferdinand Marcos melaksanakan perubahan demokratis yang mendasar. Dalam waktu 10 tahun mendatang, justeru kita di Indonesia bertekad melaksanakan Pelita IV dan Pelita V dengan harapan untuk melakukan tinggal landas dalam Pelita VI menuju masyarakat adil dan makmur. Kemungkinan besar akan terjadi perubahan yang fundamental, di mana kita akan menghadapi tantangan dan hambatan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Peringatan ini merupakan masalah besar yang harus kita pikirkan dan renungkan kembali. Persoalannya Amerika Serikat pernah mengalami masa tragis dengan jatuhnya Vietnam Selatan ke tangan komunis.
9. Politik luar negeri Indonesia selama hampir 40 tahun yang lalu menunjukkan kesinambungan yang cukup konsistensi dengan beberapa kekecualian. Akan tetapi masalah pokok

yang dihadapinya tetap sama, yakni menjalankan politik luar negeri yang dapat mengamankan faktor intern yang tidak begitu penting dan tidak menguntungkan seperti kondisi geografis, bentuk kepulauan dan distribusi penduduk yang tidak seimbang dan memainkan peranan regional yang menghindari dominasi kekuatan-kekuatan ekstern (Michael Leifer).

10. Perkembangan politik di RRC sekarang ini menunjukkan perubahan yang mendasar, dimana kegagalan rezim Mao Zedong dengan revolusi kebudayaan sudah mulai ditinggalkan. Tampilnya pembaharuan dari Deng Xiaoping sebagai sumbu kekuatan dan modal utama bagi modernisasi RRC yang cenderung membuka diri dengan dunia Barat dan Jepang. Namun normalisasi hubungan Indonesia-RRC masih tetap membeku, karena Beijing tetap mendukung partai komunis di Asia Tenggara, sedangkan syarat utama yang diajukan Indonesia adalah penarikan dukungan RRC terhadap partai terlarang di Indonesia. Pengembalian Hongkong pada tahun 1997 ke daratan Cina akan mempersulit harapan normalisasi, dan hal ini perlu dipikirkan secara mendalam.

1.2 Hubungan Amerika Serikat-Cina Sebagai Minggu Yang Telah Merubah Dunia

Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat mengharapkan agar Cina Nasionalis dapat bertahan di Asia Pasifik menjadi suatu negara utama, yang pada satu pihak dapat mengekang komunis di dalam negeri dan di lain pihak mengimbangi kekuatan Jepang. Tetapi kemudian timbul Perang Saudara di Cina. Kiranya dugaan Amerika Serikat itu keliru, karena pemerintah Cina Nasionalis yang nampaknya *unggul* ternyata tidak *berdaya*, yang *berkuasa* adalah golongan komunis. Hal ini terbukti ketika Jenderal Mac Arthur mengintruksikan kepada Tentara Cina Nasionalis untuk menerima penyerahan tentara Jepang, ternyata tidak dapat dilaksanakan, karena daerah-daerah di luar kota seluruhnya dikuasai oleh tentara komunis.

Letnan Jenderal Albert Wedemeyer yang telah diberi hak untuk mempergunakan segala cara dalam melaksanakan instruksi tersebut mendaratkan 50.000 marinir Amerika Serikat, dan hal ini diprotes oleh pengikut-pengikut Mao sebagai intervensi Amerika Serikat. Melihat kenyataan ini Amerika Serikat dihadapkan pada tiga kemungkinan, Amerika Serikat membiarkan Perang Saudara di Cina tanpa campur tangan,

Amerika Serikat membantu Golongan Nasionalis dan Amerika Serikat menjadi perantara.

Ternyata Amerika Serikat mengambil kemungkinan yang ketiga, yaitu menjadi perantara. Untuk itu dikirimlah Jenderal Marshall (bekas Kepala Angkatan Perang Sekutu), yang mengusahakan Pemerintahan koalisi. Tetapi sebaliknya Jenderal Marshall, mereka perang lagi dan menuntut Amerika Serikat meninggalkan Cina (50.000 marinir AS) dan menghentikan bantuannya terhadap Chiang Kai Shek.

Sebenarnya tentara Cina Nasionalis dengan bantuan yang cukup dari Amerika Serikat dapat memukul tentara Cina Komunis, tetapi di Amerika Serikat pada waktu itu ada pendapat-pendapat yang justru membawa bencana di Cina, antara lain Eropa lebih penting daripada Asia. Rentetan inilah dipandang sebagai hal-hal yang mempercepat kemenangan komunis Cina. Di kalangan Amerika Serikat sendiri orang banyak tidak yakin bahwa komunis akan menang.

1.3 Konsep Politik Baru

Pada tahun 1947 Presiden Truman mengadakan peninjauan kembali politiknya terhadap Cina dengan mengadakan survey. Dari hasil survey yang dilakukan oleh Jenderal Wedemeyer, maka disarankan agar memberi bantuan

yang besar kepada Chiang Kai Shek dengan ketentuan bahwa dia harus mengadakan pembaharuan di bidang ekonomi, politik dan mencari jalan supaya Cina diletakkan di bawah Trusteeship selama Amerika dan Cina.

Memenuhi anjuran tersebut, maka Amerika Serikat memberikan bantuan sebesar \$ 330 di antaranya \$ 125 juta berupa senjata. Karena keadaan di Cina kacau balau sehingga pengiriman senjata menjadi tertunda-tunda dan Baru diterima Chiang pada akhir tahun 1948, sedangkan tentaranya sudah sangat lemah dan usaha tentara komunis untuk menguasai berlangsung terus. Akhirnya setelah jatuhnya Chungking (Desember 1949), Chiang Kai Shek lari ke Taiwan (Formosa)

Pada waktu itu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Acheson berketetapan hati untuk tidak mengakui Cina komunis (RRC) dengan alasan-alasan bahwa RRC tidak menguasai seluruh wilayah Cina dan pemerintahnya tidak didukung seluruh rakyatnya, serta RRC tidak memperhatikan perlakuan terhadap diplomat-diplomat asing. Demi kepentingan nasional Amerika Serikat ditinjau dari sudut pertahanan dan keamanan, ditinjau dari segi moral adalah tidak baik untuk menggulingkan sekutu selama Perang Dunia II, apalagi setelah Cina turut dalam Perang Korea.

Adapun kebijaksanaan Amerika Serikat dalam mengcontain RRC adalah dengan melakukan isolasi (diplomatik) untuk menggagalkan pembicaraan mengenai Cina di PBB dan organisasi internasional lainnya sejak tahun 1950. Mengadakan tekanan-tekanan di bidang ekonomi (total embargo) terhadap Cina, mengadakan perjanjian pertahanan dengan Taiwan, serta mendirikan pangkalan-pangkalan militer di Korea Philipina, Taiwan, Jepang dan Thailand serta mendirikan pakta-pakta militer seperti SEATO dan lain-lain.

Kebijaksanaan ini dilakukan oleh Amerika Serikat selama 20 tahun, tepatnya dari tahun 1949 sampai tahun 1969, mulai dari Pemerintahan Presiden Harry Truman, kemudian Eisenhower (1953-1961) dan akhirnya Presiden John F. Kennedy. Pada masa Pemerintahan John F. Kennedy, diharapkan akan ada perubahan yang menyolok terhadap kebijaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Cina namun dasarnya tidak terdapat perubahan apa-apa. Pada pertengahan tahun 1960, ada tanda-tanda bahwa kebijaksanaan sebelumnya sedang dinilai kembali oleh Pemerintah Presiden Johnson sesuai dengan pandangan Presiden terhadap detente antara Timur-Barat. Namun pada waktu yang bersamaan, Presiden Johnson dan penasihat-penasihatnya menekankan perlunya Amerika menunjukkan kekerasan terhadap ancaman

militer Cina yang terus-menerus terutama potensi peranan Cina di Perang Vietnam dan potensi nuklir negara tersebut. Tindakan-tindakan Johnson ini didukung oleh suatu teori yang dikenal dengan 'domino teori' yang beranggapan bahwa negara-negara non komunis akan *jatuh* ke tangan komunis apabila Vietnam berhasil mereka rebut.

Segera setelah Pemerintahan Nixon mulai berfungsi, James C. Thomson Jr. bekas ahli Asia Timur pada Departemen Luar Negeri, menyarankan bahwa Presiden Nixon mempunyai posisi yang memungkinkan untuk merubah kebijaksanaan Amerika Serikat terhadap Cina. Hal ini sudah *terbenam* dengan menggunakan senjata dalam menghadapi Cina pada akhir tahun 1940-an dan 1950-an orang-orang dari Partai Republik mendengung-dengungkan isu kalahnya Amerika di Cina sebagai kritik terhadap kegagalan partai Demokrat. Presiden dari Partai Republik kali ini membawa konsepsi khusus yang Baru mengenai Cina. Tidak seorang pun yang berani menuding Richard Nixon dan mengatakan bahwa dia telah bertindak lunak terhadap komunisme ketika berusaha mendekati Peking.

Di samping iklim di Kongres Amerika Serikat sendiri pun, baik orang-orang Demokrat di Kongres pada waktu itu agak fleksible karena banyak di antaranya sudah tidak sabar lagi setelah mengalami kekakuan bekas Menlu Dean Rusk

dalam menghadapi Cina. Mereka secara bersama-sama dengan golongan Republik yang moderat mendesak ditinjau kembalinya kebijaksanaan Amerika Serikat terhadap Cina. Bahkan terpilih sebagai Presiden dalam kampanyenya di tahun 1968 untuk menjadi Presiden, dia menggariskan dengan tegas perlunya perubahan kebijaksanaan Amerika Serikat terhadap Cina. Pada masa pemerintahannya Nixon berpendapat bahwa dunia tidak akan tenang sebelum Cina berubah dan tujuan jangka panjang Amerika Serikat adalah menarik Cina kembali ke dalam masyarakat dunia yang lebih terbuka.

1.4 Peranan yang Konstruktif

Mengenai ancaman nuklir Cina dalam tahun 1968, Nixon berkata bahwa pada akhir abad ini, komunis Cina akan mempunyai 1 milyar penduduk, sekarang manpower Cina diatas 1 milyar terus bertambah dan juga akan mempunyai senjata-senjata atom yang tidak terbatas yang dapat diekspor ke seluruh dunia serta ekspansi kekuatan Cina dimasa sekarang dengan program Obor. Dan bahwa perlu bagi siapa pun yang menjadi Presiden Amerika yang akan datang untuk mengembangkan kebijaksanaan sekarang yang akan dapat merubah komunis Cina agar mau berdialog dan negosiasi.

Hubungan jangka panjang dengan Peking-Beijing dan menariknya ke arah peranan yang konstruktif di dalam hubungan internasional adalah sangat perlu tidak hanya bagi dapatnya Amerika mundur secara terhormat dari Indo Cina, tetapi juga memberi kesempatan kepada Pemimpin Soviet agar merenung sejenak bagi lunaknya diplomasi mereka. Nixon berpendapat diteruskannya perubahan diterminasi dan isolasi terhadap Cina akan lebih berbahaya daripada melibatkan secara sedikit demi sedikit ke dalam diplomasi dunia internasional. Sebetulnya ada dua faktor yang menguntungkan pemerintahan Amerika : Pertama, penerimaan umum dunia bahwa keamanan dunia memerlukan normalisasi dengan RRC. Kedua, usaha-usaha Nixon untuk mengadakan pendekatan dengan Cina merupakan suatu keberhasilan diplomasi.

Faktor lain yang menguntungkan Presiden Nixon adalah adanya pertengkaran ideologi antara Soviet dan Cina sehingga sering terjadinya kontak senjata antara kedua negara komunis raksasa itu di perbatasan. Pihak Cina beranggapan bahwa menormalkan hubungan dengan Amerika Serikat adalah suatu keharusan kalau tidak Republik Rakyat Cina akan terjepit dari Utara oleh Uni Soviet dan dari Selatan oleh Amerika Serikat. Baik Uni Soviet maupun Republik Rakyat Cina berpendapat

bahwa dalam konflik mereka, dua lawan satu akan sangat berbahaya dan merupakan permufakatan yang jahat.

Untuk kepentingannya Peking telah berulang kali menyerang persetujuan rahasia antara imperialist Amerika Serikat dan revisionist Uni Soviet, dalam usaha-usaha pembatasan perlombaan senjata dan Peking telah menafsirkan bahwa dalam pertentangannya dengan Uni Soviet, Amerika Serikat telah memihak Soviet. Kecurigaan RRC terhadap kedua super power tersebut dapat kita lihat dalam pernyataan Chou En Lai dalam suatu laporannya pada Kongres Nasional kesepuluh Partai Komunis Cina.

1.5 Nixon Doctrin dan Perubahan Cina

Dalam usaha normalisasi hubungan antara Amerika Serikat dan Cina ini, ada dua prasyarat mutlak yang dikemukakan Cina yang harus dipenuhi. Prasyarat pertama adalah Amerika harus mengurangi kehadiran militernya di Asia dan syarat kedua adalah mengakui Taiwan sebagai salah satu propinsi Republik Rakyat Cina. Untuk menghadapi prasyarat yang pertama, maka Amerika mengembangkan suatu konsepsi yang dikenal kemudian dengan '*Nixon Doctrin*'.

Pada tanggal 25 Juli 1986 di Guam, langkah pertama dalam kunjungannya ke empat negara Asia, Presiden Nixon

memberikan briefing latar belakang politik baru Amerika bagi Asia di mana dikatakan: 'uang dan senjata, bukan pasukan, untuk membantu bangsa-bangsa di Asia, agar dapat mempertahankan dirinya sendiri secara militer'. Informasi tersebut disampaikan secara panjang lebar oleh Presiden Amerika itu kepada pimpinan-pimpinan negara-negara yang dikunjunginya yaitu Philipina, Indonesia, Thailand dan Vietnam Selatan, serta menekankan perlunya kepercayaan kepada diri sendiri dalam tahun 1970-an yang kemudian disebut dengan '*Nixon Doctrin*'.

Kebijaksanaan baru Washington itu telah menyebabkan penyesuaian kebijaksanaan bagi negara-negara yang terletak di selatan Cina, yaitu Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Philipina dan Thailand yang telah mendasarkan politik luar negerinya selama 20 tahun (1950-1970) pada asumsi bahwa Amerika Serikat dan Cina merupakan pihak-pihak yang bermusuhan. Mereka terikat pada sistem pertahanan dengan Amerika Serikat.

Presiden Nixon selanjutnya mengatakan di Guam bahwa komunis tidak lagi bersikap seperti sebelumnya terhadap negara-negara yang sedang berkembang, dan bahwa pertumbuhan nasionalisme yang pesat dan ditambah dengan kebanggaan regional telah menandai zaman baru di Asia, di

mana Asia adalah bagi bangsa-bangsa Asia. Amerika tidak dapat mendikte kebijaksanaankebijaksanaan yang harus dilakukan baik bagi pembangunan maupun pertahanan bangsa-bangsa Asia.

Namun Presiden Nixon mengatakan bahwa sikap Cina Komunis, Vietnam Utara dan Korea Utara tetap merupakan ancaman bagi perdamaian dunia. Ancaman yang terbesar bagi perdamaian dunia, menurut Nixon akan datang dari Pasifik. Elemen-elemen dari doktrin Nixon yang merupakan *batu loncatan* bagi politik luar negeri Amerika itu adalah bahwa Amerika Serikat akan tetap memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah dibuatnya dengan negara-negara di Asia. Amerika akan memberikan perlindungan apabila salah satu negara nuklir mengancam kemerdekaan suatu negara yang bersekutu dengannya atau suatu bangsa yang dianggap penting bagi keamanan Amerika. Dalam hal-hal yang menyangkut bentuk-bentuk agresi lainnya Amerika akan membantu baik ekonomi maupun militer sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Tetapi yang akan perlu adalah bangsa-bangsa yang betul-betul terancam harus menyediakan pasukan-pasukannya sendiri untuk pertahanannya.

Pada tanggal 26 Juni 1970, Dr. Henry Kissinger yang pada waktu itu menjabat sebagai pembantu dalam bidang ke-

amanan nasional menambah, bahwa Amerika Serikat baik secara fisik maupun psikologis sudah tidak dapat lagi menahan agresi di segala tempat di dunia ini. Pendekatan pertama dilakukan dengan Pingpong Diplomacy "The ping heard round the world". Selama berlangsungnya kejuaraan tenis meja internasional di Negoya, di mana team tenis meja Cina mengundang team Amerika untuk berkunjung ke daratan Cina sebelum kembali ke negeri mereka. Tidak ada orang Amerika yang diperkenankan untuk berkunjung ke Cina sejak komunis berkuasa di Cina dalam tahun 1949. "Kami telah mengundang anda demi meningkatkan persahabatan antara rakyat Cina dan rakyat Amerika", demikian ucap juru team tenis meja Cina Sung Chung. Ternyata undangan itu diterima dan pada tanggal 10 April 1970, 15 orang Amerika yang terdiri dari 9 pemain, 4 orang official dan 2 orang istri dari mereka dengan menyeberangi sebuah jembatan dari Hongkong masuk ke dalam wilayah Cina dan disambut gembira di sang. Kunjungan team tenis meja itu mempunyai arti yang sangat besar bagi kedua bangsa karena sejak saat itu kedua bangsa tersebut mengirimkan rakyat mereka masing-masing untuk saling berkunjung dan dicabutnya total embargo Amerika terhadap Cina.

Proses pendekatan antara kedua bangsa yang sedang bermusuhan dilakukan oleh Amerika dengan sangat hati-hati, dimulai dari awal tahun 1968 dan mencapai puncaknya pada tanggal 21 sampai dengan 28 Pebruari 1972. Selama dua setengah tahun itu yang telah dilakukan Amerika adalah mencabut embargo perdagangan yang telah dilakukannya selama 21 tahun dan membebaskan ekspor bermacam-macam produksi Amerika Serikat non strategis dan mengizinkan impor komersil. Menghapuskan segala pembatasan yang melarang orang-orang Amerika ke Cina. Menghapuskan dalam bulan Nopember 1986 patroli Angkatan Laut regular Amerika di selat Taiwan. Mengumumkan bahwa Amerika akan mengurangi kehadiran pasukannya di daratan Asia.

Pada akhir kunjungan Presiden Nixon ke Peking tersebut telah dikeluarkan komunike bersama, di antaranya yang penting adalah kemajuan ke arah normalisasi hubungan antara Cina dan Amerika Serikat adalah demi kepentingan segala bangsa. Kedua negara berketetapan hati untuk mengurangi bahaya konflik militer internasional. Amerika Serikat dan Cina tidak akan mencari hegemoni Asia Pasifik dan baik Amerika Serikat maupun Republik Rakyat Cina akan menentang usaha-usaha oleh suatu negara manapun atau oleh sekelompok negara-negara yang akan mencari hegemoni seperti

itu. Dan tidak satu pihak pun bersedia untuk berunding atas nama pihak ketiga manapun atau akan membuat persetujuan-persetujuan atau pengertian-pengertian dengan negara lain yang ditujukan kepada negara-negara lain.

Kunjungan Nixon ini sangat penting artinya baik bagi dunia pada umumnya maupun bagi perimbangan kekuatan di Asia Tenggara yang dengan sendirinya akan berubah setelah bertahan selama lebih kurang 22 tahun. Tidak dapat kita sangkal kalau Nixon mengomentari kunjungan seminggunya ke peking itu sebagai "minggu yang telah merubah dunia". Meskipun pada akhirnya Nixon harus menainggalkan panggung politik disebabkan oleh skandal Watergate. Namun is sudah berhasil dengan gamblang melaksanakan kebijaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat dan sejarah telah membuktikannya

1.6. Strategi Diplomasi Clinton Dari Coercive Ke Accomodative

Kehebatan Amerika Serikat dalam dalam berbagai masalah internasional dapat dikategorikan sebagai negara yang paling banyak melibatkan diri dari kancah peperangan. Seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, perang terbatas di Korea dan Vietnam, terutama perang dalam menghadapi bahaya ancaman ekspansi Komunisme Uni Soviet yang dianggap sebagai "agre-

sor" Rusia yang ingin membangun dirinya menjadi kekuatan dunia yang berkuasa.

Untuk menjawab semua tantangan itu, maka strategi AS yang paling ampuh dilakukan pada saat itu adalah pembendung pengaruh Uni Soviet di belahan dunia dengan kekuatan militer, tanpa terlalu banyak memainkan peranan diplomasi.

Masalah tersebut dapat kita lihat dari Thomas Schelling yang menulis buku tentang *Strategy of Conflict* Oxford (1963) yang banyak dilakukan oleh para pengambil keputusan untuk melakukan tindakan "bargaining" daripada tindakan militer.

Setelah terjadinya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, Amerika Baru menampakkan kekuatan diplomasinya melalui perundingan-perundingan mengenai pembatasan senjata-senjata nuklir (SALT-1 dan SALT-2 yang belum diratifikasi). Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengkaji tentang perubahan Strategi AS pada masa diterapkan "Containment Policy" (1947) dengan kekuatan militer yang bersifat diplomasi "Coercive" yang dilakukan oleh para mantan presiden AS, hingga yang terakhir pemerintah George Bush dengan Perang Teluk. Tampilnya Bill Clinton sebagai presiden AS (1992-1996), terlihat adanya perubahan strategi AS.

Peluang dan kans Bill Clinton untuk meraih Kemenangan dalam jabatan presiden AS (1996-2000) yang kedua

kalinya akan banyak ditentukan oleh pengaruh dinamika internasional dan dukungan internal yang sangat kuat antara perumus kebijakan luar negeri dan pengambilan keputusan di tangan presiden Bill Clinton. Diplomasi yang diperankan oleh Bill Clinton dari gaya diplomasi Coercive yang dilakukan para pendahulunya melalui penerapan "Policy of Containment" dengan mengandalkan kekuatan militer.

Gaya diplomasi Bill Clinton selama ini, lebih bersikap Accommodative dalam menyelesaikan masalah internasional, seperti Perang Teluk, krisis etnik di Balkan dan upaya Clinton untuk menarik keluar Korea Utara dari kemelut politik yang tidak terkendalikan, terutama persenjataan nuklir Korea Utara dan ancaman terhadap Korea Selatan.

Walaupun AS sebagai satu-satunya negara superpower yang masih handal dan mempunyai potensi untuk menyelesaikan konflik yang berlarut-larut di Balkan. Krisis tersebut telah melibatkan kekuatan NATO, Pakta Pertahanan Atlantik Utara, namun penyelesaian krisis Balkan hanya dapat diselesaikan melalui keterlibatan Amerika Serikat secara penuh untuk melakukan permainan diplomasi dan tekanan militer. Hasil akhirnya konflik etnik yang berkepanjangan di bekas negara Yugoslavia itu dapat dihentikan perang saudara dan

ditegakkan demokrasi dengan dilaksanakannya Pemilu di Bosnia.

Peluang pertama untuk memenangkan dalam Pemilu AS, antara Bill Clinton dan Bob Dole, mantan veteran perang Vietnam lebih menguntungkan posisi Clinton dalam sphere of influence AS yang sangat besar menaruh perhatian dunia bahwa Amerika tidak hanya menggunakan kekuatan militer dengan mesin perang dalam mewujudkan perdamaian dunia. Peluang kedua, jalan menuju perdamaian di Timur Tengah masih terbuka buat Bill Clinton untuk menahan terjadinya pecah konflik baru antara Israel-Palestina, di mana peran diplomasi terus dikembangkan oleh Clinton, terutama diplomasi Accommodative, sehingga tidak terjadi perang Arab-Israel. Ketika Presiden Bill Clinton memasuki Gedung Putih, Clinton dianggap akan menempuh garis keras terhadap negara yang anti terhadap Amerika dan melakukan penyimpangan hak-hak azasi manusia (HAM).

Ketegaran Amerika dalam memproklamasikan Declaration of Independent dan Safe for Democracy menjadi indikator utama di dalam kebijakan politik luar negeri untuk melaksanakan tindakan politik yang diberlakukan bagi semua negara yang melakukan pelanggaran, penindasan dan penyimpangan terhadap sistem demokrasi versi Barat yang menjadi

perhatian Amerika, khususnya bagi negara-negara Dunia Ketiga.

Kekalahan George Bush pada tahun 1992, merupakan pukulan yang paling berat bagi kubu partai Republik. Presiden yang ditinggalkan Ronald Reagan yang meraih jabatan dua kali sebagai presiden AS tidak dapat disamakan oleh George Bush bukanlah karena Reagan berhasil memainkan "Coercive Diplomacy" (diplomasi dengan cara paksa), tetapi Reagan dapat mengendalikan posisi Amerika dengan "Bargaining Strategy".

Pada masa Perang Dunia Kedua, Presiden Franklin Delano Roosevelt mampu melakukan hal yang sama terhadap perilaku Uni Soviet dan Presiden Richard Nixon (The Great President) yang mengalami nasib dengan skandal Watergate. Di sisi lain Nixon mampu memanfaatkan momentum ancaman dari Uni Soviet, Amerika Latin dan keterlibatan Amerika di kawasan Asia Tenggara.

Keunggulan Amerika Serikat tidak hanya dalam bidang teknologi militer dan kemampuan secara ekonomis untuk melakukan tekanan terhadap suatu negara yang dianggap menentang kepentingan negara-negara Barat dan membahayakan kedaulatan negara lain. Tampilnya Amerika Serikat sebagai sokoguru penyelamat sekutu Barat yang paling

menonjol di bidang diplomasi, karena memiliki dua kubu kekuatan dalam merumuskan kebijakan luar negeri, yaitu aliran pemikiran Realis dan aliran pemikiran Idealis. Kedua kubu aliran tersebut banyak sekali memberikan kontribusi dari berbagai masalah dan dilemma internasional merupakan bahan pertimbangan untuk menentukan langkah dan tindakan Amerika.

Keterlibatan Amerika Serikat, terutama dalam membendung kekuatan Uni Soviet dengan ideologi komunisme atas desakan dari George Kennan sebagai seorang ilmuwan dan diplomat AS di Moskow, yang menyatakan bahwa kebijakan Soviet untuk melayani imperatif ideologis menuntut perjuangan dan perlawanan global terhadap kapitalis, antagonisme dasar antara Kapitalisme dan Sosialisme, Soviet tidak akan pernah bersedia berdampingan dengan suatu masyarakat yang dianggap kapitalis *The Sources of Soviet Conduct* (Foreign Affairs, Juli 1947). Dengan dikeluarkannya "Truman Doctrine" mengenai Policy of Containment (politik pembendungan) untuk alasan-alasan sejarah dan ideologi Uni Soviet akan mencoba memperluas kontrol politiknya setelah Perang Dunia II di luar batas geografisnya. Desakan tersebut dikeluarkan kebijakan long-term AS (Doktrin Truman) untuk membendung ekspansi

Uni Soviet, sebagai prioritas terutama di negara-negara Dunia Ketiga.

Lahirnya Truman Doctrine juga mendapat tantangan dari kaum aliran Realis, justru memberikan kesempatan bagi perumus kebijakan politik luar negeri AS untuk memberikan masukan kepada Presiden Harry S. Truman (1947-1952) untuk memanfaatkan dinamika dan fenomena internasional untuk kepentingan AS yang mencakup bidang politik, ekonomi dan militer. Ketiga pilar kekuatan ini yang menyebabkan AS tidak dapat lagi mempertahankan politik isolasi terhadap perkembangan dunia internasional.

Kerjasama antara Presiden Truman dengan George Kennan mendapat kritik yang paling keras dari aliran Realis yang dipimpin oleh Hans Y. Morgenthau In Defense of the National Interest (1950) menuduh perspektif itu sebagai sentimentalisme dan moralisme, bahwa doktrin Truman mengubah kepentingan konkret Amerika Serikat dalam bagian-bagian geografis dunia menjadi suatu prinsi moral berskala dunia, dan diaplikasikan tanpa memperhatikan keterbatasan kepentingan dan kekuatan Amerika. Sebagai pedoman tindakan politik, perspektif tersebut hanya akan menimbulkan korban, karena prinsip moral mengandung dua kelemahan pokok, yaitu ketidakmampuan untuk membedakan antara apa yang

diinginkan dan apa yang esensial. Tudingan lain yang lebih keras dari jurnalis Walter Lippmann, salah seorang tokoh realis yang menyebutkan Doktrin Truman itu sebagai "Bencana Strategis" yang tidak mampu mengubah situasi Eropa Timur.

Isu politik dan perdebatan dalam kabinet Harry S. Truman tentang Perang Korea bahwa AS tidak akan mengambil resiko atas pemboman di Yalu dan tidak akan menggunakan kekuatan senjata-senjata nuklir. Kesalahpahaman dan permusuhan antara Amerika Serikat-China yang menganggap invasi Korea Utara terhadap Korea Selatan pada bulan Juni sebagai tindakan agresi internasional yang disponsori oleh RRC dan Uni Soviet.

Ketika pasukan AS dapat mengusir Tentara Utara keluar dari Selatan, AS mendapat tantangan dari pasukan China, sehingga AS harus meninggalkan perang terbuka antara pasukan AS melawan pasukan China. Menurut Jenderal Douglas MacArthur dalam peperangan "There is no Substitute for Victory" (di sana tidak ada substitusi untuk kemenangan). Keuntungan lain yang diperoleh dari situasi nasional dewasa ini bahwa Rusia sedang menutupi konflik internal yang semakin memburuk dan timbulnya pergolakan para elit politik untuk bertarung dalam merebut kursi kekuasaan tertindas Kremlin.

Kepemimpinan Boris Yeltsin di bawah payung kebesaran Uni Soviet telah banyak mendapat rongrongan dan tekanan Domestic Constrain menyebabkan ketidakmampuan negara Beruang Merah mempertahankan eksistensi dan konsistensi terhadap kebijakan luar negeri Rusia. Kenyataan ini, setelah Pakta Pertahanan Warsawa dibubarkan dan NATO tetap dipertahankan untuk kepentingan di Eropa Barat, dan menarik negara-negara bekas Uni Soviet untuk masuk menjadi bagian dari kekuatan Barat.

Tahun 1997 mendatang merupakan setengah dari penerapan strategi Containment (1947-1997) yang membawa dampak perubahan dan ketidak berdayaan Rusia untuk mempertahankan negara-negara satelitnya dan gerakan-gerakan revolusi, di kawasan dunia. Semakin jauh dari kenyataan dan impian Stalin untuk membangun Emperium (Kerajaan) Uni Soviet.

Kehancuran ekonomi dan perpecahan bekas negara-negara Uni Soviet itu dalam upaya menghimpun kekuatan tandingan terhadap kemajuan di bidang teknologi militer semakin menguras keberadaan kemampuan untuk mendominasi negara-negara ideologi komunis yang telah melakukan re-orientasi ekonomi dalam era liberalisasi ekonomi dunia. Penerapan strategi diplomasi gaya Bill Clinton dengan

Accomodative lebih efektif dan jalan untuk mencari kemenangan bagi Amerika.

BAB II

INTERVENSI UNI SOVIET DI AFGANISTAN

2.1. Pendahuluan

Perkembangan sejarah telah memberikan gambaran situasi hubungan internasional atau hubungan antar negara terlihat semakin kompleks dan rumit. Hal ini dapat terlihat, pertama dari segi teoritika terdapat perkembangan ataupun penyempurnaan dari teori-teori yang mengkaji masalah-masalah hubungan internasional (perkembangan dari behaviour approach, game teori). Kedua dari segi praktika, dengan munculnya negara-negara yang baru merdeka di Asia-Afrika serta timbulnya dominasi dua negara adikuasa AS dan US menambah masalah hubungan antar negara.

Dewasa ini, masalah yang paling jelas dan dominan dari hubungan internasional adalah adanya persaingan pengaruh dari AS dan US. Sehingga akibatnya muncul dua kutub orientasi negara-negara tersebut. Negara yang memihak AS disebut dengan blok Barat dan negara yang memihak US disebut blok Timur, sementara juga ada negara yang bersifat Non Blok.

Persaingan dan perempuan pengaruh antara AS dan US di satu segi dan kelemahan atau keterbelakangan negara-negara

nonblok, mereka memiliki sumber alam potensial. Hal inilah yang menjadi dasar perebutan pengaruh AS dan US. Apabila perebutan pengaruh tersebut mempunyai kesamaan dalam dimensi waktu dan kepentingan menyebabkan semakin tajamnya persaingan kedua negara itu.

Keterlibatan kedua negara adikuasa di Asia-Afrika semakin meningkat seperti di Timur Tengah dan Asia Tengah. Setelah peristiwa Vietnam, maka US mencoba melirik ke Afganistan, suatu kawasan yang strategis dan sangat penting di Asia Tengah. Luas wilayah Afganistan 647.500 km persegi atau 250.000 mil persegi, 22% dari luas wilayah dapat ditanami, 75% berupa padang pasir, dan 3% hutan. Negara ini tidak memiliki pantai, sebelah utara berbatasan dengan Uni Soviet yaitu Republik Turkemia, Uzbekistan dan Tajikistan. Jauh di timur laut terbentang 80 km berbalasan dengan daerah otonom Shinkiang yang dikuasai RRC, sebelah tenggara berbatasan dengan RRC, sebelah timur dan selatan dengan Pakistan dan sebelah Barat berbatasan dengan Iran.

Bila kita mengkaji masalah intervensi US ke Afganistan haruslah dilihat secara keseluruhan faktor-faktor yang menunjang masalah itu, dengan kata lain banyak permasalahan yang terlibat di dalamnya, akan tetapi kami membatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi Soviet melakukan intervensi

dan akibat-akibat yang ditimbulkannya dalam segi politik dan pola-pola hubungan di kawasan tersebut. Topik yang menjadi lokasi masalah ini merupakan masalah yang menarik perhatian para pengamat hubungan internasional dalam konteks politik luar negeri menjadi perhatian negara-negara di dunia.

2.2. Sejarah Pemerintahan Afganistan

Pada masa pemerintahan Muhammad Daud telah ditandatangani persetujuan ekonomi dan perdagangan dengan Uni Soviet (US) selama jangka waktu tiga puluh tahun. Tetapi kemudian Daud berusaha menjalankan politik non blok dan mengurangi ketergantungan pada US. Dia secara berlahan mengurangi jumlah penasihat militer US dari 1000 orang menjadi 200 orang saja. Kebijakan ini tentu tidak disenangi US, karena politik pemerintahan Daud yang makin menjauhi US.

Selama menjalankan pemerintahan, Muhammad Daud bersikap sewenang-wenang, antara lain tidak mengadakan Pemilu dan menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Kegagalannya untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi menambah antipati rakyat kepadanya. Daud kehilangan dukungan dan kelompok politik lainnya yaitu yang termasuk Ikhwani-Muslimin (persaudaraan Islam) yang tidak menyukai

Daud karena hubungan dengan golongan kiri/kedua partai berhaluan kiri (Parcham dan Kalq). Situasi dalam negeri yang demikian, menyebabkan dua partai yang bersaing (Parcham dan Kalq) mengadakan koalisi untuk menggulingkan pemerintahan Daud. Pada tanggal 27 Mei 1976 terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh golongan militer yang didalangi oleh kedua partai tersebut dan dibantu oleh Uni Soviet.

Dengan dukungan Uni Soviet, Nur Muhammad Taraki menggantikan Daud sebagai presiden dari Republik Demokrasi Afganistan, tetapi tiga bulan setelah jadinya kudeta, timbul perpecahan antara kedua partai ini. Partai Kalq dapat mementaskan diri dalam persaingan. Presiden Taraki menyingkirkan pengikut-pengikut Parcham termasuk wakil presiden Babrak Karmal yang diangkat menjadi Duta Besar di Chekoslawakia. Kelompok Kalq berkeinginan memegang monopoli kekuasaan, tidak saja orang-orang dari kelompok Parcham yang disingkirkan, melainkan juga orang-orang yang dianggap menentanginya.

Sementara situasi bertambah buruk karena perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan Taraki mendapatkan tantangan dari rakyat, yang kemudian menimbulkan anti terhadap pemerintah. Pada September 1979,

Taraki dibunuh, kedudukan Taraki digantikan oleh Hafizullah Amin.

Ketika Hafizullah Amin berkuasa, Uni Soviet mulai dengan gerakannya pada tanggal 27 Desember 1979, pasukan-pasukan Soviet memasuki Afganistan dengan kekuatan militer dan berhasil menggulingkan Presiden Hafizullah Amin dan menggantikannya dengan Babrak Kamal. Babrak Kamal telah memproklamkan negaranya sebagai Republik Demokrasi Afghanistan yang menjadikan Sosialisme sebagai ideologi negara. Hubungan baiknya dengan Moskow, menunjukkan bahwa sosialisme yang dipilihnya adalah “Sosialisme-Sovyet”. Oleh karena itu pada hakekatnya Babrak Kamal telah melicinkan jalan bagi masuknya ajaran

2.3. Polandia Di Persimpangan Jalan

2.3.1 Pendahuluan

Dewasa ini perkembangan dunia internasional telah mengalami berbagai gejolak yang kompleks dan sulit ditelaah. Persoalan yang mendasar adalah timbulnya cara-cara kekerasan dengan kekuatan militer-politik demi mempertahankan 'strategi global' dua superpower untuk menanamkan pengaruhnya. Pergolakan di Polandia telah dipacu oleh persaingan antara blok Barat-Timur dan sejumlah model intervensi militer dan

campur tangan politik secara langsung bila terjadi krisis ekonomi.

Krisis ekonomi dan tuntutan kaum buruh dalam kenaikan taraf hidup merupakan dilema yang berkepanjangan. Sejak teori yang dikembangkan Karl Marx yang bersifat revolusioner yang lahir dan jiwanya dan berbakat revolusioner, yang menamakan ajarannya sebagai "Marxisma", pada hakekatnya dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan yang revolusioner. Masyarakat yang harus ditolak dan dihukum adalah masyarakat yang kapitalis, sedangkan masyarakat yang diharapkan dan diyakini adalah masyarakat yang sosialis.

Persaingan antara kubu imperialis komunis mewarnai spektrum dan opini dunia tentang perubahan masyarakat dan hak-hak azasi manusia. Teori Stalin tentang perkembangan di dunia, tidak saja memperkirakan kecondongan dunia kapitalis untuk bersama-sama memerangi dan menghancurkan dunia komunis Uni Soviet, akan tetapi Stalin juga menekankan kemungkinan pertentangan antara kaum kapitalis itu sendiri. Krisis ekonomi, resesi dan pengangguran merupakan bahaya yang mengancam eksistensi kehidupan sesuatu negara. Dunia kapitalis pun mengalami krisis ekonomi dari tahun 1929-1935. Meskipun demikian, sesudah Perang Dunia Ke-II, teori krisis

yang dikembangkan oleh Karl Marx itu tidak dapat dijadikan pedoman untuk melihat dunia secara perspektif.

Terlepas dari persaingan kedua superpower itu maka model baru yang dikembangkan oleh Moskow adalah tidak ingin melihat salah satu blok komunis yang mencoba condong ke Barat, karena itu Uni Soviet berusaha dengan melakukan tekanan politik militer terhadap Polandia. Kremlin jelas takut akan terjadinya proses keretakan di antara blok komunis karena Polandia merupakan kubu Uni Soviet yang dianggap sangat strategis bagi kepentingan Soviet. Kegoncangan politik yang terjadi di Polandia, secara otomatis akan melibatkan Uni Soviet untuk menyelamatkan Pakta Pertahanan Warsawa dari kehancuran dan perpecahan.

Marilah kita telusuri sebentar sejarah Polandia untuk memperjelas gambaran kita mengenai kejadian akhir-akhir ini. Polandia sebelum kemerdekaan telah mengalami serentetan penindasan dan pergolakan. Campur tangan Russia dalam tahun 1830 dan 1863, didorong oleh motivasi Russia berupa imajinasi kekuasaan untuk memperluas basis pengaruhnya di Polandia. Negara beruang merah ini lebih menekankan pada dominasi 'pendekatan strategis', dan bukan saja 'pendekatan taktis'. Napsu kekuasaan dan haus akan wilayah kekuasaan (sphere of influence) telah tumbuh subur di kalangan pemimpin Kremlin

untuk memforsir segala cara kekerasan dan pergolakan di berbagai dunia internasional. Dan yang paling urgensi daripada pendekatan strategis adalah posisi geografis untuk menjaga status-quo, balance of power (keseimbangan kekuatan) dan kestabilan politik dalam negeri sendiri.

Satu tahun setelah kemerdekaan Polandia dalam tahun 1918 di bawah kekuasaan Pilsudski, Polandia memanfaatkan kelemahan Russia saat itu melalui perang dan revolusi untuk merebut daerah Ukraina dan Lithuania. Karena kemampuan militer Polandia yang masih konvensional, tentara merah Uni Soviet dapat menghentikan laju pasukan Polandia sebelum sampai di Kiev. Namun dalam peperangan ini Russia dikalahkan oleh tentara Pilsudski yang menguasai kedua daerah tersebut. Russia-Polandia menyetujui suatu front pertahanan sepanjang 240 Km dan kemudian Ukraina (di bawah dominasi Polandia) mengadakan pakta pertahanan dengan Perancis dan Polandia pada bulan April 1939. Pakta pertahanan itu tidak dapat bertahan lama, karena Jerman melakukan invasi militer ke Polandia tanggal 1 September 1939, dan tiga hari kemudian Ukraina-Perancis mengumumkan perang dengan Jerman. Russia melihat peluang emas itu melakukan intervensi atas Polandia 17 September 1939.

Hal seperti itu dilakukan pula oleh Uni Soviet yang secara terang-terangan mendukung suatu perebutan kekuasaan di Cekoslowakia (Februari 1948) dan mendirikan boneka komunis di Praha. Perebutan kekuasaan itu diilhami dengan tindakan kekerasan yang bermotifkan "social conflict" dalam proses kehidupan manusia dan sikap anarkis. Berkaitan dengan perebutan kekuasaan itu, Kongres Amerika Serikat pada waktu itu menunda rencana Jenderal Marshall ('Marshall plan') yang dikemukakan pada bulan Juni 1947 untuk menghidupkan kondisi-kondisi politik, ekonomi, sosial dan mensponsori lembaga-lembaga demokrasi internasional. Didorong oleh tindakan Soviet tersebut, akhirnya kongres Amerika Serikat meratifikasi rencana Marshall (April 1948) untuk memberi bantuan dan mencegah arus ekspansionisma komunisma.

Wladyslaw Gomulka, salah seorang tokoh politik Polandia yang memimpin gerakan United Workers Party (UWP) sejak tahun 1945 dianggap terlalu ekstrim dan sangat anti Stalinisma di Polandia, melakukan demonstrasi-demonstrasi. Kemudian ia dijebloskan ke dalam tahanan politik tanpa melalui proses pemeriksaan pengadilan. Meskipun ia kembali berkuasa dalam tahun 1955, namun terjadi pertentangan dengan Kardinal Wyszynski, tetapi ia melakukan pembebasan terhadap Wyszynski yang mempunyai pengaruh

sangat kuat di Polandia. Gomulka merupakan orang pertama yang melakukan pemilihan umum dan mencoba menerapkan suatu sistem perekonomian yang bersifat sosialisma.

2.3.2 Serikat Buruh Bebas Solidaritas

Hal yang menarik untuk membicarakan gerakan buruh Polandia, akan tidak terlepas untuk menyebutkan figur Lech Walesa, 40 tahun, yang ketenarannya meroket setelah ia diangkat sebagai pemimpin serikat buruh bebas Solidaritas. Pendukung yang berjumlah sekitar 10 juta (penduduk Polandia 35 juta jiwa), masih tetap setia kepada gerakan Solidaritas, meskipun ia dipenjarakan dan dibekukan sejak berlakunya Undang-Undang darurat militer yang diumumkan tanggal 13 Desember 1981. Gerakan buruh Solidaritas ini lahir bulan Agustus 1980 di Gdansk, pelabuhan galangan kapal Lenin, di pantai Baltik.

Krisis ekonomi dan kekurangan bahan makanan menggiring Polandia kepada suatu lubang penderitaan yang mendalam, pemogokan dan demonstrasi-demonstrasi timbul di beberapa kota besar, dan menjadi lebih gawat lagi. Negara-negara komunis Eropa Timur menilai wilayahnya sebagai sorga dunia kaum buruh, tetapi di mana-mana upah yang diterima kaum buruh itu tidak layak. Untuk mempertajam analisa kita

bahwa permasalahan kaum buruh itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs) dan pembagian rezeki yang sesuai dengan standar hidup. Kaum buruh juga menuntut pelayanan yang selayaknya dan hams dihargai sebagai abdi negara. Penyimpangan dari kelayakan merupakan aksioma dari benih-benih ketidakadilan yang seringkali diwujudkan dengan motif kerusuhan. Keterbatasan peranan organisasi Buruh Internasional (ILO) yang berkedudukan di Geneva menyebabkan ia belum mampu mengatasi persoalan kaum buruh di seluruh dunia. Ibarat Dewan Keamanan PBB yang sudah dianggap impoten untuk menyelesaikan konflik internasional.

Sementara itu di antara negara-negara blok komunis Uni Soviet harus mengeluarkan anggaran pertahanan militer yang begitu besarnya, sehingga jangkauannya tidak ditemui dalam anggaran belanja yang diumumkan. Karena anggaran militer sangat dirahasiakan. Momentum yang dramatis bagi blok komunis, terutama Uni Soviet dengan pengeluaran anggaran militer berkisar antara 14 sampai 15 persen dari GNP-nya. Tetapi celakanya, siapa yang berani melancarkan kritik terhadap persoalan itu maka oknum tersebut dicap "anti sosialis" dan membahayakan negara. Efek lain

adalah menjalani pengadilan rahasia, kerja paksa atau pembuangan di tramp konsentrasi Siberia.

Pemerintah militer Polandia mengisyaratkan pembubaran semua organisasi buruh yang ada, untuk diganti dengan organisasi-organisasi yang baru pada tingkat pabrik. Rencana itu mempersempit ruang gerak kaum buruh, walaupun mereka mempunyai hak untuk mengurus kepentingannya, tetapi aktivitasnya dibatasi dan pembatasan itu terutama diletakkan pada hak melakukan mogok. Sejauh itu, anggota Parlemen (Sejm) dalam sidangnya 8 Oktober 1982 mengesahkan rancangan Undang-Undang untuk menghapuskan semua serikat buruh Polandia, termasuk serikat buruh bebas Solidaritas. Rancangan itu diterima oleh mayoritas anggota Parlemen Polandia, dari 460 kursi dalam Parlemen, hanya 10 suara yang menentang dan 9 suara bersikap abstain.

Komite Koordinasi mendesak pendukungnya supaya menahan diri dan tidak melakukan aksi protes di dekat gedung Parlemen agar supaya pemerintah tidak memakai kerusuhan ini sebagai dalih untuk membenarkan tindakan pembubaran Solidaritas. Aktivist-aktivis Solidaritas mengusulkan agar menyusup ke dalam serikat-serikat buruh resmi yang baru, supaya dapat bergerak dari dalam, yang dibentuk oleh rezim PM Jaruzelski yang pro Moskow. Dan berusaha untuk

menghindari diri dari pasukan anti huru-hara yang tidak segan-segan melakukan tindakan kejam. Anggota militan Solidaritas menilai usaha pembubaran Solidaritas sebagai "kegiatan teori politik yang tidak sah".

Pemerintah di bawah kekuasaan PM Jaruzelski tidak akan berani menyelenggarakan sebuah referendum nasional mengenai kebijaksanaan partai yang menolak wewenang kaum buruh untuk mengawasi pengangkatan atau pemecatan kepala pengurus perusahaan. Pemerintah lebih menyukai membawa persoalan itu ke Parlemen (Sejm), dimana mayoritasnya mutlak dikuasai. Resolusi untuk melakukan referendum nasional yang dihasilkan dalam Kongres pertama serikat buruh bebas Solidaritas, dipandang lebih mengancam kestabilan kekuasaan militer dan partai komunis. Pemerintah dengan dukungan partai komunis ingin meluluskan konsep partai itu melalui sebuah rancangan Undang-Undang guna disahkan sebagai Undang-Undang Perburuhan.

Pengumuman pembubaran serikat buruh bebas Solidaritas diduga mendapat reaksi dari anggota-anggota Pakta Warsawa. Anggota-anggota Pakta Warsawa ini berkali-kali mengingatkan bahaya politis yang ditimbulkan oleh serikat buruh Solidaritas dan mendesak rezim Warsawa untuk membentuk serikat buruh yang berwatak komunis-ortodok. Kantor

berita Uni Soviet, Tass menggaris-bawahi UU perburuhan sebagai alat yang membatasi hak dan kewajiban berbagai serikat buruh, dan sekaligus mengekang kebebasan organisasi buruh terjun dalam kegiatan politik.

Terutama Amerika Serikat mengecam keras Undang-Undang baru itu dan bahkan peraturan itu dianggap sebagai bukti "diktatur militer" rezim Polandia. Presiden Ronald Reagan menilai tindakan pembubaran serikat buruh bebas Solidaritas sebagai sesuatu yang mengerikan dan akan melakukan sanksi ekonomi baru terhadap pemerintah Polandia. Presiden Reagan secara resmi telah mencabut status "most-favored nation" bagi Polandia dan langkah yang ditempuh Amerika Serikat dianggap oleh Moskow sebagai campur tangan Washington terhadap urusan dalam negeri Polandia. Pemimpin Partai Komunis Polandia menuduh Amerika Serikat dan Eropa Barat melakukan tekanan ekonomi terhadap Polandia, hanya mendorong Polandia untuk memperkuat hubungan kerjasama dengan Uni Soviet.

Dari berbagai analisa pens Barat mengenai situasi di Polandia itu dapat dilihat bahwa yang dipandang menjadi alasan utama tindakan rezim Jaruzelski itu ialah kenyataan, bahwa Solidaritas terlampau jauh bertindak dengan dukungan kaum buruh, dan anggota-anggotanya yang terkemuka semakin

kuat dan berakar mengambil sikap anti komunis dan malahan juga anti Soviet. Tetapi bila diterima estimasi, bahwa meluasnya beberapa tuntutan Solidaritas justru dirangsang oleh taktik-taktik obstruksionis dari pihak birokrasi partai dan ketidakmampuannya memperbaharui diri dan menggalang kerjasama. Juga ketidakmampuan partai melaksanakan perbaikan-perbaikan ekonomi yang dijanjikan kepada rakyat.

Di tengah-tengah keadaan ekonomi yang semrawut dan parah sebagai akibat gelombang pemogokan yang berlangsung oleh kaum buruh, timbul ketegangan-ketegangan yang dikawatirkan mengundang intervensi militer Soviet. Partai komunis Polandia (partai pemerintah) pada sidang tanggal 13 Februari 1981 mengambil keputusan untuk memberhentikan PM Pinkoweski dan menunjuk Jenderal Jaruzelski ke pucuk kepemimpinan Pemerintahan Pinkoweski hanya mampu bertahan selama 6 bulan raja. Dalam konteks ini, Jaruzelski memperkokoh posisi militer dan mengambil alih pos-pos penting dalam pemerintahannya. Kemampuan operasional organisasi militer dan dukungan Soviet itu dapat mengendalikan kerusuhan-kerusuhan dengan 'show-force' untuk menakut-nakuti kaum buruh Solidaritas dan melakukan penangkapan-penangkapan para pemimpin Solidaritas, sebagai jalan tengah untuk mematikan aktivitas-aktivitas buruh Solidaritas.

Polandia bukanlah Cekoslowakia, merupakan suatu ungkapan yang berarti, bukan saja karena perbedaan esensial antara proses liberalisasi di Polandia dan Cekoslowakia. Namun juga adanya perbedaan kondisi politik global yang strategis yang dirintis sekelompok elit politik yang memegang posisi kunci (key position), penumpukan legitimasi kekuasaan dengan cara-cara teori Machiavelli. Sentralisasi dari partai komunis Uni Soviet adalah diilhami oleh pergolakan kelas dan nostalgia terhadap Tzar Ivan "the terrible" (kaisar Ivan yang mengerikan).

Pada fase baru tertentu, Polandia akan merealisasikan proses liberalisasi secara utuh dan mendobrak dominasi partai komunis boneka Uni Soviet. Pemanfaatan dalam proses transformasi dari era baru muter akan memperlihatkan pemisahan dan kontradiksi-kontradiksi di dalam partai itu sendiri yang ditopang oleh rezim penguasa. Pengalaman sejarah Polandia yang akan mencatat sepak-terjang dari mitos-mitos komunisma sebagai ideologi yang patent. Sikap kritis dari agama Roma Khatolik yang mayoritas 90 persen menyebabkan orang belum bisa melupakan peranan Kardinal Wyszynski yang merupakan tokoh kharismatis yang mampu membendung deras ajaran komunisma yang dipaksakan oleh penguasa sejak Perang Dunia Ke-II. Aktualisasi Polandia

adalah satu-satunya negara sosialis dengan pemogokan hampir boleh dikatakan sebagai suatu tradisi. Walaupun harus diakui bahwa Solidaritas merupakan suatu serikat buruh yang 'independen' yang merupakan trauma yang menakutkan bagi penguasa sekarang ini.

Soviet nampaknya telah cukup jeli melihat kerawanan-kerawanan posisi Solidaritas. Surat Leonid Brezhnev yang ditujukan kepada Stanislaw Kania agar lebih memperkeras tekanan terhadap apa yang disebut "elemen-elemen kontra revolusioner" dalam sistem diktator-proletar, merupakan manifestasi dari pandangan baru Soviet akan situasi Polandia. Bahkan Kania sendiri mendapat kecaman pedas oleh Soviet, karena dianggap terlalu lunak dalam menghadapi tuntutan kaum buruh. Apakah suatu ketika Polandia akan kehilangan kontrol terhadap rakyatnya? PM Jaruzelski mengatakan kepada Brezhnev bahwa kekuatan anti-revolusioner yang bergerak di bawah tanah mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Dukungan tersebut dianggap memperpanjang situasi krisis di Polandia.

Kita sudah mengetahui apa nasib Polandia di kemudian hari. Solidaritas sudah dibubarkan kegiatannya, tank-tank Soviet leluasa memasuki Polandia. Kemudian itu Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya hanya menyaksikan sebuah drama, di

mana pelakon-pelakon tidak dapat berbuat apa-apa. Karena semua tuntutan gerakan buruh Solidaritas, jelas-jelas mengancam dan membahayakan eksistensi komunisma di Polandia. Menurut pemikiran Uni Soviet, serikat buruh Solidaritas harus dimusnahkan, sebab perjuangan Solidaritas dianggap bisa meracuni gerakan buruh negara-negara Eropa Timur. Dan inilah akibat yang harus dibayar mahal oleh pemerintah militer di bawah Wojciech Jaruzelski. Imbalan yang diterima oleh Moskow adalah pembubaran Solidaritas dan lahirnya Undang-Undang darurat militer serta UU perburuhan yang dikuasai oleh partai persatuan kerja atau partai komunis.

Kecenderungan lain adalah tidak ada lagi kebebasan yang menentukan bagi rakyat Polandia, yang menjadi suatu pembatasan kebebasan yang mematikan kreativitas di negeri di pantai Baltik itu. Moskow boleh bangga dengan pendekatan strategisnya telah berhasil membendung arus pergolakan di Polandia. Romantisma bagi rezim Kremlin untuk memperkuat sistim kontrol terhadap semua aktivitas negara-negara blok komunis dan sekaligus memperluas daerah pengaruh (sphere of influence) partai komunis di belahan bumi ini. Kongres Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) yang setiap 5 tahun berlangsung itu, merupakan forum yang menentukan garis-garis besar kebijaksanaan untuk rencana 5 tahun berikutnya. Suatu tanda

persatuan dalam partai terjamin, tidak ada perubahan dalam susunan komite Sentral PKUS, yang beranggotakan 470 orang dan Kongres PKUS yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 1981, merupakan kongres yang ke-26. Leonid Brezhnev yang mengambil alih kekuasaan dari tangan Nikita Khrushchev dalam tahun 1964 dapat dikatakan agak konservatif bila dibandingkan dengan Khrushchev, karena ia menampilkan suatu rezim yang stabil dan kuat.

2. 3. 3. Ajaran Internasionalisma-Proletariat Fase

Pelapukan

Nasionalisma mempunyai daya kekuatan yang sangat dominan dalam proses naik-turunnya gelombang pertentangan lokal maupun internasional. Penyebab utama adalah ketergantungan pada bidang ekonomi dan ambisi-ambisi kepemimpinan lokal serta campur tangan pihak luar terhadap krisis-krisis sosial, yang memaksakan negara-negara raksasa turut ambil bagian dalam konflik tersebut. Uni Soviet lebih banyak mengambil keuntungan dari keterlibatannya dalam "kegiatan politik air keruh". Tetapi Soviet itu sendiri sebenarnya dari hari ke hari mencoba menumpas rasa ketakutan sendiri yang mendalam. Takut bahwa pada suatu saat daerah-

daerah koloni seperti Ukraina, Lithuania, Estonia, Uzbekistan dan lain-lain akan bangkit menentang kekuasaan Kremlin.

Kelompok elit komunis merupakan suatu kelompok yang senantiasa mengagung-agungkan panji nasionalisme Rusia. Mereka itu termasuk media massa, partai, politbiro dan penganut ideologi keras Mikhael Suslow, yang sangat menghormati lagu kebangsaan, sehingga dalam hal ini menghasilkan paling sedikit dua keuntungan. Adalah lebih populer dan lebih bermanfaat menghalalkan kekuasaan yang ada daripada menghalalkan ideologi komunis yang mana termasuk seperangkat cita-cita, kebangsaan, paranoia, kekuasaan dan ekspansi yang selaras dengan kebijaksanaan luar negeri Kremlin.

Tidak dapat kita lupakan lembaran sejarah Russia seperti gerakan Michael Bakunin dan Kropotkin yang revolusioner anarkisma mencoba menghantam ajaran marxisma Karl Marx. Anggapan yang paling ekstrim adalah bahwa negara merupakan alat atau simbol penindasan. Ketika gerakan anarkisma mulai mengembangkan sayapnya di Russia di bawah dominasi Tzar, Lenin tampil mempertentangkan antara kekuasaan dan kebencian terhadap pemerintahan. Semboyan yang terkenal dari Lenin: "Eksistensi negara harus dihancurkan."

Internasionalisma bukanlah wujud yang terakhir dan semboyan kaum buruh di seluruh dunia bersatulah adalah pekik proletariat. Tiap-tiap proletaris di masing-masing negara masih harus berjuang memperluas daerah pengaruhnya, atau harus menerobos batas-negara yang terbawa oleh sistem kapitalis untuk berjabat tangan dengan proletaris dunia menghancurkan kapitalisma dunia. Internasionalisma bukanlah menyuruh kaum buruh dari masing-masing negara di dunia, duduk berpangku tangan saja, dan mengharap-harapkan datangnya internasionalisma sebagai satu hadiah yang jatuh dari langit.

Menurut doktrin komunisma kediktatoran-proletariat, kelas pekerja itu mengontrol semua klas-klas lain dalam masyarakat negara. Moskow menilai pemberontakan Solidaritas Polandia itu sebagai oportunisma, dalam artian meninggalkan doktrin komunis dengan tujuan mengambil keuntungan dari kesempatan yang baik dalam kerusuhan yang timbul. Gerakan buruh bebas Solidaritas ini lebih bersifat liberal nasional, yang berarti menantang internasionalisma proletariat.

Ajaran internasionalisma proletariat yang diajarkan oleh Karl Marx tidak dapat berkembang menjadi kekuatan modal dalam perdagangan internasional. Pandangan Marx-Engel dalam bukunya "Manifesto Komunis", bahwa semua ajaran

kapitalis harus dimatikan dan dipandang sebagai musuh utama kaum buruh, sama sekali bertentangan dengan hakekat hidup manusia termasuk kehidupan kaum buruh itu sendiri. Kaum buruh tidak bertambah kuat dengan perkembangan konsentrasi kapital yang bersifat internasional. Inilah akhirnya menjadi bumerang bangkitnya kekuatan perasaan patriotisma dan nasionalisma di kalangan kaum buruh, yang ingin melenyapkan faham mancisma-leninisma itu sendiri. Di pihak lain, kapitalisma itu sendiri masih bergelut untuk mengatasi kelemahan-kelemahannya. Krisis ekonomi dan inflasi merupakan bahaya yang serius sekali. Kita tunggu, mungkin Polandia sudah sampai di persimpangan jalan menuju liberalisma nasional ?

2.3.4. Keputusan Politik

Keputusan pemerintah Polandia untuk membebaskan tokoh buruh bebas "Solidaritas" Lech Walesa ternyata terkabul. Gambaran ini memperlihatkan secuil harapan pemerintah bahwa kebebasan tokoh Solidaritas itu mempunyai dampak politik. Sekurang-kurangnya keinginan Rezim Jaruzelski untuk mengurangi ketegangan antara rakyat dan pemerintah. Selama menjalani masa penjara sebelas bulan maka Lech Walesa

tentunya lebih menyadari hal itu. Apa sebenarnya latar belakang dari pembebasan itu?

Meskipun harapan pemerintah Polandia dengan dibebaskan pemimpin Solidaritas seakan-akan citra Jaruzelski akan lebih mantap dan dapat menyelesaikan semua persoalan. Kerangka pemikiran itu dilandasi bahwa aktivitas gerakan buruh Solidaritas sudah dilumpuhkan dan dianggap sebagai serikat buruh terlarang. Kemungkinan lain adalah adaptasi politik yang digariskan Walesa sudah tidak mempunyai side-effect lagi. Figur Lech Walesa telah tenggelam bersama Solidaritas. Pola kebijaksanaan Jaruzelski adalah tidak memberi kesempatan kepada gerakan politik apapun yang mencoba mengarahkan kepada perubahan sistem politik, ekonomi dan sosial.

Nakhoda baru Uni Soviet, Yu Andropov belum bisa dianggap akan menempuh garis politik yang stabil seperti almarhum Leonid Brezhnev, Pemimpin baru Kremlin itu pada saat ini akan tetap melakukan pelaksanaan "Doktrin Brezhnev" yang ketentuannya bahwa Uni Soviet dan sekutunya berhak melakukan intervensi militer, apabila di antara sekutu ada yang merugikan kepentingan bersama. Rezim Jaruzelski dan partai komunis Polandia tidak akan mampu melepaskan diri dari keterikatan politik dengan Uni Soviet dan Pakta Pertahanan

Warsawa. Konsensus politik merupakan konsekuensi yang akan ditempuh oleh Uni Soviet, seperti kasus penyerbuan ke Hongaria dan Cekcslowakia di masa lalu.

Seberapa jauh Lech Walesa dapat mewujudkan niatnya dan cita-cita solidaritas itu? Nampaknya perjuangan Walesa membutuhkan dukungan dan kekuatan moral rakyat Polandia, dan pasti Walesa sulit mengatasi tantangan tersebut. Keyakinan dan semangat solidaritas masih belum padam dan cukup berakar di masyarakat Polandia, karena pamor Walesa selalu menunjukkan sikap yang tegas dalam memimpin Solidaritas. Di kota Gdansk, ia mengatakan akan berunding dengan pemerintah, tetapi tidak memberikan konsesi politik dengan bertekuk lutut. Sejarah akan mencatat dan membuktikan realitas pergolakan di Polandia. Kini saatnya Lech Walesa berpacu dengan Undang-Undang Darurat 13 Desember 1981. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang, atau logisnya UU tersebut pasti dicabut?

2.4. Dampak Krisis Keamanan Jepang –AS

Masalah yang sangat mendesak dewasa ini adalah peningkatan anggaran pertahanan, yang semakin santer di kalangan masyarakat Jepang, yang berkaitan erat dengan perkembangan konstelasi politik internasional. Pada hahekatnya secara sadar semua bangsa akan selalu turut memikirkan keselamatan dan keamanan negaranya di masa mendatang. Resultantif persaingan kekuatan politik, ekonomi dan militer mempunyai implikasi terhadap kepentingan nasional. Pergeseran kekuatan dari “bipolarisme” ke “multipolarisme” sekurang-kurangnya telah mengancam eksistensi kekuatan Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam konteks tatanan internasional.

Kemenangan Partai Demokrasi Liberal (LDP) bukan berarti suatu kejutan bagi rakyat Jepang. Kemenangan LDP itu menempatkan figur Nakasone sebagai tokoh kontroversial yang menginginkan kenaikan anggaran pertahanan Jepang sebesar tiga persen dari GNP. Tentu dalam hal ini menciptakan suatu situasi terbesar bagi rakyat Jepang yang tidak ingin lagi merasakan keganasan perang. Di mana kabinet Nakasone telah siap bertarung di bawah payung kepercayaan AS dalam rangka meningkatkan anggaran pertahanan militer. Meskipun kenaikan

anggaran tersebut masih relatif di bawah satu persatu dari GNP dan 0.93 persen pasca perang dingin.

Momentumnya seakan-akan mengingatkan kepada kita betapa ampuhnya kekuatan militerisme Jepang dalam Perang Dunia Ke-II. Asumsi lain adalah pengalaman sejarah telah mengajarkan kepada PM Nakasone bahwa kini saatnya Jepang harus tampil di depan sebagai salah satu pusat kekuatan dunia yang memiliki kemampuan untuk menggunakan sasaran politik, ekonomi dan militer yang ditunjang oleh kemahiran teknologi untuk memainkan realitas-realitas sebagai suatu refleksi dari perebutan super power di kawasan dunia, terutama perluasan pengaruh dua-raksasa komunis di kawasan Asia-Asia Tenggara. Alasan utama demi “to promote national security” dan untuk melindungi jalur-jalur strategi ekonomi. Pada saat sekarang belum terpikir oleh Jepang untuk memperluas wilayah kekuasaan, sebagaimana yang pernah dirasakan Filipina selama sepuluh tahun (1931-1941) yang diduduki oleh Jepang.

Politik Luar Negeri Jepang suatu fakta yang diterima secara umum bahwa partai sosialis dan kekuatan-kekuatan lainnya selalu menentang setiap perundingan perdamaian keamanan Jepang-AS. Mereka akan berusaha merintang dan memobilisir kekuatannya untuk mencari titik kelemahan dalam jangka waktu tentu. Hal ini dapat kita ketahui di masa

kekuasaan PM Chou En-Lai dan Menlu Chen Li dari komponen interaksi hubungannya dengan partai komunis Jepang yang ingin melucuti proses keamanan Jepang-AS. Unifikasi Korea Utara-Korea Selatan menjadi masalah yang pelik dengan proses penarikan pasukan AS dari Korea Selatan.

Motivasi seperti itu sebagai suatu skenario terhadap Jepang yang semakin waspada dengan adanya serangan yang lebih besar dari campur-tangan komunis internasional di kawasan Asia. Bilamana rapuh dan longgarnya hubungan keamanan Jepang-AS dalam menjaga keamanan bersama dan perencanaan pertahanan, menyebabkan timbulnya keraguan dan kegelisahan yang terjadi dalam tahun 1970. Krisis keamanan dalam tahun 1970 itu hampir merupakan malapetaka hubungan perdamaian AS-Jepang.

Editorial surat kabar Nihon Keizai Shimbun menulis bahwa tidak hanya pemerintah dan LDP saja, tetapi juga seluruh partai oposisi mengharapkan suatu visi politik global yang tidak terpisahkan dari peranan politik domestik. Transisi kekuasaan dari Ford ke Carter dianggap berjalan sangat lamban. Walaupun demikian, banyak keuntungan yang didapatkan dari sikap politik Amerika Serikat di dalam merumuskan diplomasi nasionalnya. Politik luar negeri Jepang selalu dipengaruhi oleh isu yang berkembang di antara kubu

konservatis dan reformis untuk memenuhi kondisi dan situasi internasional sejak Perang Dunia Ke-II.

Meskipun belum ada suatu argumentasi yang menunjukkan bahwa Jepang akan bangkit kembali mimpinya tentang citra “Asia Timur Raya” dengan petualangan militernya. Lantas apakah Jepang akan selamanya bekerjasama dengan AS? Konsekuensinya tergantung kepada pola pelaksanaan kebijaksanaan luar negeri AS yang seimbang dengan keinginan-keinginan Jepang di masa mendatang. Pengamat, politik di AS berpendapat bahwa adalah lebih baik bagi AS untuk menjaga keamanannya sendiri dan membuang resiko keterlibatan dengan menarik kembali janji-janji pertahanan-keamanan dengan Jepang dan Korea Selatan. Kemudian menarik seluruh kekuatan militernya dari Asia Timur Laut dan memaksakan Jepang untuk mengambil alih tanggung jawab penuh terhadap pertahanannya (Earl Ravenal, “The Nixon Doctrine and Our Asia Commitments”, *Foreign Affairs*).

Konstitusi itu belum merupakan suatu jaminan bagi AS, terutama mengenai pasal sembilan: “bahwa Jepang akan selalu menolak segala bentuk peperangan dan selalu menganut jalan damai”. Konstitusi yang dibuat oleh Jend. Mac Arthur itu bisa “lost control” karena anggapan rakyat Jepang itu merupakan

pikiran AS yang dipaksakan terhadap Jepang. Ketika Jepang bertekuk-lutut terhadap sekutu dan ditimpa oleh malapetaka bom atom di Hiroshima-Nagasaki secara jujur belum mampu menghancurkan moralitas masyarakat Jepang untuk tampil ke muka sebagai raksasa industri dunia.

Harapan satu-satunya yang menjadi tulang-punggung kekuatan AS di kawasan Asia adalah Jepang yang didukung oleh kemampuan teknologi dan daya saing ekonomi sangat memungkinkan prioritas utama terhadap Jepang. Kerangka pemikiran AS telah diramalkan oleh Dean Acheson dalam tahun 1950-an mengenai garis pertahanan AS di Pasifik, perang dingin (1947-1972) dan kekosongan setelah jatuhnya Vietnam Selatan ke tangan komunis. Kedudukan Jepang mempunyai arti secara sporadik telah menggantikan peranan AS, agar supaya dapat menekan ekspansionisme Uni Soviet dan menahan lajunya RRC.

Perdamaian keamanan Jepang-AS suatu faktor yang amat penting sebagai suatu bangsa demokrasi liberal. Perdamaian keamanan Jepang-AS dianggap sangat perlu bagi kemajuan negara demokrasi liberal. Pengakuan ini sangat disangsikan kebenarannya dengan adanya Partai Sosialis Jepang (JSP), Partai Komunis Jepang (JCP) dan partai oposisi lainnya. Partai Komunis Jepang sangat menentang keras setiap

perjanjian perdamaian keamanan Jepang-AS. Partai Komunis ini pernah mendesak pemerintah agar perdamaian selama sepuluh tahun (1960-1970), segera dihapuskan dan mencela apa yang mereka sebut “Imperialisme Amerika”.

Jepang yang tangguh tidak akan segan-segan memperbaiki hubungan dengan Uni Soviet dan RRC. Tetapi dalam jangkauan kecil untuk memindahkan hubungan perdagangan dan keamanan dengan AS ke salah satu negara komunis Jepang belum mampu melepaskan keterikatan ekonominya dengan dunia Barat terutama AS. Ketergantungan ekonomi-politik masih tergantung kepada seberapa jauh pandangan Jepang untuk menata kembali hubungannya apabila adanya kemacetan perekonomiannya yang dilakukan sekarang ini dengan resesi ekonomi dunia. Pembatasan-pembatasan ekspor terhadap Jepang memutuskan jalur terpenting supply minyak dan menghancurkan dominasi marketing Jepang di pasaran Internasional. Nampaknya akan terjadi perang ekonomi terbuka yang selalu diperingatkan oleh negara-negara Eropa Barat terhadap AS untuk menghindari ancaman perang ekonomi dengan Jepang. Jukukan “economic animal” bukanlah suatu slogan yang tidak punya arti sama sekali.

Jepang yang ambivalensi terhadap pengendalian diri untuk menghindari perang ekonomi terbuka dengan AS dan

Eropa Barat. Kebangkitan Jepang sebagai raksasa industri dan memiliki sarana pengaruh ekonominya di negara-negara sedang berkembang merupakan suatu kekuasaan politik bahkan Jepang di hari esok bukan lagi sekedar “malaikat penyelamat” akan tetapi mempunyai instrumen untuk menyelamatkan kepentingan nasional dari tekanan sesuatu negara dan kekautan ekonominya disalurkan yang bertumpu di bidang militerisasi. Jepang yang nasionalistis tidak ingin kehilangan muka kedua kalinya. Manipulasi sejarah di masa modern berani dilakukan Jepang demi harga diri dan prestasi di mata dunia. Penulis buku “Japan As Number One, Lesson for America”, Prof. Ezra E. Vogel mengatakan bahwa Jepang bukan sukses karena kebudayaannya yang unik, tetapi lantaran keseriusan berpikir dan mencari sarana yang paling produktif buat negaranya.

Pers Jepang harus memikul tanggung jawab yang lebih besar terhadap permasalahan negaranya. Mayoritas orang Jepang mengakui bahwa kerjasama keamanan dan perdamaian Jepang-AS sangatlah penting untuk melindungi kelangsungan negara demokrasi liberal.

2.5. Supremasi AS dan Pelajaran Bagi Irak

Tekanan politik dan militer yang akan dilancarkan oleh Amerika Serikat dengan melibatkan sekutu dekatnya untuk

mendukung serangan militer dalam upaya menghancurkan kekuatan mesin perang dan menghukum Irak agar tunduk di bawah bendera resolusi DK-PBB.

Sikap keras Presiden Saddam Hussein yang selalu menantang kemauan AS sama saja dengan meneguk obat “Zaddam” (obat pahit dari Timur Tengah) yang rasanya tidak enak untuk diminum. Selama kepemimpinan Saddam Hussein yang bersikap revolusioner, maka negara Irak tidak akan pernah diberi kesempatan untuk membela diri, karena gaya kepemimpinan Saddam itu dianggap sangat membahayakan kepentingan dan kredibilitas politik AS di Timur Tengah.

Nasib serupa pernah juga dialami oleh Presiden Fidel Castro dari Kuba dengan politik embargo ekonomi dan perdagangan dari krisis penempatan persenjataan rudal yang diarahkan kepada Amerika Serikat oleh Uni Soviet. Kemudian menghasilkan suatu tawaran ke meja perundingan antara Uni Soviet dan AS.

Persoalannya, Presiden J.P. Kennedy tidak mau mengambil resiko untuk menjadikan krisis Rudal tahun 1962 menjadi ajang pertarungan dan konfrontasi langsung AS-US pada saat itu. Langkah Amerika untuk tidak terlibat konflik dengan Uni Soviet dapat dikatakan sebagai “Zero Sum Games”

dari cara diplomasi dan formulasi perumusan kebijakan luar negeri AS mengatasi masalah tersebut.

Kemenangan Bill Clinton dalam Pemilu AS sebagai salah satu bukti kuat bahwa masyarakat Amerika masih tetap percaya, menginginkan suatu perdamaian dunia yang lebih langgeng dan fleksibel. Kemenangan dalam pemilu AS merupakan refleksi dari keinginan seorang dari demokrat bahwa masyarakat Amerika masih tetap mewujudkan kepentingan yang lebih nyata dan konkret di luar geografis Amerika.

Figur seorang aktor politik Amerika tidak dapat dilepaskan dari kepentingan nasional AS. Kepercayaan terhadap kemampuan dan kebijakan untuk mampu melakukan hubungan secara lebih baik dan mendasar dalam konteks dunia internasional dengan semua negara berdaulat secara demokratis.

Selama ini hubungan internasional masih tetap didominasi oleh negara kuat terhadap negara yang lemah. Demokrasi secara ekonomi, politik dan pertahanan, sehingga negara-negara tersebut selamanya tidak berdaya untuk melakukan pembelaan diri. Terlalu kuatnya dominasi negara-negara maju, terutama AS, Inggris dan negara-negara Eropa bARAT lainnya melalui lembaga-lembaga internasional seperti

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mahkamah Internasional dan lembaga-lembaga ekonomi (WTO, MEE dan IMF), organisasi kawasan regional serta lembaga-lembaga politik, pakta pertahanan militer yang menunjukkan kekuatan bagi negara-negara maju dan Amerika Serikat masih tetap menjadi pemimpin utamanya.

Kepincangan dalam hubungan internasional yang semakin kompleks menjelang berakhirnya abad ke-20 dan semakin rumit untuk mewujudkan suatu tatanan dunia baru yang dicita-citakan lebih adil dan beradap masih jauh dari jangkauan kenyataan ini. Persoalan yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin dan kawasan Asia-Pasifik dari berbagai konflik kepentingan dan masih terjadi campur tangan negara lain.

2.5.1 Strategi dan Supremasi AS

Presiden Bill Clinton dalam gaya kepemimpinan kedua kalinya akan bersikap lebih realistis atas perkembangan tatanan dunia. Amerika Serikat sebagai negara yang paling banyak berperan dalam konteks hubungan internasional, baik hubungan bilateral, multilateral dan hubungan yang bersifat global meliputi aspek ekonomi, politik dan militer dalam menghadapi abad ke-21.

Tantangan yang paling berat adalah bagaimana negara-negara maju melakukan keseimbangan hubungan antar negara-negara regional dan global, terutama terhadap demokratisasi hubungan internasional secara lebih bijak dan arif untuk menyelesaikan dan meredam berbagai persoalan kepentingan konflik regional dan internasional.

Orientasi studi hubungan internasional dan sistem internasional yang berpusat di Eropa mengalami transformasi dari beberapa perubahan yang mendasar. Pertama, perubahan yang terjadi dalam kapasitas persaingan ideologi politik makin ditinggalkan, sehingga ajang persaingan dan konflik antar bangsa, multi-etnik dan tindakan dengan cara-cara kekerasan dalam bentuk “Balance of Terror” sedini mungkin harus dapat dihindarkan.

Kedua, terlihatnya persaingan “Domestic Constraint dan Eksternal” di dalam upaya mewujudkan kekuatan ekonomi nasional dan regional menjadi indikator yang sangat strategis bagi kepentingan nasional negara-negara maju.

Di sisi lain, bahwa negara-negara maju (G-7) masih tetap mempunyai keinginan untuk menguasai permainan (penerapan Games of Theory) dalam percaturan internasional dan ketergantungan negara-negara Dunia Ketiga yang masih

melekat kuat mengharapkan terhadap bantuan donatur dari negara-negara maju.

Ketiga, dalam perlombaan persenjataan nuklir semakin sulit dikendalikan tanpa dapat menghindarkan dari campur tangan AS dan negara-negara Eropa Barat. Walaupun lembaga Atom Internasional telah bekerja keras untuk mengurangi peredaan ketegangan (*detente*), “*deterrence*” dalam upaya pengendalian negara-negara yang memiliki, menyimpan dan sedang membangun reaktor nuklir untuk kepentingan pertahanan, kekuatan militer dan kapasitas melakukan potensi nuklirnya dengan maksud-maksud yang tidak jelas.

Suatu persepsi apabila ada ancaman serius yang datang dari negara lain, maka ancaman itu harus dihentikan dan dibayar dengan serangan militer, walaupun tidak lagi memperhitungkan dari aspek masyarakat internasional dan kemanusiaan.

Dalam krisis antara Irak-PBB dan Irak-AS, Presiden Bill Clinton masih mau memberikan konsesi dan kesempatan kepada Irak untuk mematuhi semua resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB.

Kompensasi dari terobosan itu, AS memberikan langkah baru, yaitu dengan mengajukan “*Proposal Washington*” untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Dalam

krisis ini, Irak hanya mau melonggarkan keinginan Amerika dengan mencabut embargo ekonomi dan perdagangan bukan untuk menyingkirkan secara paksa agar Saddam Hussein turun dari panggung kekuasaan politik di Irak.

Para “State Actors” tidak akan mau membeberkan atau memberikan data-data senjata-senjata nuklir strategis yang membahayakan umat manusia. Rusia di bawah kepemimpinan Boris Yeltsin masih memegang kunci dari tombol pengamanan senjata-senjata nuklir era Uni Soviet yang merupakan asset negara yang sangat strategis dan paling menakutkan bagi negara-negara Barat terutama AS.

Rusia tidak dapat disamakan dengan Irak yang tidak mau masuk dalam Sphere of Influence, Amerika sebagai pilar pendukung utama berkaitan dengan kedekatan negara-negara kaya minyak yang mendapat jaminan keamanan. Irak di bawah kekuasaan Saddam Hussein ingin mencoba merubah pola perdamaian menjadi pola konflik teritorial.

Keberhasilan sementara dari pembatasan senjata-senjata nuklir yang telah dilakukan oleh pertemuan tingkat tinggi adalah dengan Non-Proliferation Treaty (NPT) yang ditandatangani oleh Presiden Bill Clinton di Markas Besar PBB sebagai langkah untuk mengendalikan percobaan uji-coba nuklir dan pembuatan senjata-senjata penghancur massal.

Masalah ini persenjataan nuklir dan kesenjangan antara negara kuat dan negara lemah masih menjadi misteri bagi kepentingan perdamaian dunia, Meskipun tidak seratus persen, negara-negara yang mempunyai reaktor nuklir akan memberikan konsesi dan kepatuhan terhadap tekanan Lembaga Atom Internasional serta ancaman dari AS.

Perang Teluk telah memberikan banyak mewarnai dan pengalaman bagi mesin perang Amerika dan pengambilan keputusan tingkat tinggi untuk tetap menaruh curiga terhadap persenjataan nuklir Irak yang masih terselubung menjadi tujuan utama untuk melakukan pemusnahan.

Dalam hubungan dengan persenjataan nuklir, lebih banyak perhatian dari negara-negara maju adalah Amerika Serikat yang sering memberikan sanksi, bargaining position (posisi tawar menawar), tekanan militer, embargo ekonomi dan perdagangan. Anti klimaks adalah dengan kekuatan intervensi militer. Penggunaan kekuatan militer AS sebagai instrumen politik luar negeri dari kemampuan dan kekuatan teknologi persenjataan kepada dunia bahwa bukan hanya hukuman bagi Irak.

Tetapi juga dengan “show force” serangan militer AS itu telah meningkatkan ketegangan politik, pemanasan situasi, chaos bagi masyarakat di sekitar Teluk Persia dan kawasan

Timur Tengah dari “military might” (ketakutan serangan militer) serta memancing konflik baru.

Penerapan *Bylling Strategy* dalam artian untuk mengurangi kekuatan militer negara tersebut sehingga terjadinya unbalancer, “zero option” dan membatasi daya kemampuan teknologi militer untuk melakukan perluasan wilayah pengaruh dengan cara-cara “balance of terror” atau intervensi militer ke negara-negara tetangga dengan menjual dan menimbun persenjataan sangat berbahaya.

Kepercayaan masyarakat dunia bahwa Amerika Serikat telah membuktikan keunggulannya kepada dunia untuk menghentikan keterlibatan dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan menyelesaikan krisis Balkan.

Keterlibatan dalam perang Korea dan kekalahan dalam perang di Vietnam dan perang di Teluk bukan hanya sebagai perjudian politik yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan cara yang paling ampuh adalah menggunakan serangan militer.

Bagi AS, hanya ada satu jalan jika Irak melakukan perlawanan, maka tidak ada pilihan yang serius dengan solusi diplomasi untuk tunduk dan patut pada resolusi DK-PBB, hanya dengan cara menghentikan tantangan tersebut melalui mesin perang.

2.5.2 Era Reformasi DK-PBB

Sementara itu, dapat kita lihat kembali Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangas (PBB) Boutros Ghali yang dicalonkan menjadi Sekretaris Jenderal PBB untuk masa jabatan kedua mendapat tantangan keras dari pihak Amerika Serikat. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Bill Clinton menunjukkan sikap tegas untuk tidak lagi mendukung Boutros Ghali menjadi Sekjen PBB.

AS telah melakukan hak vetonya bilamana nama Boutros sebagai calon, kandidat Sekjen PBB, Dewan Keamanan PBB akan terus mengeluarkan dokumen resolusinya dengan berbagai sanksi untuk membenarkan dalih hukuman selama Irak mau melakukan kompromi dan tetap memberikan kesempatan lagi bagi Tim UNSCOM PBB untuk kembali ke Irak.

Tiada gading yang tidak retak, bahwa Washington tidak lagi menginginkan kembali figur Boutros sebagai Sekjen PBB, di mana banyak masalah yang dihadapi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak sejalan dengan keinginan pemerintah AS, baik secara politik dan ekonomi. Keinginan Amerika akhirnya terwujud dengan terpilihnya Kofi Annan sebagai Sekjen PBB baru menggantikan posisi Boutros.

Amerika telah banyak menanggung beban anggaran dan biaya untuk kepentingan PBB. Namun AS belakangan ini merasakan sikap dan cara Boutros Ghali tidak lagi menguntungkan posisi bagi kepentingan AS di dalam hubungan internasional. Janji Boutros Ghali untuk melakukan restrukturisasi, reformasi PBB dan demokratisasi hubungan internasional tidak pernah berhasil dalam penilaian AS, sehingga AS bersikap tegas untuk tidak lagi mendukung figur Boutros untuk menjadi pemimpin dari Lembaga PBB untuk kedua kalinya. Sikap AS bukanlah hal yang mengejutkan bagi dunia, karena pertimbangan politis dan ekonomis yang mendorong menjadi pilihan utama untuk tidak lagi mendukung figur Boutros Ghali.

2.5.3 Pelajaran dan Perubahan Bagi Irak

Motif yang paling utama Amerika untuk tetap melakukan tekanan atau serangan militer tidak hanya karena terusik oleh pengusiran warga negara AS dalam Tim UNSCOM PBB, melainkan sikap arogan yang diperlihatkan oleh Saddam untuk menentang kebijakan AS di Timur Tengah, di sisi lain, sikap dan ambisi Saddam ini sangat tidak menguntungkan posisi dan menyulitkan keberadaan AS di

dalam pengaturan hubungan yang lebih leluasa di kawasan tersebut.

Sejak berakhirnya perang Teluk, negara-negara seperti Rusia, RRC dan Perancis tidak sepenuhnya mendukung kebijakan Amerika dalam melakukan tindakan militer terhadap Irak. Amerika Serikat belum berhasil secara politik dan ekonomi untuk merangkul dan menarik Irak keluar dari kemelut yang dihadapi oleh embargo ekonomi dan perdagangan selama enam tahun telah menghancurkan sistem perekonomian Irak.

Perang Irak-Iran selama delapan tahun, salah satu kegagalan AS untuk membantu meraup keuntungan strategi yang diperoleh dari posisi geopolitik Irak, belum berhasil memberikan dukungan kontribusi tersebut.

Negara seperti Yordania dan negara-negara Arab lainnya yang paling dianggap sangat moderat bercampur konservatif dekat dengan Amerika. Dalam masalah ini, kita lihat bahwa terlalu kuatnya peranan dan pengaruh presiden Saddam yang didominasi oleh Partai Baath. Kekuatan ideologi partai dan dukungan kekuatan pasukan elit Irak telah membuat Saddam lebih percaya diri dan menunjukkan keberanian menantang serangan militer AS, menyebabkan kerugian dan membantaian manusia yang tidak berdosa.

Presiden Saddam Hussein tidak pernah mau belajar dari pengalaman sejarah. Sehingga pelajaran bagi Irak yang harus dibayar adalah menerima serangan mesin perang AS. Amerika tidak akan menerapkan “Realpolitik” terhadap Irak, bukanlah tandingan suprioritas Amerika.

BAB III

KEMELUT POLITIK DI FILIPINA

3.1 Pendahuluan

Rencana kunjungan presiden Amerika Serikat Ronald Reagan ketiga negara ASEAN yaitu Filipina, Indonesia dan Muangthai menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap ASEAN karena ketiga negara-negara itu dapat dikatakan sebagai suatu "medium power" yang perlu diperhitungkan oleh Amerika Serikat sebab masing-masing mempunyai kemauan dan karakteristik yang unik dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya. Perhatian terhadap Filipina teristimewa karena Amerika Serikat mempunyai hubungan yang erat dengan penempatan dua pangkalan militernya di sana. Amat disayangkan kunjungan tersebut batal karena pihak Amerika Serikat khawatir akan bahaya yang mengancam keselamatan presidennya terutama setelah melihat Aquino Jr. salah seorang pembela demokrasi dan kerukunan nasional, yang didambakan oleh rakyat Fillpina harus menemui ajalnya di hadapan massa dengan cara kekerasan politik.

Tulisan ini mencoba menyoroti kompleksitas yang dihadapi oleh Regim Marcos yang berusaha mempertahankan dinasti politiknya yang sedang menghadapi tantangan dalam

negerinya sendiri seperti pembunuhan Aquino Jr, masalah Undang-Undang Darurat Militer dan serta persoalan luar negerinya yang menyangkut masalah pangkalan militer AS di Filipina maupun masalah sengketa Filipina dengan Malaysia mengenai Sabah. Langkah-langkah apa yang diambil oleh Marcos dalam rangka menyelamatkan dinastinya serta tantangan-tantangan yang ditujukan kepadanya serta kemungkinan-kemungkinan perkembangan selanjutnya di masa depan, merupakan masalah-masalah yang akan dibahas dalam karangan ini.

3.2 Tragedi Manila

Kematian tokoh oposisi yang disegani senator Benigno Aquino Jr. secara tragis dan dramatis merupakan suatu pelajaran yang pahit bagi rakyat Filipina. Persoalan yang paling utama adalah tindakan kekerasan dalam kasus pembunuhan yang sangat kontroversial itu. Nampaknya kedatangan Aquino ke tanah airnya mengundang suatu kekalutan politik yang ditakuti oleh regim Marcos karena dampaknya dapat merembes ke pusat-pusat kekuatan politik Marcos yang sudah "berakar" selama 18 tahun. Oleh karena itu orang dengan mudah menduga bahwa kematian Aquino tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab Marcos sebagai orang yang paling berkuasa

dan ia dalam kasus ini tidak dapat "cuci tangan" dengan pembentukan komisi penyelidik yang dianggap pro pemerintah. Meskipun kita belum dapat menjatuhkan vonis terhadap siapa-siapa yang menjadi dalang dalam pembunuhan ini, namun kita melihat bahwa komisi yang dibentuknya itu sebagai sebuah episode yang skenarionya sangat kebal terhadap hukum. Meskipun jaringan episodenya sangat rapi, namun orang sangat mudah menebak keterlibatan Marcos dalam menyingkirkan saingan utamanya.

Dinamika demokrasi dan hak-hak azasi manusia yang dicanangkan oleh regim Marcos hanyalah sebagai payung pelindung dalam menjalankan pemerintahan yang semakin terjepit. Jepitan pertama dari kaum oposisi yang semakin kuat setelah pembunuhan Aquino dan dari golongan Moro, Huk-balahap (komunis), yang merupakan musuh buyutan yang setiap saat selalu mengancam kedudukannya. Dimensi kedua tantangan yang timbul dari sesama anggota ASEAN sesuai dengan Deklarasi Bangkok bahwa semua pangkalan militer hanya bersifat sementara.

Tetapi praktisnya dapat kita katakan bahwa pangkalan udara di Clark dan pangkalan angkatan laut di Teluk Subic, memberikan keuntungan bagi regim Marcos. Menurut perhitungan strategis kedua posisi pangkalan itu untuk sementara

waktu dapat menggantikan kedudukan pangkalan Da Nang dan Cam Ranh yang jatuh ke tangan komunis. Sementara itu bantuan finansial AS sebagai imbalan terhadap 2 pangkalan itu sangat melonggarkan beban perekonomian pemerintah Marcos. Keuntungan yang diperoleh ini nampaknya tetap dipertahankan, meskipun bertentangan dengan prinsip Deklarasi Bangkok.

Persoalan yang paling mendasar adalah seberapa jauh kemampuan regim Marcos mampu mempertahankan "prestige"-nya di mata rakyat dan sanggup membendung estafet dari kaum oposisi yang menentang gaya kepemimpinannya. Pada dasarnya langkah yang ditempuh oleh Marcos dalam rangka menjaga "status quo" tidak lain adalah menjaga loyalitas pihak militer, dan agar jaminan yang diberikan kepada presiden Marcos tidak menimbulkan suatu krisis baru. Tetapi jaminan dan loyalitas militer terhadap Marcos mengalami pasang surut dan kompleksitas situasi memaksakan kristalisasi politik yang paling rumit. Walaupun kepercayaan itu terpelihara dengan baik, namun kesempatan pihak sipil untuk tetap sebagai salah satu visi baru dari sistem politik yang berlaku di Filipina, pasti mengalami tantangan yang berat. Sedangkan kemungkinan pihak oposisi baik yang liberal maupun yang konservatif, untuk mewujudkan pemerintahan

sipil akan mengalami proses yang berkepanjangan. Meskipun demikian kita harus ingat adagium yang terkenal bahwa lebih mudah prang merebut kekuasaan daripada mempertahankan kekuasaan. Pihak yang berkuasa cenderung untuk memakai kekuatan sebagai resep yang ampuh untuk mengobati kemelut yang dihadapi, sedangkan kekuatan atau kekerasan itu tidak selamanya menguntungkan. Shah Reza Pahlavi tidak pernah membayangkan bahwa seorang ulama seperti Khoumeni dapat menghancurkan "akar" kekuasaannya meskipun dia dipersenjatai dengan peralatan modern atau super modern. Begitu Pula Hitler, Somoza dan Napoleon dalam sejarah berhasil disingkirkan melalui proses evolusi atau revolusi.

3.3 Undang-Undang Darurat Militer

Kenyataan bahwa Filipina sudah berhasil melaksanakan pemilihan umum beberapa kali memberikan kesan bagi sebagian pengamat politik bahwa berbeda dengan negara-negara berkembang lainnya, Filipina nampaknya berhasil menumbuhkan supremasi demokrasi yang diimpornya dari Amerika yang tercakup olehnya, dan semua wilayah lain yang terbilang ke dalam Filipina menurut hak sejarah dan hukum".

Sengketa Indonesia – Malaysia bertalian dengan gagasan "Malaysia" dan klaim Filipina atas Sabah itu telah

mempertemukan ke 3 negara yang menginginkan penyelesaian sengketa-sengketa itu di meja perundingan. Akhirnya konferensi para Menlu ketiga negara itu telah menghasilkan 3 dokumen yaitu :

1. Manila Accord (Persetujuan Manila) yang meliputi laporan dan rekomendasi-rekomendasi yang disetujui oleh kepala pemerintah tiga negara.
2. Manila Declaration yang memuat prinsip-prinsip dasar bagi pembentukan Maphilindo.
3. Joint Statement (Pernyataan Bersama) berisikan semua keputusan-keputusan yang telah diambil oleh ketiga kepala pemerintah mengenai penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi bersama.

3.4 Post-Marcos?

Salah seorang tokoh oposisi Jose Diokno memperingatkan Ferdinand Marcos bahwa era kepemimpinannya telah mengalami kelumpuhan dan ada kemungkinan terjadinya perebutan kekuasaan oleh kelompok militer dalam jangka waktu pendek. Sebab tekanan politik yang bertubi-tubi terhadap Marcos semakin menyulitkan langkah-langkah kebijaksanaannya untuk membangkitkan rasa kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya. Arus tekanan

pihak oposisi itu memperburuk situasi bagi Marcos dalam usaha membendung tuntutan-tuntutan bagi pergeseran kekuasaannya.

Hal ini juga ditegaskan oleh bekas presiden Macapagal bahwa pada suatu ketika akan tumbuh pemerintahan dengan sistem authoritarian di bawah kekuasaan militer. Sementara itu Marcos telah menunjuk penggantinya P.M. Cessar Virata apabila ia tidak dapat lagi menjalankan tugasnya sebagai kepala negara Filipina. Keputusan ini juga menimbulkan masalah karena garis pergeseran kekuasaan itu dapat ditafsirkan meremehkan kehendak konstitusi dan sifatnya menjerus kepada pertentangan yang berlarut-larut. Walaupun dengan demikian ada persiapan komisi eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan apabila Marcos tidak mampu lagi menjalankan tugasnya, namun penyerahan kekuasaan kepada Virata itu belum sepenuhnya menyelesaikan kemelut politik yang melanda Filipina, di mana masih ada kesempatan kelompok militer akan mengambil alih kekuasaan secara nyata.

Komitmen politiknya itu bukan memperlunak konfrontasi dengan pihak oposisi, akan tetapi malahan membuka peluang terjadinya konflik internal yang lebih serius karena pergantian itu belum jelas dan dianggap menyimpang jauh dari konstitusi dan berlawanan dengan demokrasi yang

berlaku di Filipina. Kalangan umum berpendapat bahwa P.M. Cesar Virata sendiri bukan merupakan seorang politikus kawakan yang mampu menjembatani fusi antara sipil-militer yang diinginkan oleh masyarakat. Virata sebagai teknokrat berhasil dalam usaha mengembangkan strategi ekonomi tapi ia bukanlah figur yang menampilkan kualitas kepemimpinan yang mampu untuk meredakan ketegangan.

Beban yang paling berat adalah tiga bulan setelah kematian tokoh oposisi Aquino yang menimbulkan ketegangan-ketegangan politik berupa demonstrasi-demonstrasi, ekonomi Filipina mengalami guncangan yang paling buruk dalam sejarah kekuasaan Marcos. Kekacauan yang melanda perekonomian Filipina menyebabkan modal sebesar 600 juta dollar dilarikan ke luar negeri dan defisit neraca pembayaran 1,5 milyar dollar. Untuk menyelamatkan ekonomi tersebut, pemerintah Filipina telah melaksanakan tindakan devaluasi uang peso dengan 21,7 persen. Namun tindakan ini hanya mampu untuk menghindari krisis ekonomi yang berada di ambang kehancuran tapi tak akan mampu membendung inflasi yang diperkirakan akan mencapai 20% dalam tahun 1984. Kemudian hutang luar negeri sudah mendekati 20 milyar dollar. Krisis ekonomi yang parah ini akan menghantui dan mengancam kedudukan Marcos, yang mengakibatkan merosotnya

kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinannya yang sudah berlangsung 18 tahun lamanya. Namun di era sekarang anak Marcos menjadi presiden menggantikan Duarte.

BAB IV

PEREKONOMIAN INDONESIA: KRISIS DAN STRATEGI ALTERNATIF

4.1. Pendahuluan

Pembahasan buku ini yang ditulis oleh tiga orang dosen fakultas ekonomi Universitas Nasional merupakan suatu refleksi dari perkembangan perekonomian Indonesia, ketika terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan munculnya berbagai multidimensi krisis berawal pada pertengahan tahun 1997. Multidimensi krisis telah melahirkan berbagai perubahan politik maupun ekonomi, yang pada akhirnya terjadi transisi kekuasaan dari Soeharto ke pemerintahan BJ Habibie.

Sebagai akibat dari pergeseran kekuasaan politik yang sentralistik itu, mengakibatkan hancurnya kekuatan fundamental ekonomi yang telah dibangun puluhan tahun, sejak masuknya modal asing dan realisasi kerjasama internasional dengan di bentuk Inter Government Group on Indonesia (IGGI) pada tahun 1967 yang notabene adalah para ekonom yang merancang pembangunan ekonomi Indonesia.

Untuk itu, ketiga penulis ini mencoba menggambarkan mengenai persoalan pembangunan perekonomian Indonesia

yang dilanda krisis, yang tercakup dalam tujuh bab pembahasan yang dimulai dari krisis sampai ke orientasi baru strategi ekonomi.

4.2 Fundamental Ekonomi Indonesia

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia menjelang terjadinya krisis moneter pada bulan Juni 1997 tidaklah sekuat seperti yang dilaporkan oleh Bank Dunia pada setiap kali sidang IGGI atau CGI dan juga pandangan sebagian pakar ekonomi pada saat sebelum krisis. Lemahnya fundamental ekonomi Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Pembangunan ekonomi masa Orde Baru telah mengubah struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi ini terlihat dari perubahan komposisi sumbangan sektor-sektor ekonomi terhadap PDB. Semula sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar terhadap PDB, kemudian digantikan oleh sektor industri pengolahan. Namun demikian, sektor industri yang dikembangkan pemerintah Orde Baru adalah industri substitusi impor, yang mana kebutuhan akan bahan baku/penolong dipasok dari negara lain (*outward-looking*) dan orientasi pemasaran produk-produk hasil industri pada pasar domestik (*inward-*

looking), sehingga sektor industri pengolahan menjadi penghambur devisa terbesar, yang semula hendak diandalkan sebagai penghasil devisa.

2. Strategi industrialisasi substitusi impor (*import-substitution industrialization strategy*) yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru terbukti tidak mampu membawa Perekonomian Indonesia tinggal landas (*take-off*) serta mempersempit kesenjangan dengan negara-negara maju, malah kemerosotan. Hal ini terjadi karena industri substitusi impor yang dikembangkan sangat tergantung pada input impor. Akibat dari ketergantungan yang sangat tinggi terhadap input impor ini adalah terjadinya defisit transaksi berjalan yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Disamping itu industri substitusi_ impor ini juga telah membuat perekonomian Indonesia Indonesia menjadi rentan terhadap perubahan kurs mata uang dan tingkat suku bunga mancanegara.
3. Neraca pembayaran selama enam Pelita terus-menerus dalam keadaan surplus. Akan tetapi keadaan ini bukan bersumber dari surplus transaksi berjalan melainkan dari arus modal (*capital inflows*) yang terdiri dari investasi langsung, investasi portfolio, dan pinjaman luar negeri. Dari ketiga komponen capital inflows tersebut, kontribusi

terbesar terhadap surplus neraca pembayaran adalah utang luar negeri. Transaksi berjalan mengalami defisit sepanjang pelaksanaan Pelita oleh Pemerintahan Orde Baru. Defisit transaksi berjalan ini bersumber dari defisit neraca perdagangan barang-barang nonmigas dan defisit neraca jasa, yang mana defisit neraca jasa lebih besar dari surplus neraca barang. Sumbangan terbesar dari defisit neraca jasa adalah pembayaran bunga atas pinjaman luar negeri, jasa angkutan dan asuransi barang-barang impor, serta jasa konsultan asing.

4. Pinjaman luar negeri dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama oleh pihak swasta. Disadari bahwa pinjaman luar negeri merupakan salah satu alternatif pembiayaan pembangunan ataupun kegiatan ekonomi yang sulit dihindari pada suatu kondisi ekonomi tertentu. Namun demikian, pinjaman luar negeri ini akan menjadi ancaman.

4.3 Strategi adalah Set Alternatif

1. Semakin terintegrasinya pasar keuangan domestik dengan pasar keuangan internasional serta adanya proses recycling of petro dollars dari negara-negara maju telah memudahkan pemerintah dan para pengusaha domestik

memperoleh pinjaman luar negeri, sehingga akumulasi utang luar negeri meningkat dengan cepat.

2. Strategi pembangunan yang bertumpu pada industri substitusi impor telah membuat transaksi berjalan menjadi defisit. Semakin berkembang industri substitusi impor membuat defisit transaksi berjalan semakin membesar pula. Untuk menjaga dan mempertahankan surplus Neraca Pembayaran terpaksa utang luar negeri pun diperbesar, sehingga jika industri substitusi impor terus berkembang maka utang luar negeripun meningkat. Hal ini terjadi karena peningkatan utang luar negeri (*debt creating*) tidak diimbangi dengan kenaikan ekspor secara memadai. Hal ini terjadi karena industri substitusi impor terlalu tergantung pada input impor sedangkan produk yang dihasilkan lebih berorientasi pada pasar domestik. Akibatnya, Indonesia tidak mempunyai kapasitas membayar kembali utang luar negeri, yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan ekonomi nasional.
3. Anggapan bahwa defisit transaksi berjalan tidak menimbulkan masalah karena dapat didanai dengan capital inflows akan menimbulkan sikap kurang hati-hatian terhadap kemungkinan adanya bahaya yang ditimbulkan oleh capital inflows.

4. Krisis utang luar negeri mempunyai implikasi yang cukup luas baik yang berkaitan dengan sektor riil, moneter, dan perbankan, maupun keuangan negara.
5. Ketergantungan pada pinjaman luar negeri yang tidak diikuti dengan peningkatan kinerja ekspor akan membawa perekonomian Indonesia berada pada titik rawan, yang pada gilirannya akan menimbulkan malapetaka besar tidak hanya terhadap perekonomian tetapi juga terhadap kehidupan sosial dan politik.

4.4 Krisis Moneter Internasional

1. Lemahnya fundamental ekonomi, baik mikro maupun makro, membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap contagion effect, sehingga gejolak nilai tukar bath Thailand dengan menulari nilai tukar rupiah atas mata uang asing terutama dollar AS. Dunia usaha membutuhkan dollar AS untuk memenuhi kewajiban luar negeri yang segera jatuh tempo, mendorong mereka memburu dollar AS sehingga permintaan dollar meningkat dan kurs rupiah pun mulai tertekan. Tekanan terhadap kurs rupiah diperkuat oleh psiko-sosial masyarakat serta faktor-faktor non-ekonomi lainnya nilai tukar rupiah menekan pemerintah melepaskan rentang intervensi dan beralih pada sistem free float ex-

change rate. Pelepasan rentang intervensi nilai tukar rupiah semakin bergejolak dan terpuruk pada tingkat yang relatif sangat rendah. Terjadilah krisis moneter.

2. Depresiasi nilai tukar dan kegagalan pihak swasta memperoleh penjadwalan ulang (roll-over) utang luar negeri menimbulkan krisis utang luar negeri, yang pada gilirannya memperberat krisis moneter. Terjadilah spiral krisis moneter dan krisis utang.
3. Likuidasi 16 Bank yang melanggar legal lending limit tanpa jaminan atas tabungan para nasabah, telah membuat masyarakat panik dan terjadilah rush pada BUSN. Perkembangan lebih lanjut, sejumlah besar BUSN mengalami kesulitan likuiditas perbankan dalam jumlah yang cukup besar. Di samping itu, kondisi solvabilitas dan rentabilitas perbankan juga terancam sebab telah terjadi negative spread. Keadaan ini diperburuk oleh menurunnya kredibilitas bank nasional yang tercermin dari penolakan L/C oleh Bank-bank Internasional dan terjadilah krisis perbankan. Penanggulangan krisis perbankan berjalan lambat sehingga menimbulkan ketidakpastian yang kemudian memperberat krisis moneter. Perkembangan berikutnya krisis moneter memperberat krisis perbankan sehingga fungsi intermediasi bank nyaris mandek.

4. Krisis moneter, krisis utang, dan krisis perbankan membuat kinerja perekonomian memburuk. Buruknya peragaan (*performance*) ekonomi nasional ini terlihat dari resesi ekonomi sampai pada tingkat yang sangat rendah (-13,7 persen), tingkat inflasi yang sangat tinggi, (77.6 persen), tingkat pengangguran meningkat, jumlah keluarga miskin bertambah, dan defisit neraca pembayaran. Semua keadaan ini mencerminkan bahwa krisis ekonomi Indonesia adalah krisis multidimensi.

4.5 Utang Luar Negeri

1. Penyelesaian utang luar negeri pemerintah maupun swasta dilakukan melalui badan-badan yang dibentuk khusus untuk itu. Badan-badan tersebut adalah Paris Club, Prakarsa Jakarta, dan IDRA. Namun, penyelesaian utang luar negeri berjalan lambat, terutama utang swasta, yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara badan-badan yang dibentuk tersebut, serta kurang kooperatifnya para debitur. Penyelesaian utang luar negeri yang dilaksanakan saat ini semata-mata merupakan penyelesaian yang bersifat sementara karena yang dilakukan hanyalah penundaan utang dan bukan program pembayaran utang secara tuntas, dalam arti secara bertahap membayar utang luar negeri

sampai saldonya menjadi nol. Ada memang debitur yang berhasil menuntaskan utang luar negerinya, akan tetapi cara yang ditempuh adalah mengalihkan utang menjadi penyertaan modal.

2. Program penyelesaian utang luar negeri sampai tuntas hanya dapat terlaksana apabila strategi industrialisasi substitusi impor (*impor-substitution industrialization strategy*) yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru realistis, atas prinsip maximization of economic value dengan prosedur dan tanggung jawab yang jelas pada pengambil keputusan. Ketentuan ini mengikat dan dimasyarakatkan kepada semua unsur yang terlibat dalam kawasan keuangan negara.
3. Mengatur kembali kerangka kelembagaan penanganan penyelesaian hutang swasta (yang sekarang terdiri atas unit-unit yang terpisah tanpa koordinasi), sehingga terdapat suatu sistem kelembagaan yang terintegrasi di bawah suatu komando puncak. Sistem ini mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan semua bank dan BPPN selaku kreditur serta lembaga-lembaga fasilitator. Komando puncak ini juga berwenang, bertanggung jawab dan memiliki unit organisasi untuk mengambil kebijakan serta langkah-langkah tersebut di atas.

4.6 Restrukturisasi dan Rekapitalisasi

1. Restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan berjalan lambat sehingga fungsi intermediasi terganggu. Akibatnya sektor riil kurang bisa bergerak karena kurangnya dukungan dari sektor perbankan.
2. Lambatnya proses restrukturisasi dan rekapitalisasi tidak hanya disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara BPPN, Bank Indonesia, dan Departemen Keuangan, tetapi juga disebabkan oleh belum berjalannya undang-undang kepailitan. Selain itu pula masih terasa kentalnya nuansa KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme)

4.7 Letter Of Intens

1. Strategi industrialisasi substitusi impor yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru telah berhasil mengubah struktur ekonomi Indonesia dari ekonomi agraris menjadi ekonomi industri. Namun industri yang berkembang tersebut adalah industri yang sangat tergantung pada input impor (*out-ward looking*) dan hasil produksinya dipasarkan seperti ini tidak menghasilkan devisa, malah menghamburkan devisa, yang pada gilirannya membuat transaksi berjalan menjadi defisit. Defisit transaksi berjalan

ini kian membesar sejalan dengan berkembangnya industri substitusi impor.

2. Untuk membiayai defisit transaksi berjalan, utang luar negeri terus mengalami peningkatan dan peningkatan ini berpangkal pada strategi industrialisasi substitusi impor yang dilaksanakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional. Akumulasi utang luar negeri yang meningkat sedemikian cepat, tidak diimbangi dengan nonmigas mengakibatkan kapasitas membayar kembali (*repayment capacity*) utang luar negeri menjadi sangat lemah. Di sisi lain, keharusan pemerintah Indonesia membayar cicilan pokok utang luar negeri dan bunganya membuat beban APBN menjadi semakin berat sehingga keuangan negara pun terancam bangkrut (*fiscal distress*)
3. Strategi industrialisasi impor yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru terbukti telah menjerat perekonomian Indonesia dengan. utang luar negeri yang sangat besar sehingga perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap perubahan kurs mata uang dan tingkat suku bunga internasional. Terbukti pula bahwa strategi industrialisasi substitusi impor telah pula menjerumuskan perekonomian Indonesia ke dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan dan multidimensional, serta membuat

beban cicilan utang luar negeri dan bunganya semakin besar yang sekaligus membuat keuangan negara menjurus ke arah kebangkrutan (*fiscal distress*). Sudah barang tentu keadaan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

4. Sejak permulaan krisis hingga saat ini berbagai upaya sebagaimana tertuang di dalam *Letter Of Intent* telah dilaksanakan namun belum juga mencapai sasaran yang diinginkan bagi penyembuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Bahkan beberapa sasaran kebijakan sebagaimana dikehendaki dalam *Letter Of Intent*.

4.8 Peran Rezim Moneter Internasional

Indonesia untuk bangkit kembali dan keluar dari berbagai konflik kepentingan yang menimbulkan gangguan terhadap pembangunan politik dan pembangunan ekonomi, dimana masalah politik masih tetap dianggap sebagai musuh utama ekonomi dan biang keladi yang menimbulkan krisis ekonomi. Secara konseptual dan teoritis antara politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dalam terminologi pembangunan manusia, peran negara dan peran internasional. Sebab, kaitan antara peran domestik dan internasional (*domestic constraint and external constraint*) selalu akan terjadinya interaksi dari suatu sistem internasional antara

dependensi atau interdependensi dari hubungan bilateral, multilateral dan global.

Untuk itu, sangat beralasan kuat kalau pada akhir pasca pemilu, sepertiga kursi anggota legislatif dari 500 kursi yang diperebutkan oleh 48 partai politik, yaitu 134 kursi telah diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), Kompas, 27-6-1999), sehingga muncul keyakinan dan keberanian yang luar biasa dari Pak Kwik Kian Gie untuk menyatakan secara tegas mengenai fluktuasi rupiah untuk kembali kepada sistem kurs tetap. Sekalipun belum tersusunnya "Kabinet Reformasi Koalisi Pembangunan", kalau seandainya memang disetujui pemerintahan yang baru. Pernyataan Pak Kwik tentunya sangat merisaukan bagi IMF yang selama ini tetap (ngotot) mempertahankan kredibilitasnya terhadap sistem kurs mengambang sebagai pelaku rezim moneter internasional dalam upaya memulihkan krisis ekonomi Indonesia. Adanya kegelisahan dari tim IMF itu, akhirnya di lakukan konsultasi kembali dengan parpol-parpol pemenang pemilu untuk mendapat kepastian tentang pelaksanaan sistem moneter yang diinginkan oleh mereka.

Bantuan dana puluhan milyar dollar IMF yang akan dikucurkan kepada Indonesia, bukanlah hal aneh bagi pemikiran politik-ekonomi, karena bantuan itu tidak mungkin

tanpa ada motif politik dan kepentingan ekonomi tertentu? Bantuan IMF itu sejak dikucurkan telah banyak menimbulkan pro dan kontra, namun pemerintahan Soeharto sampai kepada pemerintahan transisi masih tetap mempertahankan eksistensi kehadiran IMF sebagai donatur penyelamat ekonomi Indonesia. Walaupun dari sisi lain, kritik yang dialamatkan kepada IMF tidak menggoyahkan (inkonsistensi) terhadap program-program pemulihan ekonomi yang telah disepakati terus direvisi, sehingga Indonesia mampu keluar dari krisis berkepanjangan, terutama depresiasi mata uang rupiah terhadap dollar AS.

Keberhasilan dan kepercayaan pasar (market confidence) telah membuahkan hasil yang sementara rupiah mengalami apresiasi pada akhirnya menembus level dibawah Rp. 7000 per- dollar AS, sehingga kedengaran seolah-olah itu karena berbagai faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi yang mempengaruhi, tanpa harus mengabaikan dan mengakui peran IMF yang begitu dominan. Faktor pendorong adalah kekuatan ekonomi negara-negara maju industri (G-7) yang peran utamanya dimainkan oleh Amerika Serikat agar Indonesia tetap konsistensi melaksanakan sistem kurs mengambang. Disisi lain, IMF tetap melaksanakan instruksi dengan program restrukturisasi dan rekapitalisasi dimaksud untuk menstabilkan kekuatan balance of payment deficit dan mengembalikan

fundamental ekonomi yang sempat hilang karena stagnasi dan distorsi ekonomi dengan penjadwalan utang luar negeri (hutang pemerintah dan swasta) yang tidak terkendali, penyelesaian masalah kredit macet terhadap debitor kakap agar tidak mengganggu neraca pembayaran, serta tersedia cadangan devisa.

Pakar hubungan internasional, Robert O. Koehane menyebutkan dalam artikelnya "The Demand for International Regimes" (Cornell University Press, 1983), dimana suatu studi tentang international Regimes (rezim internasional) di bawah pengaruh dari dunia politik. Analisis dari teori internasional dimulai "apparent anomaly" dari standpoint dari pemikiran realisme yang universal menjadi referensi internasional rezim melalui mutual agreement (kesepakatan bersama) oleh IMF antara "Agreement dan Regime" sebagai basis kalkulasi yang rasional. Basis dari kalkulasi rasional tadi merupakan bagian dari stabilitas hegemoni (hegemonic stability) yang dikuasai oleh negara-negara barat sebagai Monetary Regime (Rezim Moneter) yang diperankan oleh central institutions, yaitu IMF dan WTO, terutama dalam kebijakan bantuan luar negeri dan perdagangan internasional.

Memang harus diakui dari perspektif historis-empirikal bahwa ada korelasi yang berkaitan antara pemerintah dan

swasta untuk mengejar keuntungan kekuasaan dan kekayaan yang terus berkembang. Ada tiga pemikiran sebagai contoh ; pertama, AS melepaskan netralitasnya untuk terjun dalam perang dunia pertama adalah bertolak dari kepentingan ekonomi Amerika di luar pengaruh wilayahnya. Kedua, karena dipercaya dalam memenangkan peperangan, dibalik kemurahan hati dengan program Marshall Plan dalam upaya pemulihan ekonomi Eropa Barat dengan tersedia dam sebesar 14 milyar dollar di-investasi merupakan motif-motif tersendiri bagi kepentingan AS di kemudian hari.

Bukti bahwa hubungan antara AS-Eropa Barat sangat sulit dipisahkan, walaupun ada usaha negara -negara Eropa Barat melepaskan diri dari campur tangan dan keterlibatan Amerika di daratan Eropa termasuk mempertahankan NATO. Keunggulan pembangunan kembali perekonomian kapitalis demi mencari keuntungan jangka pendek bagi bisnis Amerika dan memantapkan kembali sistem demokrasi konstitusional dengan tetap mempertahankan kekuasaan AS di Eropa Barat dari ancaman ekspansionisme Uni Soviet-Rusia. Ketiga, masyarakat AS sendiri mulai menganggap intervensi AS dalam perang Vietnam dan petualang di Dunia Ketiga demi penerapan strategi Containment Policy (kebijakan pembendungan) dengan Truman Doctrine sejak tahun 1948-1970 an merupakan tujuan

mengamankan sumber daya alam atas kepentingan mencari kekuasaan dan kekayaan yang dilakukan atas dasar motivasi ekonomi.

Pola yang diterapkan dalam pembentukan lembaga IMF yang menjadi tujuan utama adalah memantapkan perekonomian dan menghilangkan sebab-sebab ekonomi secara luas. Pola bantuan keuangan oleh IMF adalah dihubungkan dengan masalah krisis keuangan (masalah moneter), resesi ekonomi dan pengangguran dan gerakan ekstrim lainnya, termasuk lahirnya sistem politik yang bersifat diktator-otoriter, fasisme dan totaliter. Cara yang ditempuh untuk memberikan pinjaman kepada negara-negara dalam mengatasi defisit neraca pembayaran, dengan syarat bahwa negara tersebut harus mengadakan perubahan atau disebut dengan Reformasi se-perlunya dalam kebijakan keuangan yang dinyatakan dalam suatu Letter of Intent (surat kesepakatan) sewaktu mengajukan permohonan bantuan pinjaman. Bantuan dana lembaga internasional sudah menjadi pembayaran utang luar negeri, dan yang paling menyakitkan adalah mereka ingin ikut campur tangan dalam proses pengambilan keputusan.

Para debitor harus tunduk pada kreditor, karena mereka sudah diikat oleh kesepakatan bersama dalam suatu paket, seperti kesepakatan Indonesia dengan IMF. Kebanyakan

penulis Barat yang obyektif sangat meragukan kemampuan IMF untuk membuktikan keberhasilan bagi suatu negara. Komisi Willy Brandt pernah melontarkan kritik yang paling keras terhadap IMF yang dianggap menggunakan posisi paternalistik dan cenderung merumuskan kebijakan tentang neraca pembayaran atas dasar pendekatan moneter. Penentuan nilai tukar yang tidak realistik, pada waktu singkat menjadi tidak realistik, terutama penghapusan subsidi dan bahkan jatuhnya pemerintahan. Spekulasi pasar, George Soros juga memberikan pemikirannya bahwa bank sentral merupakan satu institusi yang fleksibel, inovatif dan efisien dimana IMF dianggap bekerja berdasarkan resep yang kaku dalam menangani negara pengutang besar. Sebaliknya, IMF tetap penuh kepercayaan diri dan dukungan SDM untuk membantu pemulihan ekonomi suatu negara, apabila hal tersebut menguntungkan posisinya dalam dunia moneter internasional.

Hal serupa juga dilontarkan oleh Profesor Jeffrey A. Winter yang mengakui bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia bukanlah krisis biasa bagi Indonesia melainkan suatu krisis terinternalisasi dan menjadi salah satu dari sekian banyaknya krisis. Sumber krisis tersebut bukan spesifik milik Indonesia melainkan berkaitan dengan tatanan dunia ekonomi global. Winter menyebutkan ada beberapa faktor yang

menyebabkan terjadinya perubahan antara kurun waktu, yaitu tahun 1950-1970-an dan tahun 1990-an. Pertama, siapa yang menjadi penyalur dana bagi negara-negara berkembang antara 1950-1970-an, dimana penyalur dana adalah modal resmi (*Official Capital*) dan modal swasta sekitar 75% juga ikut ambil bagian pada waktu itu.

Kedua, peranan modal swasta itu sendiri bukan menjadi lebih penting daripada *Official Capital*, walaupun dalam modal swasta tersebut terjadi perubahan besar, terutama dari *foreign directing investment* yang berarti perubahan secara aktual investasi dalam produksi dan mempunyai fasilitas menjadi modal financial (*finance capital*). Modal swasta yang masuk ke dalam negara-negara berkembang sebagian besar berupa saham-saham perusahaan dan modal pinjaman bersifat "Volatile" (labil) dan mengubah motivasi para penyalur dana, sehingga Indonesia sangat rawan terhadap krisis termasuk fluktuasi mata uang rupiah.

Kita sudah waktunya mau mendengar dan belajar dari pengalaman Mexico, Argentina dan Brazil yang mengalami berbagai krisis yang melanda negara tersebut. Latar belakang krisis Mexico disebutkan bahwa mereka tidak mempunyai otoritas dalam strategi ekonomi. Kemudian Mexico mengalami "*current account deficit*" yang menimbulkan tidak sustainable

(berkesinambungan) dan kebutuhan dari berbagai perubahan besar dan tidak konsistensi terhadap kebijakan macro ekonomi, termasuk nominal dari *exchange rate*, serta kepercayaan atas domestik dan investasi asing dengan komitmen untuk melindungi jangka pendek dari strategi ekonomi, termasuk ancaman inflasi, interest rates dan public debt (utang publik).

Begitu banyak arus modal dan investasi jangka panjang yang masuk sejak tahun 1967-1997, kita sudah mempunyai tabungan (*saving*) untuk "Take-off" sebagaimana bantuan AS terhadap Eropa Barat dengan Marhall Plan telah memulihkan Eropa Barat dari kehancuran ekonomi. Peran rezim moneter internasional akan tetap bersikap "status quo", selama masih kita belum percaya terhadap kemampuan sendiri, bukan kemampuan individual atau kelompok ekonom dan kelompok teknolog yang bersaing dalam pembangunan ekonomi Indonesia, melainkan kekuatan ekonomi rakyat dan negara yang menjadi fundamental ekonomi Indonesia. Kapan lagi, kita tidak terjebak oleh neokolonialisme dan imrealisme ekonomi sebagai modal Baru dari rezim moneter internasional.

4.9. Era Kesuksesan Jepang. Ezra F. Vogel : Jepang Jempol Pelajaran Untuk Amerika

Nampaknya buku ini mempunyai suatu ciri tersendiri dan didukung oleh studi yang mendalam. Keunggulan teknologi dan daya saing ekonomi yang begitu menonjol menyebabkan pengamatan lebih intens ditujukan kepada kesuksesan Jepang. Tiada seorang pun yang akan membayangkan bahwa Jepang yang bertekuk lutut dalam PD-II itu dapat bangkit kembali dan menjadi pusat yang utama negara-negara industri terkemuka di dunia.

Sukses yang perlu kita kagumi ini adalah suatu pelajaran yang berharga buat Amerika Serikat di masa mendatang. Karena pengalaman sejarah sering diabaikan padahal sejarah itu merupakan dasar-dasar pijakan yang kuat untuk melihat ke depan. Amerika acapkali terlenta dan lupa belajar dari pengalamannya sendiri. Kritik yang paling tajam datang dari Winston Churchill bahwa Amerika terlalu senang sebagai juru selamat bagi Eropa Barat. Tetapi di balik itu orang juga jangan melupakan jasa yang terhormat dari Amerika untuk Jepang.

Vogel sendiri secara jujur mengakui bahwa Jepang sebagai raksasa ekonomi kedua terbesar di dunia, suatu bangsa demokratis modern dengan sistem perusahaan bebas sama

seperti sistem Amerika sendiri, memberikan kepada Amerika perspektif yang paling baik. Namun Vogel telah memberikan argumen yang terarah agar supaya Amerika tidak mentransformasikan secara cepat pola-pola keberhasilan Jepang, sehingga model yang diterapkan tidak menjadi bumerang di kemudian hari.

Kecepatan pertumbuhan ekonomi Jepang adalah sangat mengejutkan dunia. Sejak zaman Meiji Restorasi (1868-1912) sampai tahun 1965 pendapatan negara Jepang tumbuh menjadi 100 milyar dollar. Lima tahun kemudian menjadi dua kali lipat. Sebelum tahun 1980 bertambah lagi dengan duakali lipat. Keberhasilan orang-orang Jepang karena memiliki keahlian dalam merencanakan strategi ekonomi rasional dan berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan dengan rasa tanggung jawab yang besar. Begitu pula dengan bermacam-macam konsekuensi dari politik internasional dalam pertumbuhan ekonominya. Maka mesin-mesin ekonomi berputar di antara para politisi untuk menemukan jawabannya.

Meskipun materi yang dikemukakan dalam buku ini berisikan tiga bagian pembahasan dan bukan sekedar basa-basi keunggulan Jepang, akan tetapi menambah cakrawala pengetahuan kita tentang negara sakura. Dengan terbitan *Manusia Jepang* oleh Edwin O. Reischauer, *Pedang Samurai*

dan Bunga Seruni Pola-Pola Kebudayaan Jepang oleh Ruth Benedict. Dan karya novelis James Clavell yang “the best seller”, *Shogun*, maka keempat buku tersebut memperkaya khazanah kita untuk memperluas studi perbandingan.

Bagian kedua buku ini lebih dalam menelaah kesuksesan Jepang di berbagai sektor kehidupan. Sukses Jepang dalam mengabadikan semangat kelompok berasal dari peralihannya yang lambat dari feodalisma langsung ke masyarakat perusahaan yang modern, tanpa diselingi masa individualisma yang berlangsung beratus-ratus tahun seperti di Eropa Barat. Kesetiakawanan kelompok bertahan di Jepang karena rakyat terus menggalangnya. Baik di desa-desa, di kota-kota, di lingkungan pertokoan, maupun di tempat-tempat kerja, apra pemimpin bekerja keras untuk mempertahankan loyalitas anggota-anggota kelompok dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka (h.131).

Harus diakui bahwa dalam jangka waktu yang pendek Jepang mampu menciptakan dominasi yang luar biasa dalam bidang ekonomi dan teknologi. Keunggulan teknologi purna industri yang majunya begitu pesat dan merupakan salah satu negara di Asia yang menduduki posisi penting di dalam kelompok Utara (Kelompok negara-negara terkemuka di bidang industri), Jepang kini dianggap sejajar dengan Amerika

Serikat dalam tingkat kekuatan ekonomi dan saling menjaga keseimbangan dalam neraca perdagangan internasional dan berusaha menghindari perang ekonomi terbuka.

Kemunduran daya saing Amerika akan mempunyai dampak yang jauh lebih besar atas kehidupan nasional daripada yang pernah kami pikirkan sampai sekarang. Selain industri Amerika menjadi tertinggal, pabrik-pabrik televisi harus mengadakan penghematan, pabrik-pabrik baja berhenti bekerja, serta timbul kekurangan bagi pekerja Amerika. Meskipun beberapa pabrik Amerika, seperti pabrik televisi, diambil alih oleh Jepang dan dimodernisasikan. Dengan meningkatnya kemudahan Jepang untuk mendapatkan keuntungan dan tidak seimbangannya neraca perdagangan yang berlangsung terus-menerus (hal. 284).

Dalam urusan politik internasional, Jepang masih merendah diri dan secara jujur mengakui pengaruh politiknya sekarang tidak dapat menandingi pengaruh Amerika Serikat. Jepang masih tetap mengikuti pola-pola kebijaksanaan Amerika Serikat agar kelak tidak terjadi kesenjangan hubungan politik dan militer yang bisa menjadi masalah yang kompleks.

Pada bagian terakhir merupakan jawaban Amerika, di mana penulis berusaha meyakinkan Amerika Serikat agar lebih cermat lagi mengoreksi diri dan menyusun kembali program

yang rasional di masa mendatang. Amerika tidak perlu kalah dari Jepang, kesinambungan harus tetap menumbuhkan kesadaran. Kelemahan Jepang adalah sumber daya alam harus ditopang oleh negara-negara non-komunis. Sehingga Jepang selalu berhati-hati agar tidak tergantung kepada negara-negara komunis bagi kebutuhan bahan bakunya dan pemasaran hasil industrinya.

BAB V

**PERANG DINGIN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP SISTEM POLITIK
INTERNASIONAL DALAM TINJAUAN TEORI
HIGH POLITICS**

5.1 Pendahuluan

Perang Dingin dan Implikasinya terhadap Sistem Politik Internasional dalam Tinjauan High Politics Luerdi dan Ahmad Faruki Universitas Abdurrah mendefinisikan bahwa istilah Cold War pertama kali digunakan oleh Bernard Baruch dan Walter Lippman dari Amerika Serikat pada tahun 1947, yang merupakan ketegangan antara dua kekuatan besar yang bersaing dan berebut pengaruh setelah berakhirnya Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat dengan ideologi Liberalisme-Demokrasi dan Uni Soviet dengan ideologi Komunisme, dimulai dari tahun 1947-1991. Ketegangan ini tidak hanya membawa dampak pada ke-dua negara tersebut, tapi juga negara-negara lain yang terlibat dalam blok pimpinan AS (Blok Barat) dan blok pimpinan Uni Soviet (Blok Timur). Persaingan yang terjadi meliputi berbagai bidang seperti politik, ideologi, militer dan pertahanan, ekonomi, sosial-budaya dan teknologi

ruang angkasa. Perang Dingin dipicu oleh keinginan Presiden AS, Harry S. Truman dalam konferensi Potsdam (1945) agar diselenggarakan pemilu yang bebas di seluruh Eropa Timur pasca kalahnya koalisi Jerman-Italia-Jepang dalam Perang Dunia II. Namun, pimpinan Uni Soviet, Stalin, menolak tegas rencana tersebut karena adanya kekhawatiran negara-negara Eropa Timur hasil pemilu yang bebas akan memusuhi Komunisme dan Uni Soviet. Perbedaan pandangan ini dianggap sebagai faktor kunci terjadinya Perang Dingin. Perbedaan pandangan ini kemudian diikuti dengan pembagian Jerman menjadi dua negara, yaitu Jerman Barat yang berada dalam kubu AS dan Jerman Timur berada dalam kubu Uni Soviet. Perang Dingin berakhir ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin pada 1989 dan bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur pada 1990. Kemudian diikuti dengan peristiwa bubarnya Uni Soviet pada 1991 dan mundurnya Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin Uni Soviet. Sebelumnya, Gorbachev memperkenalkan kebijakan glasnost (keterbukaan) pada tahun 1985 dan perestroika (rekonstruksi/reorganisasi) pada tahun 1987. Kebijakan ini mengakibatkan gelombang revolusi di Uni Soviet dan negara-negara satelitnya yang kemudian mengakhiri kedigdayaan Uni Soviet. Selain itu, komitmen antara kedua negara super power tersebut melalui pertemuan di Malta (1989)

dan Washington (1990) untuk bekerjasama di masa depan juga dianggap sebagai tanda berakhirnya Perang Dingin. Kedua pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian pada akhir 1990 di mana dilakukannya pengurangan dan pembatasan senjata 1

Fredrick L.Schuman., *International Politics: The Western State System and the World Community*, Sixth Edition, USA: McGrew-Hill Company, Inc, 1958, hal. 485-486. 2

konvensional secara drastis di Eropa dan disepakatinya pakta non-agresi antara NATO and Organisasi Keamanan Warsawa.2

Perang Dingin memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan sistem politik internasional dan implikasinya khususnya berkaitan dengan high politics. High politics meliputi isu-isu yang berkaitan dengan politik keamanan dan pertahanan, kedaulatan dan juga militer. Perang Dingin Persaingan dan ketegangan antara AS dan Uni Soviet begitu jelas selama periode Perang Dingin. Walaupun secara langsung kedua negara tidak terlibat dalam peperangan face to face, tapi perilaku kedua negara dengan kebijakan luar negerinya mencerminkan situasi persaingan dan ketegangan yang terjadi di antara kedua kekuatan tersebut. Bahkan berbagai krisis yang terjadi di berbagai negara, AS dan Uni Soviet beserta sekutu mereka terlibat dalam krisis tersebut demi mempertahankan dan memperebutkan kepentingan mereka. AS berpegang teguh

pada teori domino, yaitu apabila suatu negara jatuh ke tangan atau pengaruh komunisme, maka komunisme akan merambat ke negara-negara tetangganya. Sehingga AS memiliki kepentingan untuk mencegah penyebaran Komunisme. Di lain pihak, Uni Soviet memiliki konsep keamanan yang hanya bisa dibangun dengan sekutu sejati. Sekutu sejati bagi Uni Soviet adalah negara-negara yang berideologikan komunisme. Perang Dingin dapat dilihat dari krisis atau perang di berbagai belahan dunia. Selain itu, Perang Dingin juga telah mampu membelah suatu wilayah negara menjadi dua bagian yang saling bermusuhan berdasarkan ideologi liberalisme dan komunisme. Blokade Berlin 1948-1949 Pasca kalahnya kekuatan Nazi Jerman di akhir perang Dunia II, pengelolaan kota Berlin dibagi menjadi beberapa zona. Uni Soviet menguasai sebagian besar wilayah Berlin yaitu bagian tengah dan timur. Sedangkan AS, Inggris dan Perancis menguasai wilayah Barat.³ Uni Soviet berinisiatif melakukan blokade terhadap Berlin karena semakin meruncingnya persaingan ideologi dengan AS. Selain itu, Uni Soviet bermaksud mencegah penyebaran pengaruh AS di wilayah Berlin bagian tengah dan timur dan menguasai Berlin secara keseluruhan. Blokade Berlin dianggap sebagai krisis kemanusiaan pertama dalam Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Krisis ini juga dianggap sebagai krisis

internasional pertama yang menyebabkan banyak korban jiwa setelah berakhirnya Perang Dunia II. Uni Soviet memberlakukan larangan keluar-masuk Berlin pada Juni 1948 sebagai respon terhadap diberlakukannya reformasi ekonomi dan Deutsche Mark sebagai valuta baru oleh AS dan sekutunya (Inggris dan Perancis) di Jerman Barat.⁴ AS memasok kebutuhan logistik warga Berlin Barat melalui jalur udara. Jembatan udara yang dibuat oleh AS berhasil memasok kebutuhan logistik warga Berlin Barat. Uni Soviet hanya memberlakukan blokade Berlin selama satu tahun karena pada Mei 1949, Uni Soviet mencabut blokade ini. Namun, dua tahun kemudian Uni Soviet membangun rangkaian tembok pembatas yang membagi kota Berlin, yang juga menjadi pemisah teritori antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Invasi Teluk Babi (Playa Giron) 1961 Invasi Teluk Babi merupakan sebuah pendaratan yang direncanakan dan didanai oleh Amerika Serikat dan dilakukan oleh orang-orang Kuba di pembuangan di Kuba Barat.² Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty., Pengantar Politik Global, Edisi Terjemahan, Bandung: Penerbit Nusa Media, 201, hal.229-230. ³ 'Uni Soviet Blokade Berlin', , [diakses 29 Oktober 2015]. ⁴ Ibid., 3 International Society, Vol. IV, No. 1, 2017 Daya untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro. Peristiwa ini menandai klimaks tindakan anti-

Kuba oleh AS. AS takut revolusi yang dilakukan Castro akan meningkatkan kepercayaan diri dan mendorong kelompok-kelompok anti-AS di negara-negara lain di Amerika latin untuk melakukan hal yang sama. Dengan jatuhnya Kuba ke tangan Castro dengan sistem Komunisme-nya, Uni Soviet semakin meningkatkan pengaruh Komunisme dan politik di negara-negara Amerika Latin.⁵ Uni Soviet giat melakukan diplomasi dan kerjasama dengan pemerintahan di negara-negara Amerika Latin yang anti-AS. Selain itu, Uni Soviet juga menjalin komunikasi politik yang intens dengan partai-partai Komunis di Amerika Latin. Ketegangan AS-Kuba telah tumbuh sejak Castro menggulingkan rezim diktator militer sayap kanan Jenderal Fulgencio Batista yang didukung AS pada 1959. AS di bawah pemerintahan Eisenhower dan Kennedy telah menilai bahwa pergeseran Castro kepada Uni Soviet tidak bisa diterima dan karena itu mereka berusaha menggulingkannya dengan memanfaatkan kelompok anti-Castro dan anti-Soviet. Invasi ini mengalami kegagalan total dan ternyata menjadi noda internasional bagi pemerintahan AS. Sebaliknya, pemerintahan Fidel Castro menganggap tindakan yang dilakukan menghadapi pemberontak yang didukung oleh AS ini sebagai perang melawan para bandit. Ketegangan AS-Uni Soviet semakin tajam setelah usaha invasi tersebut. Bahkan, invansi Teluk Babi

ini kemudian menyalut krisis nuklir antara AS dan Uni Soviet. Krisis Missil Kuba 1962 Invasi Teluk Babi yang disponsori oleh AS mengakibatkan kemarahan Kuba dan Uni Soviet. Kedua negara mengecam tindakan AS tersebut. Walaupun invasi tersebut mengalami kegagalan, Kuba dan Uni Soviet meningkatkan kewaspaan terhadap berbagai tindakan Amerika di masa yang akan datang yang dapat mengancam eksistensi kedua negara tersebut. Uni Soviet memutuskan untuk membangun pangkalan missil balistik di Kuba. AS mengecam pembangunan tersebut karena berpotensi mengancam keamanan nasionalnya. Secara geografis, pangkalan missil balistik yang terletak di laut Karibia tersebut dekat dengan AS. Uni Soviet tidak menghiraukan keberatan AS dan tetap mengirimkan peralatan militernya secara terus menerus, termasuk senjata missil balistik berhulu ledak nuklir. AS merasa terancam karena rudal-rudal yang diletakkan di Kuba diarahkan ke AS. AS akhirnya memblokade Kuba untuk mencegah pasokan militer Uni Soviet ke Kuba dan memberlakukan status siaga tinggi. Uni Soviet sebenarnya juga terancam dengan keberadaan pangkalan missil Balistik AS yang telah ditempatkan di wilayah Turki yang berdekatan dengan wilayahnya. Posisi rudal-rudal balistik AS telah diarahkan ke Uni Soviet. AS memiliki pilihan untuk

menghancurkan pangkalan rudal missil Uni Soviet di Kuba melalui serangan udara ataupun serangan darat yang cepat. Namun, dengan berbagai pertimbangan seperti sisi moral dan dampak yang begitu besar, aksi militer tidak digunakan mengingat Uni Soviet tidak akan tinggal diam, dan akan melakukan balasan terhadap AS.⁶ Ke-dua negara sama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman serangan dari salah satu pihak yang datang dari pangkalan missil balistiknya. Ke-dua negara juga siap siaga untuk meluncurkan rudal-rudal berhulu ledak nuklir. Serangan tersebut dapat menjadi perang dunia III atau perang nuklir ‘jarak dekat’ yang akan 5 Anthony T.Bouscaren, *Is the Cold War over?;A New Look at Communist Imperialism*, USA:The Capitol Hill Press, 1973, hal. 236. 6 Dominic Tierney, ‘Pearl Harbor in Reverse;Moral Analogies in the Cuban Missile Crisis’, dalam *Journal of Cold War Studies*, Harvard University, Vol. 9, Issue 3 (Summer,2007), hal. 61, , [diakses 31 Oktober 2015]. 4 mengakibatkan hancurnya kedua negara tersebut. Ketegangan antara AS dan Uni Soviet seperti inilah yang kemudian dikenal dengan krisis missil Kuba. Krisis Missil Kuba berakhir pada tanggal 28 Oktober 1962 dengan diadakannya kesepakatan antara AS dan Uni Soviet. Uni Soviet melalui Perdana Menteriya ketika itu (Nikita Khrushchev) sepakat untuk

melucuti persenjataan missilnya yang ditempatkan di Kuba dan AS dibawah pemerintahan Presiden John F.Kennedy juga sepakat untuk melucuti persenjataan nuklirnya yang telah ditempatkan di Turki. AS juga berjanji untuk tidak akan menyerang Kuba.⁷ Perang Korea 1950-1953 Perang Korea melibatkan AS dan PBB dalam membantu Korea Selatan mengusir tentara Korea Utara keluar dari wilayah Korea Selatan. Perang ini disebut juga dengan istilah proxy war (perang yang dimandatkan) karena perang ini melibatkan PBB bersama negara-negara lainnya seperti Kanada, Inggris dan lainnya. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk merespon tindakan Korea Utara yang telah melanggar hukum internasional.⁸ Di AS, perang ini disebut dengan aksi Polisional karena dilakukan dibawah bendera PBB dan keterlibatan AS tidak mesti mendapatkan persetujuan kongres. Perang Korea disulut oleh invasi besar-besaran yang dilakukan oleh Korea Utara untuk menguasai Korea Selatan pada tahun 1950. Kekuatan Korea Selatan tidak sebanding dengan kekuatan Korea Utara. Serangan tersebut mengundang intervensi AS dan PBB untuk memukul mundur Korea Utara yang didukung oleh RRC dan Uni Soviet. Di lapangan, Uni Soviet tidak terlibat dalam mengerahkan pasukannya. Namun, tentara rezim Komunis Korea Utara yang menginvasi Korea Selatan dilatih

oleh Uni Soviet. Uni Soviet juga terlibat dalam melakukan aksi spionase dan pasokan perlengkapan militer untuk tentara Korea Utara.⁹ Konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara sebenarnya telah terjadi semenjak Korea dibagi dua oleh AS dan Uni Soviet. Baik Korea Selatan yang berideologi Liberalisme Demokrasi dan Korea Utara yang berideologi Komunisme sama-sama berkeinginan menyatukan Korea namun di bawah naungan ideologi masing-masing. Baik AS dan Uni Soviet juga berkepentingan terhadap eksistensi kedua negara tersebut. Perang Korea berakhir dengan diadakannya perjanjian gencatan senjata antara AS, RRC, dan Korea Utara. Korea Selatan menolak untuk menandatangani gencatan senjata tersebut, namun Presiden Korea Selatan kala itu (Syngman Rhee) berjanji akan menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Secara resmi Perang Korea sebenarnya belum berakhir sampai sa'at ini. Perang Vietnam 1959-1975 Konflik antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan telah dimulai sejak Vietnam dibelah menjadi dua oleh Perancis pada tahun 1954 melalui sebuah konferensi yang diadakan di Jenewa, Swiss.¹⁰ Uni Soviet sempat mengusulkan kepada PBB agar Vietnam Utara diterima sebagai anggota PBB pada tahun 1957. Namun, AS memveto usulan tersebut dikarenakan Vietnam Utara berhaluan Komunis. Keterlibatan AS dalam perang Vietnam

mendukung Vietnam Selatan memberikan kerugian besar di pihak AS. Karena berada di bawah desakan masyarakatnya sendiri, AS di bawah kepemimpinan Richard M. Nixon segera merubah kebijakan politik AS di Vietnam dari semula ‘bagaimana caranya memenangkan perang’ menjadi ‘bagaimana caranya mundur dari gelanggang tanpa kehilangan muka.’⁷ Anthony T.Bouscaren, *Op.Cit.*, hal. 236. ⁸ Charles L.Robertson., *International Politics Since World War II; A Short History*, 2nd Edition, USA: John Wiley & Sons. Inc., 1975, hal. 114. ⁹Anthony T.Bouscaren, *Op.Cit.*, hal.158. ¹⁰ Richard W. Mansbach dan Kirsten L.Rafferty., *Op.Cit.*, hal. 214. ⁵ International Society, Vol. IV, No. 1, 2017 Atas dasar desakan internasional, AS menandatangani perjanjian perdamaian Paris pada 27 Januari 1973. Perjanjian ini memuat hal bahwa AS akan segera menarik bantuannya di Selatan secara berangsur, batas teritori Utara dan Selatan dikukuhkan ulang dan pemilihan umum akan segera dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah Utara-Selatan. Namun, perjanjian ini ditentang oleh Vietnam Selatan karena Vietnam Selatan masih membutuhkan bantuan AS. AS sebenarnya masih enggan melaksanakan isi perjanjian tersebut sampai krisis minyak dunia terjadi pada tahun yang sama. AS terancam mengalami kebangkrutan dan akhirnya menarik

seluruh pasukan dan menghentikan bantuan ke Vietnam Selatan. Tanpa bantuan dan kekuatan finansial dan militer dari AS, Vietnam Utara dengan mudah melumpuhkan dan mengambil alih Vietnam Selatan. Perang Afganistan 1979-1989 Uni Soviet melakukan invasi terhadap Afganistan pada tahun 1979. Kebijakan invansi Uni Soviet ini didasarkan oleh keyakinan atas kemampuan Uni Soviet dalam mentransformasi Afganistan, menstabilkan pemerintahan dari perang sipil dan meraih pengakuan internasional terhadap rezim Komunis di Afganistan.¹¹ Uni Soviet ingin memepertahankan kekuasaan Partai Rakyat Demokratik Afganistan yang berhaluan Marxisme sehingga Afganistan tetap menjadi sekutu Uni Soviet. AS terlibat secara tidak langsung dalam mengusir Uni Soviet keluar dari Afganistan. Keterlibatan AS diwujudkan dalam bentuk bantuan finansial, persenjataan, pelatihan militer dan spionase kepada para kelompok pemberontak rezim Afganistan dan antiKomunisme. Uni Soviet secara resmi meninggalkan Afganistan pada Februari 1989. Krisis-krisis Lainnya (RRC-Taiwan, Israel-Mesir, India-Pakistan) Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet juga dapat dilihat dari berbagai krisis lain selain yang disebutkan di atas, seperti krisis RRC-Taiwan. Keberhasilan revolusi Komunis di Cina tidak terlepas dari dukungan Uni Soviet, sedangkan eksistensi

Taiwan sebagai sebuah negara baru mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Selama periode Perang Dingin, AS dan Uni Soviet juga terlibat dalam membantu berbagai revolusi, pemberontakan dan kudeta terhadap rezim penguasa di beberapa negara. Dalam perkembangannya, praktik persaingan AS dan Uni Soviet di era Perang Dingin tidak selalu diwujudkan dalam bentuk dukungan pada pihak berdasarkan ideologi Komunisme atau Demokrasi-Liberalisme. Kedua negara tersebut bisa saja mendukung suatu pihak yang sedang berkonflik, selagi dianggap dapat menjadi kawan strategis. Sebagai contoh adalah perang Israel-Mesir dan India-Pakistan. Dalam perang antara Israel dan Mesir, Amerika Serikat memberikan dukungan kepada Israel, sedangkan Uni Soviet memberikan dukungan kepada Mesir. Dan dalam perang antara India dan Pakistan, AS memberikan bantuan kepada Pakistan, sedang Uni Soviet memberikan bantuan kepada India. Implikasi Perang Dingin Perang Dingin yang terjadi antara AS dan Uni Soviet memberikan implikasi yang luas dalam sistem politik internasional. Ketegangan dan persaingan ideologi dan politik antara kedua negara tersebut mampu menarik negara-negara lain masuk dalam lingkaran pengaruh mereka. Walaupun AS dan Uni Soviet tidak berhadapan dalam kondisi perang secara langsung selama periode tersebut, nyatanya

Perang Dingin mengakibatkan perubahan geopolitik wilayah, konflik bersenjata berdarah yang menyebabkan korban jiwa, konflik internal dan perpecahan berbagai negara di dunia, sampai hampir terjadinya 11 Artemy Kalinovsky, 'Decision-Making and the Soviet War in Afghanistan: From Intervention to Withdrawal', dalam *Journal of Cold War Studies*, Harvard University, Vol.11, Issue 4, (Fall, 2009), hal. 47, , [diakses 31 Oktober 2015]. 6 perang nuklir. AS dan Uni Soviet berupaya untuk memperluas pengaruhnya ke berbagai negara, tidak hanya di daratan Eropa, tapi juga di Asia, Afrika dan Amerika Latin. AS giat melakukan propaganda anti-Soviet dan begitu pula dengan Uni Soviet aktif melakukan propaganda anti-Amerika dan sekutunya. Kedua negara sama-sama memiliki pandangan akan perlunya memperluas pengaruh ideologi dan politik ke berbagai belahan dunia. AS menerapkan politik pembendungan (containment policy) untuk mencegah penyebaran pengaruh Uni Soviet dan Komunisme ke seluruh dunia. Politik containment didasarkan pada asumsi bahwa Uni Soviet berupaya melakukan ekspansi tanpa batas (limitless expansion) dan kebijakan Uni Soviet ini diinspirasi oleh pandangan Komunisme tentang konflik yang tak terhindarkan antara Kapitalisme dan Sosialisme.¹² Kebijakan di atas telah menciptakan konflik AS-Uni Soviet di berbagai negara. AS

tidak rela bila suatu negara jatuh seutuhnya pada pengaruh Komunisme. Persaingan dalam penyebaran pengaruh kemudian berimplikasi pada peningkatan kemampuan militer dan pertahanan kedua negara, termasuk persenjataan nuklir. Berbagai aliansi strategis juga dibentuk oleh AS dan Uni Soviet. Selain aliansi yang memihak pada poros-poros kekuatan AS dan Uni Soviet, juga terbentuk aliansi yang berada di luar kekuatan tersebut. Pengembangan dan Perlombaan Persenjataan Nuklir Persaingan ideologi yang terjadi antara AS dan Uni Soviet juga mengakibatkan perubahan cara pandang terhadap keamanan nasional. Kedua negara berkeyakinan keamanan nasional mesti diprioritaskan demi keberlangsungan negara. Serangan dari kekuatan lawan bisa saja terjadi karena baik AS dan Uni Soviet sama-sama berambisi untuk menjadi yang paling kuat dan berpengaruh. Konflik tidak langsung antara AS dan Uni Soviet di berbagai belahan dunia bisa saja mengarah pada konflik secara langsung. Dengan demikian, kedua negara merasa perlu untuk meningkatkan kekuatan militer dan pertahanannya, tidak hanya kekuatan militer konvensional tapi juga kekuatan persenjataan nuklir. Bagi AS, nuklir merupakan sarana penangkal terhadap ancaman nuklir Uni Soviet, sekaligus untuk mengurangi ketegangan dengan Uni Soviet. Walaupun penggunaan senjata nuklir dalam

konfrontasi fisik dengan Uni Soviet adalah sangat tidak mungkin dilakukan, strategi pengembangan nuklir masih tetap dilakukan untuk menciptakan penangkalan yang berkelanjutan.¹³ Kedua negara sama-sama yakin bahwa nuklir menjadi jaminan bagi keamanan negara dari serangan dari luar. Selain itu, pemilikan senjata nuklir menjadi cara yang paling logis bagi AS dan Uni Soviet untuk mengimbangi kekuatan masing-masing. AS tidak ingin kekuatan persenjataan nuklirnya tertinggal jauh dari Uni Soviet, dan begitu juga Uni Soviet. Dengan keyakinan tersebut, AS dan Uni Soviet menggiatkan dan meningkatkan pengembangan senjata nuklir. Senjata nuklir dianggap mampu untuk mengancam lawan sekaligus menjaga keamanan nasional. Pemilikan senjata nuklir juga dijadikan daya tarik oleh kedua negara untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan negara-negara lain untuk bergabung dengan aliansi AS atau aliansi Uni Soviet. Situasi perlombaan kekuatan nuklir antara AS-Uni Soviet ini tidak hanya ditujukan untuk menciptakan balance of power, namun juga balance of terror. ¹⁴ Pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh AS dan Uni Soviet berubah

¹² Charles L. Robertson, *Op.Cit.*, hal. 69. ¹³ William Burr, 'The Nixon Administration, the Horror Strategy, and the Search for Limited Nuclear Options, 1969-1972', dalam *Journal of Cold War Studies*, Harvard

University, Vol. 7, Issue 3, (Summer, 2005), hal. 34- 35, , [diakses 13 Oktober 2015]. 14 Joseph Frankel., *International Politics; Conflict and Harmony*, London: Cox and Wyman, Ltd., 1969, hal. 78. 7 International Society, Vol. IV, No. 1, 2017 menjadi perlombaan kekuatan persenjataan nuklir. Pemilikan senjata nuklir menjadi prestise atau show of force atas kekuatan militer kedua negara. Perlombaan senjata nuklir ini lah yang akhirnya menjadi kekhawatiran dunia bahwa Perang Dingin akan menjadi perang nuklir, yang jauh lebih dahsyat ketimbang Perang Dunia II. Contoh nyata perlombaan persenjataan nuklir antara AS dan Uni Soviet yang hampir mengarah pada perang nuklir adalah krisis missil Kuba. Terbentuknya Tatanan Dunia yang Bipolar Akhir Perang Dunia II menghasilkan dua kekuatan besar yaitu AS dan Uni Soviet. Walaupun AS dan Uni Soviet, bersama Inggris dan Perancis, berada dalam satu koalisi menentang dan mengalahkan kekuatan Nazi Jerman, kedua negara tidak bisa menghasilkan pandangan yang sama dalam mengelola Eropa pasca Perang Dunia II. Perbedaan ideologi dan kepentingan mempersulit AS dan Uni Soviet untuk mencapai kata sepakat dalam melakukan konstruksi Eropa. Bahkan, perbedaan pandangan dari kedua belah pihak semakin tajam dan memaksa kedua belah pihak berjalan pada keyakinan masing-masing.¹⁵ AS berupaya

menjadikan negara-negara Eropa Barat sebagai sekutu membendung pengaruh Komunisme Uni Soviet. Sedangkan Uni Soviet menanamkan power-nya di Eropa Timur. Bagi Uni Soviet, negara-negara yang berideologikan Komunisme lah yang hanya bisa menjadi sekutu sejati sehingga Uni Soviet memaksa dan mendukung revolusi negaranegara di Eropa Timur. Dengan kondisi seperti ini Eropa terbelah menjadi dua blok, yaitu Blok Barat yang dipimpin oleh AS dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Tatanan dunia pasca Perang Dunia II jelas menghasilkan bipolar system, di mana hanya ada dua negara super power yang mampu mempengaruhi sistem politik, ekonomi dan militer di berbagai negara. Pihak Washington dan Moscow saling berebut pengaruh dan menunjukkan superioritas atas satu sama lain, tidak hanya menyebarkan pengaruhnya di daratan Eropa tapi juga di benua lainnya untuk memperluas aliansi.¹⁶ Terbentuknya Aliansi Militer Strategis Persaingan AS dan Uni Soviet selama periode Perang Dingin mempengaruhi pandangan kedua negara tentang keamanan, militer dan pertahanan. Persaingan tersebut dapat dilihat dengan dibentuknya berbagai blok atau pakta pertahanan yang dipelopori oleh kedua negara super power tersebut. Pembentukan berbagai pakta pertahanan tersebut berdasarkan kepentingan geostrategis di berbagai kawasan yang berbeda.

Artinya, medan persaingan antara AS dan Uni Soviet tidak lagi berpusat di Eropa saja, tapi juga di kawasan Asia dan Pasifik. Namun, pakta pertahanan tersebut memiliki tujuan yang sama sebagai aliansi militer strategis untuk menjaga keamanan kedua negara beserta negara-negara yang bergabung dalam keanggotaannya. Beberapa pakta pertahanan yang terbentuk selama periode perang dingin diantaranya adalah NATO, SEATO, CENTO, ANZUS dan Pakta Warsawa. NATO North Atlantic Treaty Organization (NATO) terbentuk setelah ditandatanganinya North Atlantic Treaty pada 04 April 1949. Tujuan utama pembentukan pakta ini adalah untuk mengawal kebebasan dan keamanan negara-negara anggota baik dengan sarana politik maupun militer.¹⁷ Secara politis, NATO mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan mendorong konsultasi dan kerjasama berkenaan dengan isu-isu pertahanan dan keamanan untuk membangun kepercayaan, dalam jangka panjang untuk pencegahan konflik. Sedangkan secara militer, NATO berkomitmen untuk penyelesaian konflik secara

15 Anthony T.Bouscaren, *Op.Cit.*, hal. 121-122. 16 Joseph Frankel., *Op.Cit.*, hal. 77-78. 17 ‘North Atlantic Treaty Organization’, , [diakses 31 Oktober 2015] 8 damai. Jika usaha diplomasi gagal, NATO memiliki kapasitas mengambil tindakan atau melakukan operasi crisis-management secara

sendirian, dibawah mandat PBB atau bekerjasama dengan negara-negara lain.¹⁸ NATO menerapkan prinsip collective defense di mana setiap anggota NATO sepakat untuk saling melindungi terhadap serangan yang datang dari luar keanggotaan NATO.¹⁹ Serangan terhadap salah satu negara anggota NATO dianggap sebagai serangan terhadap negara-negara anggota NATO lainnya. Pembentukan pakta pertahanan ini disponsori oleh AS untuk membendung ancaman kekuatan militer Uni Soviet pada awalnya. Namun, dalam perjalanannya Perancis menyatakan menarik diri dari keanggotaan NATO.²⁰ Selama Perang Dingin, kekuatan NATO yang berpusat di Eropa mampu membendung sebagian ambisi Uni Soviet untuk mengejar proyek-proyek Komunisme dan memperluas aliansi militernya, bahkan sampai di Asia Tengah.²¹ NATO selalu mengikuti perkembangan kebijakan luar negeri Uni Soviet untuk menentukan respon secara politik dan militer. NATO juga terlibat dalam mengirimkan kekuatan militernya pada Perang Korea dibawah mandat PBB untuk memukul mundur Korea Utara. SEATO South-east Asia Treaty Organization (SEATO) dibentuk setelah ditandatanganinya pakta Manila (Manila Pact) pada September 1954 yang bermarkas di Bangkok. Pembentukan SEATO merupakan respon atas kekalahan dan penarikan diri Perancis dari Indochina

(Vietnam).²² Pakta pertahanan ini dibentuk karena adanya kekhawatiran penyebaran Komunisme di wilayah tersebut. Selain itu, SEATO dibentuk untuk membendung kekuatan Komunisme di Asia Tenggara. Kekuatan Barat khususnya AS berkepentingan dalam pembentukan pakta pertahanan ini. Walaupun SEATO dibentuk untuk melindungi Asia Tenggara agar tidak jatuh ke komunisme, secara geografis tidak semua anggota SEATO merupakan negara-negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara. Pembentukan SEATO ditandatangani oleh Australia, Inggris, Perancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, dan AS.²³ Sedangkan Malaysia, Indonesia, dan India menolak untuk bergabung dengan pakta pertahanan ini. Selain untuk membendung komunisme, motivasi keterlibatan negaranegara non-blok Barat, khususnya Pakistan, dalam keanggotaan SEATO adalah untuk mendapatkan paket bantuan pertahanan dan militer dari AS.²⁴ SEATO melibatkan diri dalam berbagai konflik internasional dan salah satunya adalah dalam Perang Vietnam. Namun, dalam perjalanannya negara-negara yang tergabung dalam SEATO tidak selalu satu suara dalam beberapa operasi militer. Kegagalan intervensi dalam krisis Vietnam dan Laos akhirnya meruntuhkan keyakinan anggotaanggotanya terhadap eksistensi SEATO, sampai kemudian bubar pada tahun 1977. CENTO AS

menyadari perlunya membangun aliansi pertahanan berdasarkan pertimbangan geostrategis. Pada tahun 1950-an, AS mengformulasikan pembentukan pakta pertahanan SEATO dan CENTO untuk mengamankan kawasan Asia dari ancaman komunisme.²⁵ AS 18 Ibid., 19 Ibid., 20 Ibid., 21 Karsten Jung, 'Willing or Waning? NATO's Role in an Age of Coalitions', , [diakses 31 Oktober 2015]. 22'Treaties and alliances - NZ and the Cold War', , [diakses 31 Oktober 2015]. 23 Ibid., 24 Lubna Saif, 'Pakistan and SEATO', dalam Pakistan Journal of History and Culture, Vol. XXVIII, No.2 (2007), hal. 79, , [diakses 31 Oktober 2015]. 25 Mussarat Jabeen and Muhammad Saleem Mazhar, 'Security Game: SEATO and CENTO as Economic and Military Assistance to Encircle Pakistan', dalam Pakistan Economic and Social Review, Volume 49, No.1 (Summer, 2011), hal.109, , [diakses 31 Oktober 2015]. 9 International Society, Vol. IV, No. 1, 2017 menyadari Uni Soviet menjadikan kawasan Asia sebagai proyek penyebaran agendaagenda komunisme. Central Treaty Organization (CENTO) secara khusus dibentuk pada 1955 untuk membendung Uni Soviet dan komunisme di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, CENTO bernama Middle East Treaty Organization (METO) dan juga dikenal dengan Baghdad Pact. Adapun negara-negara yang menandatangani pembentukan

CENTO adalah Irak, Iran, Pakistan, Turki dan Inggris. Amerika Serikat memang tidak masuk dalam pakta pertahanan ini pada awal pembentukannya. Namun, tekanan yang dilakukan AS dan janji ekonomi dan militer menjadi faktor yang penting dalam menyukseskan pembentukan CENTO. AS secara resmi baru bergabung dengan komite militer CENTO pada tahun 1958. Dalam perkembangan berikutnya, CENTO dianggap sebagai pakta pertahanan aliansi AS yang paling buruk. CENTO bubar pada tahun 1979. ANZUS Pakta pertahanan ANZUS dibentuk pada tahun 1951 melalui Canberra Talks dan merupakan formalisasi hubungan militer AS bersama Australia dan Selandia Baru.²⁶ Sebelum pembentukan pakta pertahanan ini, AS telah menjalin hubungan militer dengan kedua negara tersebut. ANZUS merupakan singkatan negara-negara inisiator pakta pertahanan ini yaitu Australia, New Zealand dan United States. Pembentukan ANZUS merupakan kompensasi bagi Australia dan Selandia baru atas keinginan AS melakukan normalisasi hubungan dengan Jepang pasca Perang Dunia II atau di awal-awal periode Perang Dingin. Normalisasi hubungan AS dengan Jepang juga mengarah pada recovery dan revitalisasi militer Jepang sebagai imbalan dari AS, karena AS ingin menempatkan pangkalan militernya di kepulauan Jepang.²⁷ Bagi Australia dan Selandia Baru, Jepang masih

dianggap sebagai ancaman di kawasan Pasifik sehingga membutuhkan jaminan keamanan dari AS. AS memberikan jaminan keamanan kepada Australia dan Selandia Baru dengan dibentuknya ANZUS. Seperti pakta pertahanan lainnya, ANZUS juga mengaplikasikan collective defence. Serangan terhadap salah satu anggota ANZUS akan dianggap sebagai serangan terhadap anggota ANZUS lainnya. Namun, bagi Amerika Serikat, ANZUS merupakan aliansi strategis untuk membendung penyebaran komunisme di kawasan Asia dan Pasifik. Keberadaan ANZUS dibutuhkan untuk menjaga stabilitas kawasan tersebut. Selain itu, Australia merupakan sekutu AS yang paling loyal dalam hampir setiap kebijakan luar negeri AS sehingga dapat diandalkan oleh AS.²⁸ Salah satu keikutsertaan ANZUS dalam krisis internasional adalah dalam Perang Vietnam. Pakta Warsawa Setelah terbentuknya NATO pada tahun 1949, Uni Soviet menggagas pakta pertahanan yang disebut Pakta Warsawa (Warsaw Pact) yang beranggotakan negara-negara Blok Timur atau komunis Eropa Timur. Pakta pertahanan ini dibentuk untuk menandingi kekuatan NATO dan melindungi keamanan Uni Soviet dan negara-negara anggotanya dari serangan luar. Secara khusus, pembentukan aliansi pertahanan ini dipicu dengan masuknya Jerman Barat ke dalam keanggotaan NATO.²⁹ Pakta Warsawa

dirancang oleh Perdana Menteri Uni Soviet (Nikita Khrushchev) dan Hirotsugu Umetu, 'The Birth of ANZUS: America's Attempt to Create a Defense Linkage Between Northeast Asia and the Southwest Pacific', , [diakses 31 Oktober 2015]. 27 Ibid., 28 William T. Tow, 'The Anzus Case Alliance Interests, Costs And Benefits in A 9/11 Context', dalam *Australian Army Journal*, Volume III, number 2, (March, 2006), hal. 28, , [diakses 31 Oktober 2015]. 29 'The History of NATO and Warsaw Pact', , [diakses 31 Oktober 2015]. 10 secara resmi dibentuk pada tahun 1955. Pakta pertahanan ini ditandatangani oleh negaranegara Komunis Eropa Timur (kecuali Yugoslavia) seperti Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia dan Rumania.³⁰ Selain untuk melindungi diri dari ancaman luar, pembentukan pakta pertahanan ini juga dimaksudkan untuk peningkatan kerjasama pertahanan dan militer antar negaranegara anggotanya. Latar belakang fundamental pembentukan Pakta Warsawa merupakan respon Uni Soviet terhadap remiliterisasi Jerman Barat setelah bergabung dengan NATO.³¹ Remiliterisasi Jerman Barat menimbulkan ketakutan dan ancaman bagi negara-negara Komunis Eropa yang merupakan sekutu Uni Soviet. Dengan keberadaan pakta pertahanan ini, Blok Barat memiliki alasan untuk tidak

menyerang salah satu anggota Pakta Warsawa. Dalam perkembangannya, seperti halnya Perancis yang menarik diri dari keanggotaan NATO, Hongaria mencoba keluar dari keanggotaan Pakta Warsawa tahun 1956. Namun, Uni Soviet melakukan invansi terhadap negara ini dengan tank dan senjata mesin.³² Terbentuknya Gerakan Non-Blok (GNB) Munculnya AS dan Uni Soviet sebagai kekuatan baru pasca Perang Dunia II telah mampu menarik negara-negara di dunia, khususnya Eropa ke dalam Blok Barat dan Blok Timur, di mana AS dan Uni Soviet adalah pimpinannya. Namun, Perang Dingin tidak hanya berimplikasi pada terbentuknya polarisasi dua kekuatan tersebut. Kekhawatiran negaranegara dunia ketiga terhadap persaingan ideologi dan militer AS-Uni Soviet memberikan inspirasi terbentuknya kekuatan baru di luar pusran polarisasi tersebut, yaitu Gerakan Non-blok (Non-Alligned Movement).³³ Gerakan Non-Blok dibentuk setelah diadakannya konferensi Asia Afrika di Bandung, Indonesia pada tahun 1955. Gerakan Non-Blok dimotori oleh Indonesia, India, Mesir, Ghana dan Yugoslavia. Gerakan ini umumnya beranggotan negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin. Selain menghindari aliansi dengan Blok Barat dan Blok Timur, gerakan ini juga bertujuan untuk menentang kolonialisme, neo-kolonialisme dan dominasi Barat.³⁴ Pembentukan Gerakan Non-Blok berupaya untuk

membuka jalan bagi politik dunia yang independen tanpa komando dan dominasi AS dan Uni Soviet. Walau demikian, pengaruh AS dan Uni Soviet ternyata mampu menembus kebijakan negara-negara anggota GNB. Ini disebabkan negara-negara tersebut memiliki ketergantungan terhadap keberadaan kedua super power tersebut, terutama berkaitan dengan ekonomi dan militer.³⁵ Walaupun demikian, keberadaan GNB secara umum telah memberikan pengaruh terhadap sistem politik internasional selama periode Perang Dingin, berkaitan dengan kerjasama politik dan diplomasi. Selain itu, dunia ketika era Perang Dingin sebenarnya menjadi terbagi ke dalam tiga kelompok. Amerika Serikat memimpin Blok Barat dengan sistem politik liberalisme-demokrasi. Uni Soviet memimpin Blok Timur dengan sistem politik komunisme. Kelompok ketiga adalah negara-negara yang tidak ingin terikat pada Amerika Serikat ataupun Uni Soviet yang tergabung dalam GNB. Runtuhnya Uni Soviet dan Munculnya Negara-negara Baru. Perang Dingin berakhir pada tahun 1991 ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet. ³⁰ Ibid., ³¹ N.Wagner, 'NATO and the Warsaw Pact', dalam *Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies*, Vol 8, Nr 4, (1978), hal. 41, , [diakses 31 Oktober 2015]. ³² 'The History of NATO and Warsaw Pact', *Op.Cit.*, ³³ 'The Non-Aligned Movement: Description and

History', , [diakses 31 Oktober 2015]. 34 Ibid., 35 Gabor Bur, *Hungarian Diplomacy and the Non-Aligned Movement in the Cold War*, Budapest: Universität Wien, 2010, hal.353-354, , [diakses 31 Oktober 2015]. 11 *International Society*, Vol. IV, No. 1, 2017 Keruntuhan Uni Soviet ini mengakibatkan perubahan geopolitik di berbagai kawasan, khususnya di Eropa. Begitu pula dengan politik global di mana AS kemudian dianggap menjadi pemenang dengan ideologi liberalisme-demokrasi-nya. Sistem politik dunia yang bipolar berubah menjadi unipolar. Uni Soviet runtuh dan terpecah menjadi beberapa negara di mana Rusia mewarisi pemerintahan dan kekuatan Uni Soviet yang masih tersisa. Sedangkan negara-negara bekas reruntuhan Uni Soviet menjadi negara-negara baru yang merdeka seperti Lithuania, Estonia, Latvia, Moldova, Belarus, Ukraina, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan dan Kirgistan.³⁶ Negara-negara ini umumnya berada di kawasan Eropa Timur. Semua negara-negara baru pecahan Uni Soviet melepaskan diri dari Komunisme sebagai akibat terjadinya pergantian rezim-rezim komunis dengan rezim-rezim demokratis. Walaupun demikian, pengaruh Rusia masih cukup besar terhadap negaranegara tersebut. Dengan keberadaan negara-negara pecahan Uni Soviet ini menambah jumlah negara-negara berkembang atau negara-

negara dunia ke-tiga. Simpulan AS dan Uni Soviet menjadi dua kekuatan baru setelah perang Dunia II. Perbedaan pandangan dalam rekonstruksi Jerman dan Eropa pasca kekalahan Nazi Jerman, berimbas pada persaingan ideologi, politik dan militer. Persaingan ini menyebabkan terjadinya polarisasi kekuatan dunia. Persaingan yang kemudian menjadi ketegangan AS-Uni Soviet tidak hanya terjadi di kawasan Eropa, tapi juga di kawasan benua lainnya. Polarisasi kekuatan dunia antara AS dan Uni Soviet tersebut mendorong terbentuknya NAM atau GNB yang menjadi aktor dalam sistem politik internasional dalam periode Perang Dingin. Dalam konteks high politics, AS dan Uni Soviet, bersama sekutu-sekutu mereka berupaya untuk menjaga keamanan nasional atau kedaulatan dari ancaman salah satu pihak dengan membentuk aliansi-aliansi pertahanan. Kekuatan militer dan kerjasama militer menjadi pilihan rasional untuk mewujudkan hal tersebut di tengah-tengah sistem internasional yang anarkis. Namun, runtuhnya Uni Soviet memberikan konsekuensi munculnya negara-negara baru di Eropa. Keruntuhan Uni Soviet dan hadirnya AS sebagai pemenang Perang Dingin merubah peta geopolitik di berbagai negara dan kawasan di dunia. Dengan kata lain, Perang Dingin dibawa oleh ke-dua super powers tersebut ke berbagai wilayah dunia dalam bentuk krisis-krisis dan kemudian mampu

mempengaruhi sistem politik internasional dalam hal politik (munculnya polarisasi politik ideologis), keamanan (terbentuknya berbagai aliansi pertahanan strategis dan perlombaan persenjataan nuklir) dan kedaulatan negara (munculnya negara-negara berdaulat baru). REFERENSI Buku dan jurnal Bouscaren, Anthony T., *Is the Cold War over?; A New Look at Communist Imperialism*, USA, The Capitol Hill Press, 1973. Bur, Gabor., *Hungarian Diplomacy and the Non-Aligned Movement in the Cold War*, Budapest, Universität Wien, 2010, Burr, William, 'The Nixon Administration, the Horror Strategy and the Search for Limited Nuclear Options, 1969-1972', dalam *Journal of Cold War Studies*, Vol.7, Issue 3, Summer 2005, Frankel, Joseph. *International Politics; Conflict and Harmony*, London: Cox and Wyman, Ltd., 1969. 36 Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty., *Op.Cit.*, hal. 231. 12 Jabeen, Mussarat and Muhammad Saleem Mazhar, 'Security Game: SEATO and CENTO as Economic and Military Assistance to Encircle Pakistan', dalam *Pakistan Economic and Social Review*, Vol. 49, No.1, Summer 2011, Kalinovsky, Artemy, 'Decision-Making and the Soviet War in Afghanistan: From Intervention to Withdrawal', dalam *Journal of Cold War Studies*, Vol.11, Issue 4, Fall, 2009, Mansbach, Richard W dan Kirsten L. Rafferty., *Pengantar Politik Global*,

Edisi Terjemahan, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2012. N. Wagner, 'NATO and the Warsaw Pact', dalam *Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies*, Vol. 8, No. 4, 1978, Robertson, Charles L. *International Politics Since World War II; A Short History*, 2nd Edition, USA: John Wiley & Sons, Inc, 1975. Saif, Lubna., 'Pakistan and SEATO', dalam *Pakistan Journal of History and Culture*, Vol. XXVIII, No.2, 2007, Schuman, Fredrick L., *International Politics; The Western State System and the World Community*, Sixth Edition, USA, McGraw-Hill Company, Inc, 1958. Tow, William T., 'The Anzus Case Alliance Interests, Costs And Benefits in A 9/11 Context', dalam *Australian Army Journal*, Volume III, No. 2, March, 2006, Tierney, Dominic, 'Pearl Harbor in Reverse; Moral Analogies in the Cuban Missile Crisis', dalam *Journal of Cold War Studie*, Vol. 9, Issue 3, Summer, 2007, Media internet Jung, Karsten., 'Willing or Waning? NATO's Role in an Age of Coalitions', , (diakses 31 Oktober 2015). Umetsu, Hiroyuki., 'The Birth of ANZUS: America's Attempt to Create a Defense Linkage Between Northeast Asia and the Southwest Pacific', , (diakses 31 Oktober 2015). 'North Atlantic Treaty Organization', , (diakses 31 Oktober 2015). 'The History of NATO and Warsaw Pact', , (diakses 31 Oktober 2015). 'The Non-Aligned Movement:

Description and History', , (diakses 31 Oktober 2015) 'Treaties and alliances - NZ and the Cold War', , (diakses 31 Oktober 2015) 'Uni Soviet Blokade Berlin', , (diakses 29 Oktober 2015).

5.2 Kekalahan Jerman

Latar Belakang Perang Dingin (Cold War) merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan peta politik dunia Pasca Perang Dunia II, yang secara umum dapat dikatakan berakhir pada tahun 1945. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II memunculkan struktur perimbangan kekuatan baru dalam politik internasional. Keseimbangan bipolar yang ditandai dengan pembagian blok yang kentara dalam politik internasional yakni antara Blok Timur yang dikomandani Uni Soviet (US) dan Blok Barat yang dikomandani Amerika Serikat (AS). Dominasi kedua kutub Uni Soviet dan Amerika Serikat ini menyebabkan hubungan internasional sangat dipengaruhi oleh kepentingan kedua negara tersebut. Hampir seluruh negara-negara di dunia kemudian terseret atau terpengaruh oleh pola keseimbangan ini. Misalnya Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1953 yang menjadi perang yang dimandatkan artinya Korea Selatan dan Korea Utara yang sama-sama mempunyai sekutu yakni Korea Selatan yang

bersekutu dengan Amerika Serikat dan Canada sedangkan Korea Utara dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet. Padahal belum ada sumber yang jelas mengenai mengapa Perang Korea terjadi sehingga banyak keseimbangan yang terdiri dari dua kubu yang sama kuat yakni AS dengan kapitalismenya dan US dengan komunismenya. Bipolar ini kental dengan balance of power di antara dua kubu tersebut. Akibatnya setiap tindakan sebuah negara dari masing-masing kubu pasti dipengaruhi oleh keseimbangan kekuasaan tersebut. (Passah Kaunang. 2010. Doktrin Bush dan Doktrin Obama dalam Tinjauan. [www.scribd.com/doc/29446601/doktrin.](http://www.scribd.com/doc/29446601/doktrin)) Perang Korea. <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4137068.html>. diakses tanggal 8 juli 2010.

Sejarawan yang mengatakan bahwa Perang Korea tersebut adalah penunjukan kekuatan antara blok liberal Amerika Serikat dan blok komunis Uni Soviet, yang menarik adalah aktor-aktor perang Korea yang terlibat adalah sama-sama anggota PBB akan tetapi PBB mengalami kebuntuan dalam menyelesaikan konflik tersebut.³ Walaupun konflik bipolaritas ini menyebar keseluruh penjuru dunia, Eropa masih merupakan jantung dari pertikaian atau persaingan kekuatan bipolar ini. Eropa menjadi pusat ketegangan Perang Dingin karena di benua inilah sebagian besar kekuatan militer kolektif

kedua Blok yang saling bersaing dipusatkan di benua ini. Uni Soviet menggelar kekuatan nuklirnya mengancam Negara-negara liberal demokratis di Eropa Barat sementara Negara-negara Eropa Barat dengan bantuan AS, mengimbangi dengan cara yang sama. Sebagaimana diketahui bahwa guna menyeimbangkan kekuatan pada masa Perang Dingin, AS adalah pendukung dan penggerak utama dalam North Atlantic Treaty Organization (NATO) yaitu organisasi keamanan bersama negara-negara di kawasan Atlantik Utara dalam menghadapi kemungkinan adanya ancaman serius dari Negara-negara Blok Timur yang dikomandani oleh Uni Soviet.⁴ NATO didirikan pada tahun 1949 dan ditandatangani di Washington DC pada 4 april 1949.⁵ NATO didirikan oleh Belgia, Canada, Denmark, Perancis, Islandia, Italia, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Pasal yang menarik dalam proses kerjasama NATO ini yaitu para anggotanya. Perang Dingin Antara Blok Barat dan Blok Timur. 2010. perang-dingin-antara-blok-baratdan.html Diakses tanggal 24 Januari 2010 ⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/NATO#column-one> diakses tanggal 27 januari 2010 ³.

Apabila salah satu anggota yang di Eropa maupun Amerika Utara yang mengalami serangan bersenjata maka akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota NATO.⁶

Pasal ini diberlakukan agar anggota Pakta Warsawa⁷ melancarkan serangan terhadap para sekutu Eropa Barat, hal tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota, akan tetapi hal ini tidak menjadi kenyataan. Disamping mencegah meluasnya kekuatan Uni Soviet dengan NATO, Amerika Serikat juga menggunakan Doktrin Truman (1947) dan Marshall Plan untuk membendung luasnya pengaruh komunis. Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman yang menjabat pada masa itu menyampaikan doktrinnya yang kemudian dikenal dengan Doktrin Truman. Doktrin Truman ini menjadi pedoman politik luar negeri AS untuk 40 tahun berikutnya. Isi dari doktrin ini adalah Policy of Containment yakni membendung atau mengisolasi Uni Soviet secara politik dan ideologi, dan AS akan menghadang komunisme dimanapun di seluruh dunia.⁸ Pada bulan Juni 1947, AS menyusun Marshall Plan yang dirancang oleh Menteri Luar Negeri AS, George Marshall sebagai bagian dari kebijakan untuk membendung upaya Uni Soviet dalam mempengaruhi negara-negara Eropa yang sedang dalam kesulitan finansial.

Pakta warsawa adalah sebuah aliansi militer negara-negara Blok Timur di Eropa Timur yang bertujuan mengoperasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Pakta warsawa ditanda tangani pada 14 Mei

1955 dan berakhir pada 31 Maret 1991 dan di akhiri secara resmi dalam sebuah pertemuan di Praha pada 1 Juli 1991. 8 Perjanjian dan Kebijakan Setelah PD II. 2008. yamaco.wordpress.com/2008/06/18/per... diakses tanggal 19 Juli 2010. 9 Ibid., 4 Berakhirnya Perang Dunia II menyisakan dampak krisis di negara-negara Eropa. Pada tanggal 9 Mei 1950 Menteri Luar Negeri Perancis Robert Schuman mengemukakan ide-ide bagaimana memulihkan krisis tersebut di negara-negara Eropa yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Schuman. Deklarasi Schuman ini merupakan pijakan awal bagi upaya penciptaan keberhasilan integrasi Eropa saat ini.¹⁰ Kemudian Ide tersebut tertuang dalam pembentukan “European Coal and Steel Community (ECSC)” yang ditandatangani pada tanggal 18 April 1951. ECSC ini dibentuk oleh 6 negara pioneer yaitu Prancis, Belanda, Belgia, Luxemburg, Italy, dan Jerman.¹¹ Setelah terbentuknya ECSC, ke enam negara tersebut sepakat untuk memperluas integrasi Eropa ke semua bidang ekonomi yakni pada tanggal 25 Maret 1957 melalui Traktat Roma membentuk European Economic Community “EEC” dengan prinsip menuju terciptanya “Common Market (CM)” adalah tahap integrasi wilayah atau negara-negara dimana pergerakan barang, jasa, modal dan penduduk dibebaskan secara bertahap sampai tidak ada lagi

hambatan.¹² Sampai saat ini proyek “CM” masih dalam tahap penyempurnaan, artinya pergerakan barang dagang, jasa, modal dan orang Eropa belum sepenuhnya bebas untuk semua negara anggota. Tahun 1973 merupakan tahun pertama ekspansi Uni Eropa dari 6 anggota menjadi 9 anggota dengan bergabungnya Denmark, Irlandia, dan Inggris. Setelah itu, ada Schengen Agreement yang ditandatangani oleh Belanda, (Peni Hanggarini. 2002. Fenomena Integrsi Eropa (Catatan Hari Eropa, 9 Mei). Koran Tempo 10 Mei 2002 11 http://www.data/uni_eropa/Sejarah « KAJIAN EROPA.htm diakses tanggal 27 januari 2010 12 Ibid., 5 Belgia, Jerman, Luksemburg dan Perancis. Dalam perjanjian ini juga kemudian diperluas dengan memasukkan Portugal Spanyol (1991), Yunani (1992).¹³ Disamping itu, dengan berakhirnya Perang dingin pada saat runtuhnya Uni Soviet yang ditandai pula bubarnya Pakta Warsawa pada 31 maret 1991, menyebabkan posisi NATO sebagai “Defender Of Europe” menjadi semakin kuat karena tidak ada lagi kekuatan militer yang mengancam.¹⁴ Kemudian, Negaranegara Uni Eropa sepakat memperkuat integrasi melalui penandatanganan Traktat Maastricht pada 7 februari 1992, melalui traktat ini, Uni Eropa berhasil menetapkan aturan main untuk rencana mata uang tunggal, komunitas kerjasama luar negeri dan kerjasama di bidang

keamanan dan peradilan. Ini sekaligus menjadi moment perubahan Masyarakat Ekonomi Eropa menjadi Uni Eropa.¹⁵ Traktat Maastricht ini sekaligus mengakhiri dominasi keamanan pertahanan Atlantik (NATO) dengan pilar AS, dan mengubahnya kepada mekanisme pertahanan keamanan Eropa dengan pilar Eropa Barat. Penting untuk dicatat bahwa dalam tataran intra-Eropa Barat sendiri terjadi silang pendapat mengenai visi keamanan Eropa yang independen, hal ini terbukti dalam proses pembentukan Traktat Maastricht itu sendiri, di mana Perancis menolak mentahmentah kehadiran AS dalam sidang dan posisi yang akan dijabatnya sebagai Observer bagi komunitas keamanan Eropa, Jerman berada di pihak Perancis, sedangkan Inggris walaupun mendukung pembentukan komunitas keamanan Eropa tetap tidak mau menghapus peranan AS di dalamnya.

Pada Juni 1992, muncullah Deklarasi Petersberg yang menyatakan peran Eropa Barat sebagai pemegang tanggung jawab pertama dan utama dalam komunitas keamanan Eropa, terutama dalam hal ‘conflict prevention’ dan ‘conflict management’.¹⁶ Dengan adanya traktat-traktat yang terus di amandemen menunjukkan bahwa Uni Eropa bergerak secara dinamis. Salah satunya contohnya adalah keberadaan Uni Eropa yang makin solid. Seiring dengan perkembangan, Uni

Eropa mengalami enlargement hingga kini telah beranggotakan 27 negara termasuk Slovakia, Ceko, dan Slovenia yang merupakan pecahan Negara Uni Soviet. Keanggotaan UE sendiri terbuka bagi setiap negara Eropa yang ingin menjadi anggota dengan dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu pertama, negara yang bersangkutan harus berada di benua Eropa, dan kedua, negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, penghormatan HAM dan menjalankan segala peraturan perundangan UE (*acquis communautaires*).¹⁷ Kini Uni Eropa, dengan semboyan *freedom, peace, and prosperity* telah menjadikan dirinya sebagai aktor global penting dunia. Integrasi mempunyai arti penting terhadap perekonomian negara-negara Eropa yaitu meningkatkan perkembangan di setiap sektor negara Eropa baik sektor ekonomi, agraris, politik, sosial budaya, pariwisata dan hukum. Hal ini yang menyebabkan Uni Eropa merupakan organisasi regional yang paling berkembang dan maju. Integrasi ini (Laily Fitry. 2008. *European Union Strategy of Defence*. simplyrealist.wordpress.com/.../european-union-strategy-of-defence/. Diakses tanggal 16 Juni 2010. ¹⁷ Kajian Eropa. 2010).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis adalah "Bagaimana

Dampak Perkembangan atau Perluasan keanggotaan Uni Eropa ke Eropa Timur bagi Keamanan Kawasan Eropa?”. Tujuan dan Manfaat Penelitian apa saja, Tujuan Penelitian 1. Mengetahui dinamika perluasan Uni Eropa terutama proses perluasan hingga ke negara-negara bekas Uni Soviet di Eropa Timur 2. Mengetahui dampak perluasan keanggotaan Uni Eropa bagi keamanan kawasan Eropa secara keseluruhan. Manfaat Penelitian Kajian penelitian ini menjadi salah satu upaya untuk menunjukkan perkembangan regionalisme dan integrasi Eropa hingga dewasa ini. Keberhasilan Uni Eropa menciptakan kestabilan regionalnya dimulai dari Eropa Barat pasca Perang Dunia ke II menjadi contoh bagi banyak upaya regionalisme lain termasuk ASEAN. Secara akademis kajian ini akan bermanfaat memperkuat pandangan terhadap upaya-upaya kerjasama regional yang akan berdampak positif bagi perdamaian dan kestabilan kawasan. Penelitian Terdahulu Sebelum penulis melakukan penelitian fenomena ini, telah ada penelitian yang dilakukan oleh Kartika Devi dalam tulisannya mengenai bagaimana penanganan wabah Avian Influenza di Uni Eropa dengan ditinjau dari perspektif Human Security, dalam tulisannya keamanan tidak lagi diartikan sempit sebagai hubungan konflik atau perang antar negara, tetapi juga berpusat untuk keamanan masyarakat. Kajian keamanan tidak hanya

diartikan sebagai perlombaan senjata akan tetapi meluas pada aspek keamanan yang berkaitan dengan isu ketahanan pangan, kesehatan, lingkungan hidup, perdagangan manusia, narkoba, terorisme, bencana alam dan sebagainya. Dalam perluasan isu keamanan ini, kajian keamanan tidak hanya diwarnai keamanan Negara melainkan dapat menyangkut keamanan manusia (human security).

Keamanan negara tidak hanya muncul dari ancaman militer negara lain, akan tetapi bisa dari virus yang menyebabkan kematian dalam jumlah besar serta terjadi di banyak Negara. Untuk itu rasa aman tidak dapat diukur dari canggih atau tidaknya persenjataan melainkan ukuran-ukuran lain yang lebih merujuk pada aspek keamanan manusia. Hasil penelitian tersebut Uni eropa sangat tanggap dengan masalah yang berkaitan dengan human security terutama dalam menangani virus flu burung, karena virus ini menyerang ke level manusia sehingga butuh penanganan yang intensif dari Uni Eropa. (Kartika Devi. 2010. Bagaimana Penanganan Wabah Avian Influenza di Uni Eropa Berdasarkan Perspektif Human Security.Lab.HI.UMM.Unpublished).

Dalam hal ini penulis mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kartika Devi, tetapi penulis menempatkan lebih pada bagaimana implikasi perluasan keanggotaan Uni Eropa

terhadap keamanan kawasan Eropa. Asumsinya adalah semakin meluasnya keanggotaan uni eropa maka rasa aman yang ditimbulkan oleh new nation yaitu Uni Eropa, kawasan Uni Eropa akan meminimalisir ancaman-ancaman yang timbul seperti kejahatan terorganisir, narkoba,teroris atau bahkan perang antar negara di kawasan uni eropa seperti yang terjadi pada perang dunia I dan Perang dunia II. Uni Eropa yang semakin solid akan mempermudah proses kerjasama di segala bidang, terutama keamanan. Selain penelitian diatas, ada juga yang meneliti tentang masalah perluasan keanggotaan uni eropa yakni Nendra Primonik dengan judul “Masalah Perluasan Keanggotaan: Politisasi Konstitusi Eropa”. Dalam penelitiannya, Nendra lebih menjelaskan tentang penambahan jumlah anggota membawa keuntungan dan dilema bagi uni eropa. Di satu sisi, keinginan negara-negara baru untuk bergabung dengan uni eropa merupakan salah satu bukti keberhasilan uni eropa sebagai sebuah institusi supranasional. Dengan tingginya keinginan untuk bergabung, berarti uni eropa telah dipercaya sebagai sebuah regionalisme yang settled di kawasan eropa. Hal ini juga membawa dampak positif bagi integrasi eropa secara keseluruhan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah anggota juga membawa berbagai dampak negatif. Anggota baru yang bergabung, secara logis akan

mempengaruhi proses governance uni eropa. Anggota baru harus melakukan penyesuaian diri dengan institusi-institusi yang ada di dalamnya. Institusi, merupakan pilar kerja uni eropa selama ini. Bila negara-negara baru tidak 10 berhasil menyesuaikan diri dengan rules of procedure yang berlaku dalam berbagai institusi uni eropa, maka stabilitas uni eropa akan terganggu. Masalah ekonomi juga menjadi salah satu pertimbangan. Dengan jumlah negara anggota yang semakin meningkat, uni eropa harus lebih berhati-hati dalam mengatur perekonomiannya. Ketimpangan ekonomi antar anggota dapat mengarah pada krisis ekonomi.

Penelitian yang dilakukan penulis sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nendra Primonik hanya yang membedakan yaitu penelitian Nendra Primonik lebih melihat pada bagaimana keuntungan dan dilemma perluasan uni eropa bagi uni eropa itu sendiri, sedangkan penelitian penulis lebih melihat pada dampak perluasan keanggotaan uni eropa terhadap keamanan eropa.

Konsep Integrasi Regional Proses memecahkan masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian, memerlukan suatu kerangka konsep yang membantu penulis dalam penyusunan penjelasan yang tepat. Selain itu kerangka konsep sebagai sarana kerangka berfikir juga dibutuhkan agar penelitian

memiliki fokus yang jelas dalam menganalisa suatu fenomena. Sebelum penulis menyajikan beberapa konsep perlu diperhatikan definisi konsep terlebih dulu. Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu.

Konsep regionalisme atau disebut dengan konsep kawasan, merupakan konsep dari hubungan internasional yang dapat menjelaskan tentang kerjasama

Nendra Primonik. 2010, menjelaskan Masalah Perluasan Keanggotaan: Politisasi Konstitusi Eropa. [http://Politik.Kompasiana.com/2010/06/19/Masalah Perluasan Keanggotaan Politisasi Konstitusi Eropa](http://Politik.Kompasiana.com/2010/06/19/Masalah%20Perluasan%20Keanggotaan%20Politisasi%20Konstitusi%20Eropa). Diakses Tanggal 02 Agustus 2010. 20 Mohtar Mas' oed. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. LP3ES: Jakarta. Hal:93.

Tujuan utama regionalisme adalah untuk memperkuat jaringan ekonomi bisnis, politik, dan kepentingan regional. Beberapa teoritis yang mengklasifikasikan suatu kawasan dalam lima karakteristik. Pertama Negara-negara yang tergabung dalam suatu kawasan memiliki kedekatan geografis. Kedua, mereka memiliki pula kemiripan sosiokultural. Ketiga, terdapatnya kemiripan sikap dan tindakan politik seperti yang tercermin dalam organisasi internasional. Keempat, kesamaan anggota dalam organisasi internasional. Dan terakhir, adanya

saling ketergantungan ekonomi yang diukur dari perdagangan luar negeri sebagai bagian dari proporsi pendapatan nasional.

Kerjasama antar negara-negara yang berada dalam suatu kawasan untuk mencapai tujuan regional bersama adalah salah satu tujuan utama mengemukanya Regionalisme.²² Menurut Andrew Hurrell, Regionalisme dibedakan ke dalam lima kategori, salah satu kategori dari regionalisme yaitu, kerjasama antar negara dalam kawasan (*regional interstate co-operation*), merupakan kerjasama yang dibentuk untuk beberapa tujuan tertentu, seperti upaya menghadapi tantangan eksternal serta melakukan koordinasi terhadap kondisi regional dalam lembaga-lembaga internasional maupun dalam perundingan-perundingan Internasional.

Pendukung pendekatan regional menemukan bahwa dalam satu region lebih mudah diciptakan organisasi kerjasama yang lebih efektif karena negara- (Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani. 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hlm 108 22 Ibid., 23 T. May Rudy. 2002. *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung : PT Refika Aditama. Hal 84. 12 negara yang ada di dalamnya secara relatif memiliki kemiripan dalam hal kultural, ekonomi, politik, dan geografik.

Untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada dibutuhkan suatu integritas yang mengikat yang mana didalamnya negara-negara tersebut memiliki kesamaan visi dan misi dan untuk mewujudkannya cukup sulit karena untuk bisa memenuhinya. negara-negara Eropa mampu membentuk suatu integritas karena sebagian besar negaranya masuk dalam kategori negara maju baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya. Asumsi-asumsi yang mendasari studi tentang studi integrasi regional: (1) Dalam literatur Ilmu Sosial dan Humaniora, baik yang filosofis maupun empirik, terdapat satu tema umum bahwa permusuhan antarmanusia akan berakhir kalau saja memiliki kesamaan. (2). Transaksi yang semakin banyak dan pada tingkat tinggi diantara banyak unit akan menimbulkan cross-presure. Cross-presure ini merupakan penghalang terhadap timbulnya konflik karena presure itu menghindarkan kedua pihak yang bersengketa dari kemungkinan saling berhadapan secara langsung pada banyak isu (3). Suatu sistem (sub-sistem) internasional yang terintegrasi akan menyerupai negara-negara sejauh tindak kekerasan bisa dikendalikan didalam system yang dipilih atau ditunjuk menjadi pengelola. (Mohtar Mas'oed 1992. Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisa dan Teorisasi. Yogyakarta : Pusat

Antar Universitas – Studi Sosial UGM. (Hal 182). 25 Mohtar Mas'oeid. 1990. Op.cit. Hal:151-152.

Proses panjang integrasi Uni Eropa sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang dan terjadi tarik ulur yang kuat. Diawali dengan ide yang tertuang dalam terbentuknya “European Coal and Steel Community” yang ditandatangani pada tanggal 18 april 1951.²⁶ Integrasi mempunyai arti penting dalam ekonomi maupun keamanan di kawasan eropa, dalam mewujudkan kawasan Eropa yang dapat meminimalisir ancaman. Konsep integrasi sendiri telah didefinisikan secara berbeda oleh para penstudi HI, seperti Karl Deutsch yang mendefinisikan integrasi sebagai, “turning previously separate entities into components of a coherent system” (perubahan beberapa entitas berbeda menjadi komponen suatu sistem yang koheren), atau Robert Keohane dan Joseph Nye yang menyebut integrasi sebagai, “any level of association between actors” (semua tingkat asosiasi yang terjadi di antara aktor-aktor).

Andrew Moravcsik dalam karyanya yang berjudul “The Choice for Europe: Social Purpose and State Power”, mengembangkan Teori Intergovernmentalisme-Liberal. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1998. Dalam teorinya Moravcsik berasumsi bahwa tuntutan bagi integrasi muncul dari proses politik domestik, sementara hasil integrasi yang

tertuang dalam berbagai bentuk kerjasama, persetujuan, dan kebijakan bersama, timbul dari proses negosiasi. (KAJIAN EROPA. 2010. Op.cit., 27 Laily Fitry. Evolusi Common Foreign and Security Policy (CFSP) Dalam 50 Tahun Integrasi Uni Eropa. (Studi terhadap pembentukan CFSP melalui Teori Intergovernmentalisme-Liberal Andrew Moravcsik). simplyrealist.wordpress.com/diconoclastic.../realm-of-the-real/-.Diakses tanggal 16 Juni 2010. 14 intergovernmental (antar pemerintah).

5.3. Indikator-Indikator Integrasi ialah :

- a) Pengambilan keputusan yang otonom, adanya transformasi kedaulatan dari negara-negara anggota pada permasalahan tertentu yang disepakati untuk diserahkan pada mekanisme independen diluar Negara institusi Uni Eropa, berpusat pada pemerintahan, yang mana sifatnya independen.
- b) Ko-operasi: selalu mengutamakan kerjasama dalam segala bidang
- c) Harmonisasi: terciptanya keselarasan antara keputusan di dalam negeri dan keputusan yang muncul dari institusi antar negara Uni Eropa didalam Uni Eropa. Dengan adanya aturan-aturan dalam konstitusi Uni Eropa, Negara-negara Uni Eropa dapat menjalin kerjasama yang lebih erat dan

meminimalisir ancaman. Integrasi Uni Eropa berdampak pada keamanan kawasan Uni Eropa yang lebih dinamis. Argumen Dasar Semakin meluasnya keanggotaan Uni Eropa akan meminimalisir ancaman-ancaman yang timbul seperti kejahatan terorganisir, narkoba, teroris atau bahkan perang antar negara di kawasan Uni Eropa seperti yang terjadi pada perang dunia I dan Perang dunia II. Uni Eropa yang semakin solid akan mempermudah proses kerjasama di segala bidang, terutama keamanan. (Menurut Yan San Yi, asisten Profesor Departemen urusan internasional Wenzao Ursuline College of languages, Kartila Devi, Skripsi, (unpublished), Laboratorium Jurusan HI UMM, 2010).

Variabel Penelitian Dari penelitian ini, Dampak perluasan Uni Eropa ke Eropa Timur sebagai unit eksplanasi atau variable independen dan keamanan kawasan Eropa sebagai unit analisa atau variabel dependen.

Tipe Penelitian Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah menyajikan satu gambar yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting social atau hubungan.

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui studi pustaka dan

sumber-sumber berita yang terkait dengan obyek penelitian. Dimana dalam hal ini, melalui data-data yang diperoleh oleh penulis dari bukubuku, artikel-artikel dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Penulis akan menjelaskan Bagaimana Dampak Perkembangan atau Perluasan Uni Eropa ke Eropa Timur bagi Keamanan Kawasan.

Teknik Analisa Data Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Analisa data yang menyangkut kegiatan reduksi, penyajian data dan menarik kesimpulan. Langkah melakukan reduksi data meliputi kegiatan memilih data yang relevan dengan tujuan dan tema penelitian, menyederhanakan data dengan tanpa mengurangi maknanya atau bahkan membuang data yang sekiranya 16 memang tidak dibutuhkan. Data terpilih kemudian akan dipahami dan kemudian dijelaskan melalui pemahaman intelektual yang logis.

Ruang Lingkup Penelitian Dalam penelitian ini diperlukan adanya ruang lingkup penelitian, tujuannya adalah agar pembahasan masalah berkembang ke arah sasaran yang tepat dan tidak keluar dari kerangka permasalahan yang ditentukan. Adapun batasan materi dari penelitian ini adalah dari awal pembentukan Uni Eropa hingga Uni Eropa beranggotakan 27 Negara (2007).

5.4 Sejarah Proxy War

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sifat dan karakteristik perang telah bergeser, dimana saat ini kemungkinan terjadinya perang konvensional antar dua negara semakin kecil. Perang masa kini yang terjadi dan perlu diwaspadai oleh Indonesia salah satunya adalah Perang Proxy (Proxy War). Proxy War tidak melalui kekuatan militer, tetapi perang melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik melalui politik, ekonomi, sosial dan budaya termasuk bidang lainnya. Hal inilah yang akan dihadapi oleh Bangsa Indonesia ke depan.

Peperangan masa depan adalah salah satu corak perang dalam spektrum konflik yang telah kita kenal. Perang ini merupakan satu cara perang yang relatif baru yang akan selalu dikembangkan. Peperangan masa depan ini bersifat total dimana segala cara dan sarana dibenarkan untuk mencapai tujuan. Ini sesuai dengan teori yang dikatakan Mao Tse Dong untuk mencapai tujuan perang segala cara dan sarana dapat saja dilakukan tanpa mengindahkan moral dan berkembangnya kebencian. Yang jelas peperangan masa depan ini tidak mempunyai pola yang sama, tidak mempunyai front dan tidak kaku seperti perang konvensional. Perang konvensional mengandalkan kecanggihan mesin dan teknologi perang yang

cenderung membutuhkan biaya yang tidak sedikit maka kemudian lahir konsep perang baru yang mengandalkan taktik dan strategi perang yang dikenal dengan perang Proxy. Perang Proxy atau Proxy War adalah sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Lampiran Keputusan Kabadiklat Kemhan Nomor : KEP/ 1016 / XI /2020 Tanggal : 25 November 2020 c. Peperangan.

Peperangan masa depan secara umum menggunakan strategi perang non konvensional dan menjadikannya sebagai upaya yang efektif dalam mencapai tujuannya. Melihat kenyataan ini maka sudah semestinya pemahaman terhadap seluk beluk peperangan masa depan perlu diketahui secara mendalam. Apabila hal ini tidak kita lakukan atau dengan kata lain kita selalu hanya berpikir tentang perang konvensional saja, maka kita akan dapat dikalahkan oleh lawan yang menggunakan strategi peperangan masa depan (Proxy War). Oleh karenanya perlu pengembangan paradigma berfikir global peserta Diklat Kader Bela Negara di tengah ancaman berupa modus perang baru (Proxy War) dalam menangkal segala bentuk ancaman, gangguan maupun hambatan yang

merongrong keutuhan Bangsa dan Negara. Naskah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pengetahuan tentang peperangan masa depan dan perkembangannya sebagai pembekalan dalam kegiatan Diklat Bela Negara.

5.5 Maksud dan Tujuan Proxy War

Maksud Paket Instruksi ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang Proxy War dan menghadapi peperangan masa depan dengan strategi dan cara menghadapi menghadapi peperangan masa depan (Proxy War).

Tujuan Paket Instruksi ini disusun dengan tujuan agar para siswa memahami Proxy War dan dapat melakukan pencegahan serta penanggulangannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat sekitar dan lingkungan tempat ia bekerja.

Ruang Lingkup dan Tata Urut.

Ruang lingkup pembahasan Paket Instruksi membahas hal-hal yang berkaitan dengan Sejarah Proxy War, Kegiatan dan Pentahapan Proxy War serta Konsep menghadapi Proxy War dengan tata urut sebagai berikut: a. Pendahuluan ... 3 a. Pendahuluan b. Sejarah Proxy War. c. Kegiatan Proxy War

Modern. d. Pentahapan Proxy War. e. Konsep menghadapi Proxy War. f. Penutup

5.6 Pengertian.

- a. Ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Sedangkan berdasarkan sifat ancaman, hakikat ancaman dapat digolongkan menjadi dua kategori, yakni ancaman militer dan ancaman nirmiliter.
- b. Ancaman Militer. Ancaman militer yakni ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai memiliki kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.
- c. Ancaman Nirmiliter. Ancaman nirmiliter yakni pada hakekatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah

negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum.

- d. Perang Modern. Perang modern adalah perang yang sangat berbeda dengan konsep, metode dan teknologi militer sebelumnya, menekankan bagaimana kombatan harus dimodernisasi untuk menjaga kelayakan pertempuran mereka. Karena itu, perang modern adalah subjek yang berkembang, terlihat berbeda di waktu dan tempat yang berbeda. Dalam arti sempitnya, perang modern hanyalah sinonim dari "perang kontemporer".

Sejarah perkembangan perang di dunia selalu berkaitan dengan suatu peristiwa peperangan, penaklukan, kekuasaan, ekspansi dan invasi suatu negara terhadap negara lain. Negara-negara yang mempunyai kekuatan akan memungkinkan untuk menaklukan wilayah negara lain untuk kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Terjadinya Perang Koalisi bukan merupakan suatu hal yang terjadi secara tiba-tiba, namun itu merupakan akhir dari suatu proses pengangkatan Napoleon menjadi kaisar Perancis. Perkembangan negara Perancis yang dipimpin oleh Kaisar Napoleon membuat situasi politik di

kawasan Eropa semakin memanas dengan diwarnai ketegangan yang mendorong terjadinya perang koalisi. Perancis bergerak di hampir seluruh kawasan Eropa melawan negara-negara yang dianggap penting dan strategis. Hal ini diakibatkan adanya ambisi Napoleon untuk menaklukkan kawasan Eropa dan menjadikan Perancis sebagai negara yang paling kuat di Eropa. Melatarbelakangi sejarah perang Proxy di dunia merupakan sebuah bentuk konflik antara dua negara, atau aktor non-negara, yang bertindak atas nama atau dengan arahan dari pihak yang tidak terlibat secara resmi dalam konflik tersebut. Untuk bisa dianggap sebagai proxy war, sebuah pihak yang berkonflik harus memiliki hubungan langsung yang sifatnya jangka panjang dengan aktor eksternal. Hubungan ini bisa berbentuk pendanaan, pelatihan militer, penyediaan senjata, serta bentuk dukungan lainnya yang dibutuhkan untuk membantu upaya perang. Dalam Perang Dingin, Proxy War menjadi metode yang digunakan baik oleh Amerika Serikat maupun Uni Soviet untuk menyebarluaskan pengaruh dan menjalankan kepentingan masing-masing tanpa harus mengalami benturan secara langsung. Hal ini didasari keyakinan bahwa konflik langsung antara Amerika dan Soviet dapat berujung pada perang nuklir. Hakekat dari perang adalah karakter politis peperangan masa depan dan tujuan akhir politiknya.

Paradigma Perang Dari Masa Ke Masa. Perang atau konflik yang terjadi sebagai Proxy War telah berlangsung sejak zaman dahulu. Pada masa sebelum Perang Dunia I dan Perang Dunia II secara total lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan Proxy War yang terjadi dimasa Perang Dingin (Cold War) dan sebagian dari Proxy War tersebut tertulis dalam buku sejarah dan politik, bahwa terdapat dua aktor penting pelaku perang proxy. Proxy War yang dilakukan oleh suatu negara besar kepada sekelompok individu yang bukan merupakan aktor negara (non state actors) dan aktor negara (state actors). Semua konflik, insurjensi, perang, dan perang sipil tersebut memiliki tendensi kepada kekuasaan (power). Proxy War adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. a. Sebenarnya sejarah perang sudah cukup lama, ternyata orang-orang Indian sebagai penduduk asli Amerika sudah melaksanakan taktik gerilya yang merupakan pengaplikasian/perwujudan dari peperangan jauh sebelum orang kulit putih yang pertama kali menginjakkan kakinya di Amerika Utara. Di wilayah Asia sendiri yang merupakan negara-negara dunia ketiga diakui bahwa Mao Ze Dong

merupakan salah satu pakar dari peperangan ini. Dengan ide-idenya dia mencoba untuk melawan pemerintahan Chiang Kai Shek. Teori dasar Mao tentang perang ini ternyata diadopsi atau dimodifikasi oleh beberapa pakar insurgensi lainnya seperti Che Guevera di Cuba dan Ho Chi Min di Vietnam namun disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. b. Uni Soviet pada waktu itu juga sudah mencoba mengintegrasikan taktik perang non konvensional seperti misalnya gerakan gerilya, spionase subversi dan lainlain kedalam taktik konvensional. Pengalaman mereka terbukti pada saat Nikita Khrushchev seorang pemimpin komunis dari Ukraine berhasil membentuk partisan bawah tanah melawan Nazi. Inilah yang dimaksudkan dengan "Perang Total" bagi mereka. Pasukan gerilya ini merupakan gambaran dari si miskin atau pihak tertindas yang memiliki tujuan politis. Karakter ... 7 Karakter tersebut pada perang gerilya sebagai sarana utama peperangan masa depan yang mengandung tujuan politik ini sangat penting bahwa tanpa tujuan politik peperangan masa depan akan gagal. Memang hakekat dari perang gerilya adalah karakter politis peperangan masa depan dan tujuan akhir politiknya.

Peperangan Masa Lalu. Ada beberapa contoh yang bisa kita pelajari dari sejarah yang terjadi pada perang masa lalu, khususnya yang merupakan sejarah dari bangsa kita. Bangsa

Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar yang mempunyai latar belakang sejarah yang panjang. Hal ini dibuktikan dari adanya kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara yang menjadi penguasa Asia Tenggara di masa lalu, sebelum terbentuknya Republik Indonesia:

- a. Pertama, Kerajaan Sriwijaya yang membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya menguasai jalur perdagangan Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Jawa dan Selat Karimata bahkan sampai ke Laut Cina Selatan. Lewat Wangsa Sailendra yang bermigrasi ke Jawa, mereka mendirikan kerajaan Medang atau Mataram sebagai satelit. Namun, bukannya saling memperkuat, Mataram menantang dominasi Sriwijaya. Terjadi perang saudara yang menguras energi keduanya. Hal ini dilihat sebagai peluang oleh Rajendra Chola dari India yang tahun 1025 berekspansi dan menguasai Selat Malaka. Perlahan, Sriwijaya kalah dan punah.
- b. Kedua, kerajaan Majapahit yang mencakup Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, hingga Papua dan Timor Timur. Belajar dari sejarah Sriwijaya, Sumpah Palapa sang Mahapatih Gajah Mada bukanlah mengalahkan kerajaan-kerajaan Nusantara, melainkan merangkul semua kekuatan dan keunggulan yang ada melalui jalan diplomasi

dan persekutuan/aliansi dengan kerajaankerajaan lain. Namun, sejak meninggalnya raja Hayam Wuruk, terjadi perubahan tahta antara putri Mahkota Kusumawardhani, dengan putra Hayam Wuruk dengan selirnya yang bernama Wirabhumi. Pecah perang saudara yang dimenangkan Kusumawardhani. Namun, Majapahit terlanjur pecah. Kerajaan-kerajaan Islam mulai bangkit di pantai utara Jawa, sedangkan Kesultanan Malaka mulai memperluas kekuasaannya ke Sumatera. Majapahit runtuh dalam 200 tahun seiring dengan lepasnya kerajaan-kerajaan yang sebelumnya tunduk kepada Majapahit. Namun ironisnya kedua kerajaan besar itu pada akhirnya runtuh bukan disebabkan oleh invasi dan serbuan musuh dari luar, tetapi akibat terjadinya konflik dalam negeri yang berkepanjangan.

- c. Sejarah juga memberikan pelajaran positif. Selama dijajah Belanda, hampir setiap wilayah di Nusantara memberi perlawanan. Namun, lebih dari 300 tahun perlawanan itu gagal. Perjuangan kedaerahan hanyalah perjuangan yang melelahkan, menimbulkan penderitaan, menghabiskan energi dan pikiran serta tidak menghasilkan kemerdekaan. Adalah dr. Soetomo yang memberi penyadaran tentang pentingnya satu kesatuan dalam perjuangan melawan

penjajah. Gagasan persatuan diwujudkan dengan Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908. Saat itu, para pemuda sepakat bertekad untuk bersatu. Kebersamaan dan perasaan senasib dan sepejuangan ini menghasilkan energi sosial yaitu persatuan yang sangat besar yang menjadi bola salju untuk bersatu. Tak sampai 20 tahun kemudian, lahir Sumpah Pemuda yang dideklarasikan oleh seluruh Pemuda Indonesia untuk meleburkan semua potensi daerah dalam tekad berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertanah air satu Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan suatu tonggak kesamaan visi untuk merdeka dan lepas dari penjajah Belanda dengan semboyan yang merupakan energi sosial baru, yaitu Merdeka atau Mati. Tanpa harus menunggu terlalu lama, yaitu 17 tahun kemudian, rakyat Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dan mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Hal ini ditandai dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia mencapai tingkat sebagai Bangsa Patriot karena meraih kemerdekaan serta mengusir penjajah melalui perjuangan dengan pengorbanan pikiran, tenaga, keringat, darah dan nyawa serta dilandasi percaya kepada kemampuan diri sendiri. Dengan demikian perjuangan yang bersifat kelompok tidak akan mampu membawa bangsa

Indonesia mencapai tujuan. Kita harus menyatukan seluruh energi dan keunggulan-keunggulan yang kita miliki untuk membesarkan bangsa Indonesia. Jika kita terpecah-pecah, maka kita tidak akan menjadi bangsa yang besar.

Peperangan Masa Zaman Modern. a. Dalam zaman modern dimana perkembangan teknologi persenjataan nuklir semakin pesat, ditambah dengan permasalahan-permasalahan sebagai akibat dari penambahan penduduk. Dalam kaitan ini guna menjamin dukungan yang dibutuhkan bagi daerah pertempuran perlu dipertimbangkan beberapa hal yang penting seperti front operasi yang akan dibentuk, gerakan pasukan dan inisiatif dari individu yang akan terlibat dalam pertempuran yang direncanakan. Dibandingkan pada masa-masa sekitar PD-II, maka pada situasi perang nuklir, sektor ekonomi dan politik dalam pertempuran serta subversi dan propaganda akan semakin berperan. Namun kiranya tidak mudah untuk mengembangkan hal ini, mengingat mereka sendiri juga sedang menghadapi kemungkinan kehancuran oleh akibat dari digunakannya senjata canggih tersebut. Namun bagi negara berkembang memang alternatif penggunaan strategi non konvensional dengan titik berat perang gerilya atau insurjensi merupakan hal yang paling mungkin

dilaksanakan. Keterpaduan antara kekuasaan militer dan kemampuan Sistasos dengan kemauan untuk menghadapi serangan massal diharapkan negara akan tetap survive. Tentunya keberhasilan ini akan sangat tergantung terutama pada faktor manusia, semangat/moril dan kemauannya untuk memenangkan peperangan, karena ini semua akan dapat mengurangi/meniadakan kemampuan lawan untuk berperang.

b. Memang dalam dekade terakhir ini sudah mulai terbuka pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan keuntungan yang bisa didapatkan bila kita mengaplikasikan model/bentuk peperangan. Pengaplikasian jenis peperangan yang bersifat inkonvensional ini dilingkungan matra laut memerlukan/merupakan satu prioritas tinggi khususnya didalam proses perencanaan walaupun tadinya tidak pernah terpikir model atau teknik perang mana yang bisa membantu operasi-operasi laut secara efektif. Didalam aplikasinya bisa saja untuk menghadapi lawan yang memiliki jalur pantai yang panjang yang didukung dengan kemampuan jaringan transportasi yang baik digunakan ... 10 digunakan kegiatan gerilya laut atau taktik gerakan dengan menggunakan kapalkapal kecil dan kesatuan-kesatuan Pasrat yang kecil dengan kemampuan perang amfibi. Demikian juga dengan

dukungan komunikasi yang lancar, pengumpulan informasi yang aman, dukungan bantuan logistik yang memadai serta penerapan taktik "hit and run" (pukul dan lari) akan lebih tepat untuk diaplikasikan sehingga perlu untuk dikembangkan. Khusus dalam menghadapi operasi gabungan yang melibatkan unsur-unsur dari beberapa angkatan diperlukan kesiapan bagi para personel yang ditunjuk untuk menanganinya dan hal ini memang perlu diantisipasi.

Generasi Perang Pertama Sampai Dengan Generasi Perang Ke Empat (Perang Modern). a. Perang Generasi Pertama. Perang generasi pertama adalah perang linear front to front yang mengandalkan kekuatan manusia (Massed Manpower). Ditentukan juga keahlian pasukan dengan ciri utama linier. Sebagai contoh pada Perang Napoleon. b. Perang Generasi Kedua. Perang generasi kedua yang sebagian besar mengandalkan tembakan meriam tidak langsung. Serangan yang terkendali secara terpusat dan teratur bagi Infanteri, tank Artileri. Artileri sebagai penakluk dan infanteri sebagai penguasaan wilayah serta bersifat Massed Firepower. Sebagai contoh pada perang Dunia I. c. Perang Generasi Ketiga. Perang generasi ketiga adalah perang dengan manuver yang didasarkan atas daya tembak dan menghabiskan tenaga lawan. Perang ini

mengutamakan kecepatan, spontanitas mental serta fisik prajurit. Keterlibatan menentukan hasil yang akan dicapai tetapi tidak menentukan cara. Inisiatif menjadi penting. Contoh Perang generasi ketiga adalah Perang Dunia II. d. Perang Generasi Keempat. Perang generasi keempat adalah perang asimetris (*Asymmetric Warfare*) yang ekstrim lahir dari ketidakpercayaan kepada negara. Loyalitas kepada negara beralih kepada loyalitas agama, suku, kelompok etnis, kelompok dan lainnya. Perang ini melibatkan dua aktor atau lebih yang tidak seimbang dan mencakup spektrum yang luas. Melibatkan organisasi jaringan seimbang ... 11 transnasional dan sub nasional untuk menyampaikan pesan kepada khalayak yang menjadi sasarannya. Secara strategis berfokus mematahkan kehendak pembuat keputusan dan secara taktis menghindari konfrontasi. 10. Jenis Perang Modern. a. Perang Asimetris. Perang antara belligerent atau pihak-pihak berperang yang kekuatan militernya sangat berbeda. b. Perang Hibrida atau Kombinasi. Perang Hibrida atau Kombinasi merupakan perang yang menggabungkan teknik perang konvensional, perang asimetris dan perang informasi untuk mendapatkan kemenangan atas pihak lawan. c. *Network Centric Warfare* (NCW). Perang keunggulan teknologi persenjataan, informasi dan komunikasi dalam pengerahan kekuatan di medan

pertempuran. d. Perang Siber (Cyber Warfare). Perang yang dilakukan dengan mengerahkan kekuatan, kemampuan dan kecanggihan sistem komputer. d. Perang ... 12 e. Perang Proxy. Perang Proxy atau Proxy War adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. "A proxy war is a conflict inflicted by a major power or powers that do not become involved in it directly. Often, proxy wars involve countries fighting their opponents allies or helping their allies fight their oppone.

5.7. Kegiatan Proxy War Modern

5.7. Pengetian Umum.

Seiring dengan perkembangan teknologi, sifat dan karakteristik perang telah bergeser, dimana saat ini kemungkinan terjadinya perang konvensional antar dua negara semakin kecil. Perang masa kini yang terjadi dan perlu diwaspadai oleh Indonesia, salah satunya adalah proxy war. Proxy war tidak melalui kekuatan militer, tetapi perang melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik melalui politik, melalui ekonomi, sosial budaya, termasuk hukum. Proxy war merupakan sebuah konfrontasi antar dua

kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal.

Tren Perang Saat Ini dan Masa Depan. Sifat dan karakteristik perang telah bergeser seiring dengan perkembangan teknologi. Kemungkinan terjadinya perang konvensional antar dua negara dewasa ini semakin kecil. Namun, adanya tuntutan kepentingan kelompok telah menciptakan perangperang jenis baru, diantaranya perang asimetris, perang hibrida dan perang Proxy. Perang Asimetris adalah perang antara belligerent atau pihak-pihak berperang yang kekuatan militernya sangat berbeda. Akibat adanya perbedaan besar dalam kekuatan militer itu, pihak yang lemah tentu tidak akan secara konvensional dan terang-terangan melakukan perlawanan kepada pihak lawan, namun akan menggunakan teknik-teknik baru diluar kebiasaan dan aturan yang berlaku untuk melemahkan kekuatan lawan. Salah satu cara yang dilakukan melalui teknik gerilya. Perang Hibrida atau kombinasi merupakan perang yang menggabungkan teknik perang konvensional, perang asimetris dan perang informasi untuk mendapatkan kemenangan atas pihak lawan.

Pada saat kondisi kuat, maka perang konvensional dilakukan untuk mengalahkan pihak lawan, namun pada saat situasi kurang menguntungkan maka cara-cara lain dilakukan untuk melemahkan pihak musuh. Berbagai cara tersebut dapat berupa penyebaran informasi yang menjatuhkan citra dan kewibawaan musuh, menyelenggarakan black campaign terhadap musuh, atau penyusupan ke dalam pihak lawan yang kesemuanya bertujuan akhir untuk menghancurkan kekuatan musuh. Sedangkan Perang Proxy atau Proxy War adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi resiko konflik langsung yang beresiko pada kehancuran fatal. Biasanya pihak ketiga yang bertindak sebagai pemain pengganti adalah negara kecil, namun kadang juga bisa non state actors yang dapat berupa LSM, Ormas, kelompok masyarakat atau perorangan. Singkatnya Proxy War merupakan kepanjangan tangan dari suatu negara yang berupaya mendapatkan kepentingan strategisnya namun menghindari keterlibatan langsung suatu perang yang mahal dan berdarah. Melalui Proxy War ini tidak dapat dikenali dengan jelas siapa kawan dan siapa lawan karena musuh mengendalikan non state actors dari jauh. Negara musuh akan membiayai semua

kebutuhan yang diperlukan oleh non state actors dengan imbalan mereka mau melakukan segala sesuatu yang diinginkan penyandang dana untuk memecah belah kekuatan musuh. Motif Proxy War yang dilakukan oleh negara-negara besar dalam beberapa kasus adalah: a. Kekuasaan atas politik dan isu keamanan (security). b. Ekonomi baik menggunakan hard power dan soft power. Pada masa perang dingin yang penuh dengan nuansa statism, self-help, dan survival maka masing-masing negara mementingkan isu keamanan (security). Kepentingan keamanan sekaligus juga kepentingan politik sehingga proxy yang dilakukan berkaitan dengan dua isu tersebut (high politics). Pasca ... Pasca perang dingin dimana isu perang nuklir tidak lagi menjadi isu utama maka yang muncul adalah isu ekonomi, teknologi, Hak Azasi Manusia (lebih tepat lagi dalam perspektif ilmu hubungan internasional adalah human security), dan isu lingkungan. Bahkan dewasa ini, struggle for power and the power of influence berlangsung di luar isu keamanan dan politik walaupun pada akhirnya tetap menyentuh kepentingan 15 keamanan dan politik internasional maupun politik domestik suatu negara. Pada hakikatnya segala bentuk proxy yang dilakukan oleh kekuatan besar pada suatu negara baik melalui elit politik maupun Non-Governmental Official (NGO) adalah dalam rangka struggle for power

ataupun *power of influence*. Motif ini belum tentu ingin menduduki, karena akan berhadapan dengan lembaga internasional dan negaranegara lainnya. Namun demikian dalam beberapa kasus intervensi dilakukan untuk mengganti rezim yang berkuasa (seperti halnya Arab Spring), mempengaruhi pemimpin politik (Amerika Latin dan Afrika), dan tentunya pada akhirnya melanggengkan kekuasaan negara-negara besar di panggung politik internasional baik dalam kerangka kekuasaan (*power*) maupun pengaruh (*influence*). Perang Proxy dilakukan dengan menggunakan kelompok-kelompok lokal suatu negara yang berasal dari aktor negara maupun non negara. Penguasaan politik maupun militer tersebut tidak terlepas dari kepentingan negara-negara besar (*major powers*) baik dalam kerangka pertarungan kekuasaan (*struggle for power*) atau pertarungan pengaruh (*the power of influence*). Pola konflik bersenjata saat ini mengalami perubahan yang signifikan sehingga memengaruhi kecenderungan bentuk konflik kontemporer di dunia.

Hal ini disebabkan adanya perkembangan teknologi militer, keinginan untuk mengurangi jatuhnya korban, biaya perang yang tinggi dan semakin ketatnya penerapan kaidah-kaidah hukum dan konvensi internasional. Pola untuk menguasai ruang tidak lagi dilakukan secara frontal, melainkan

dilakukan dengan cara-cara nonlinier, tidak langsung, dan bersifat Proxy War. Berikut ini merupakan hasil diskusi akademis tentang Proxy War dengan beberapa lembaga pendidikan di Indonesia yang hasilnya dapat disimak sebagai berikut: a. Universitas ... a. Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat tanggal 10 Maret 2014. Dalam diskusi akademik, mahasiswa Universitas Indonesia menyampaikan bahwa Proxy War dapat dilakukan pihak asing terhadap Indonesia dalam bentuk sebagai berikut: 1) Menjadikan Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 200 juta sebagai pasar untuk menjual hasil komoditas negara musuh. 16 2) Menghambat pembangunan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia agar kualitasnya tetap rendah. 3) Pelajar Indonesia diberikan beasiswa yang tinggi, dimanjakan dan dilakukan indoktrinasi untuk selanjutnya secara tidak sadar dijadikan agen untuk kepentingan negara musuh. Selanjutnya menjadikan agen-agen tersebut sebagai calon pemimpin bahkan presiden Indonesia yang nantinya dapat dikendalikan oleh negara musuh untuk kepentingan strategisnya. 4) Melakukan investasi secara masif ke Indonesia sehingga dapat menguasai sektor srategis di Indonesia. 4) Bekerjasama dengan negara-negara lain membuat fakta perdagangan dan/atau menciptakan pasar bebas untuk selanjutnya menekan dan mengembargo

produk-produk Indonesia. 6) Melakukan suap dan kolusi terhadap anggota legislatif Indonesia sehingga dapat mengendalikan dan menggiring setiap keputusan hukum dan politik strategis Indonesia sesuai kepentingan negara musuh. 7) Menciptakan kelompok-kelompok teroris di Indonesia sehingga Indonesia dituduh dan dicap sebagai negara teroris. Dengan tuduhan ini, negaranegara berkepentingan akan mudah untuk mengintimidasi dan masuk ke Indonesia dengan dalih mengikis terorisme sebagai ancaman peradaban dunia. 8) Membeli ... 8) Membeli dan menguasai media massa, baik media cetak maupun media elektronik dalam rangka pembentukan opini publik serta menguasai alat komunikasi strategis seperti satelit sehingga dapat memonitor dan menyadap segala percakapan strategis pejabat Indonesia. 9) Memecah belah dan menghancurkan generasi muda Indonesia melalui adu domba dan budaya asing, seperti gaya hidup sex bebas, narkoba dan lainlain. 17 b. Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur tanggal 25 Maret 2014. Dalam diskusi akademik, mahasiswa Universitas Brawijaya menyampaikan bahwa pihak asing dapat menyampaikan Proxy War terhadap Indonesia dalam bentuk sebagai berikut: 1) Menjadikan Indonesia tergantung terhadap negara-negara berkepentingan dalam berbagai aspek, seperti keuangan, perdagangan, diplomasi internasional, keamanan dan

lain-lain. 2) Membuat sistem pendidikan Indonesia tidak maju dan memiliki kualitas yang rendah. 3) Melakukan indoktrinasi terhadap mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di negara berkepentingan agar mereka secara tidak sadar mau menjadi agen-agen musuh di Indonesia yang menguntungkan negara musuh. 5) Melakukan intimidasi terhadap mahasiswa Indonesia yang dikaitkan bantuan pendidikan untuk menghilangkan semangat dan rasa nasionalismenya. 6) Menguasai dan menguras sumber kekayaan alam (SKA) Indonesia sebelum rakyatnya pintar dan kualitas pendidikan masyarakatnya tinggi. 7) Menguasai semua investasi di Indonesia agar Industri Indonesia tidak berkembang dan terus menjadi konsumen bagi produk-produk komoditas negara musuh. 8) Memanfaatkan ...

8) Memanfaatkan kepandaian mahasiswa Indonesia sehingga negara berkepentingan mendapatkan keuntungan darinya. c. Institut Teknologi Bandung, Bandung, Jawa Barat tanggal 30 April 2014. Dalam diskusi akademik, mahasiswa Institut Teknologi Bandung menyampaikan bahwa pihak asing melancarkan Proxy War terhadap Indonesia dalam bentuk sebagai berikut: 1) Membuat kerjasama di segala bidang untuk menguasai Indonesia. 2) Mencari Informasi tentang potensi dan kekurangan Indonesia sebagai bahan untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia. Apabila Indonesia

mau bekerjasama maka akan dijadikan mitra kerja, namun jika Indonesia menolak untuk bekerjasama maka Indonesia akan dijadikan musuh. 3) Melakukan barter atau pertukaran antara teknologi negara musuh dengan kekayaan alam Indonesia. Untuk melancarkan hal ini, maka perlu dilakukan penyuaipan kepada pejabat pengambil keputusan Indonesia yang membidangi hal ini. 4) Mempelajari karakter masyarakat Indonesia dan selanjutnya menciptakan ketergantungan di berbagai bidang, termasuk budaya. Sebagai contoh budaya K-Pop dari Korea. 5) Dengan melihat Indonesia dimana kesejahteraan penduduknya belum merata dan adanya beberapa daerah yang infrastrukturnya masih minim, maka negara berkepentingan akan memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat tersebut sambil melakukan indoktrinasi kepada generasi muda Indonesia untuk melepaskan diri dari Indonesia. 6) Memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa dengan ikatan dinas yang lama sehingga menguntungkan negara musuh. 7) menghancurkan ... 7) Menghancurkan pemuda Indonesia dengan penyebaran narkoba, budaya sex bebas dan hidup konsumtif agar generasi muda Indonesia tidak dapat menjadi pemimpin di negaranya. 8) Mencari potensi konflik di Indonesia untuk selanjutnya membuat konflik dan kemudian bertindak sebagai pahlawan dengan cara memberi bantuan

kepada Indonesia. Namun, jika Indonesia tidak kooperatif maka akan dihembuskan isu-isu disintegrasi dan pemberontakan. 19

9) Melakukan penelitian tentang potensi-potensi konflik di Indonesia dan negara-negara tetangganya untuk selanjutnya menggunakan negaranegara tetangga Indonesia sebagai kepanjangan tangan kepentingan negara musuh. d. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta tanggal 19 Juni 2014. Dalam diskusi akademik dengan peserta PPRA LII Lemhannas RI, peserta menyampaikan bahwa pihak asing dapat melancarkan proxy war terhadap Indonesia dalam bentuk sebagai berikut: 1) Mendorong pengusaha-pengusaha negara musuh untuk melakukan investasi besar-besaran di Indonesia sehingga pada akhirnya dapat mengendalikan kebijakan strategi ekonomi Indonesia dan menguasai peran penting kegiatan ekonomi di Indonesia mulai dari hulu sampai hilir. 2) Menguasai sumber kekayaan alam Indonesia dengan cara yang sistematis. Pertama, melakukan diplomasi untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia. Jika melalui diplomasi tidak berhasil, maka bekerja sama dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk melakukan ekspansi pengaruh strategis ke Indonesia. Jika hal ini juga tidak berhasil, maka akan dilakukan invasi militer ke Indonesia. 3) Negara musuh melalui pakta kerjasama ekonomi menguras sumber

kekayaan alam Indonesia. 4) Menciptakan ... 4) Menciptakan konflik di Indonesia sehingga Indonesia tidak dapat memproduksi barang-barang komoditas dan negara berkepentingan dengan mudah masuk ke Indonesia, menguasai pasar Indonesia serta menjual produk-produknya. 5) Mengirimkan agen-agen intelijen ke Indonesia untuk menguasai lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga dapat membuat produk hukum yang menguntungkan iklim investasi negara berkepentingan di Indonesia dalam rangka mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya. 20 6) Membangun strategi global dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai bagian dari suatu komunitas internasional yang harus mematuhi aturanaturan internasional. Dengan demikian, Indonesia tidak akan bisa menolak kebijakan yang telah ditetapkan komunitas tersebut walaupun merugikan kepentingan domestik Indonesia. 7) Melakukan negosiasi kerjasama ekonomi dengan Indonesia dengan disertai diplomasi dan intervensi intimidatif kepada pejabat pemangku kebijakan di bidang ekonomi. 8) Mencari dan menciptakan calon pemimpin Indonesia sedini mungkin sehingga nantinya dapat dipengaruhi dan menjadi pemimpin boneka yang dapat dikendalikan dan membuat kebijakan-kebijakan yang melindungi kepentingan negara musuh. 9) Melancarkan diplomasi internasional, operasi intelijen dan

perang asimetris secara bersama-sama untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan strategis pemerintah Indonesia. 13. Indikasi Proxy War di Indonesia dan Contohnya. Proxy war telah berlangsung di Indonesia dalam bermacam bentuk, seperti gerakan separatis dan lain-lain, antara lain: a. Gerakan Separatis. Lepasnya Timor Timur dari Indonesia yang dimulai dengan pemberontakan bersenjata, perjuangan diplomasi sampai dengan munculnya referendum ... referendum merupakan contoh Proxy War yang nyata. Paul Cleary menyatakan bahwa konflik yang terjadi di Timor Timur selama 40 tahun sebenarnya merupakan konspirasi untuk mengeksplorasi minyak dan gas di Laut Timor. Minyak di Laut Timor yang berada di garis tengah antara Timor Leste dan Australia menarik perhatian pemerintah Australia sejak tahun 1960-an. Namun, Portugal yang saat itu berkuasa atas Timor Portugis malah memberikan konsensi pengeboran minyak kepada perusahaan asal Amerika Serikat, Oceanic Exploration. Pada tahun 1972, Indonesia dan Australia akhirnya menandatangani persetujuan garis batas laut antara kedua negara tanpa mengikutsertakan Portugal. Perjanjian ini dibuat tidak berdasarkan peraturan Internasional tentang “median line” dalam menentukan batas wilayah perairan suatu negara melainkan berdasarkan negosiasi antara kedua belah

pihak. Hasilnya, secara kasatmata merugikan Indonesia karena kehilangan wilayah perairan yang cukup luas untuk Australia. Namun, perjanjian batas laut ini ternyata masih meninggalkan celah kosong tampak kepemilikan yang berseberangan dengan Timor, yang akhirnya dikenal dengan celah Timor. Celah Timor tanpa diduga menyimpan minyak dan gas bumi dalam jumlah yang fantastis. Pada tahun 1974, perusahaan minyak Australia bernama Australian Woodside kembali menemukan ladang minyak di laut Timor yang dikategorikan oleh para ahli geologi sebagai “Sumber Kelas Dunia” yang bernama Greater Sunrise. Australia sebagai negara yang merasa mampu untuk mengeksplorasi daerah tersebut walaupun dengan modal yang sangat besar berusaha untuk menguasai cadangan minyak tersebut. Setelah Timor Timur menjadi provinsi ke-27 dari Republik Indonesia pada 1976, pada tahun 1978 Australia menjadi negara pertama yang mengakui Timor Timur sebagai bagian dari Republik Indonesia dan pada 1979 dimulailah perjanjian pengolahan Celah Timor antara Indonesia dan Australia. Belajar dari pengalaman penentuan batas wilayah laut 1972, Indonesia menolak proposal yang diajukan Australia. Perjanjian pengolahan ini akhirnya jalan ditempat selama 10 tahun sampai dengan pada tahun 1989 kedua negara menyetujui ... menyetujui pembentukan Zona Kerjasama di Celah Timor

dengan pembagian keuntungan 50/50. Tidak berhenti sampai disini, Australia ingin menguasai kandungan minyak di celah Timor dengan pembagian yang lebih besar. Melalui isu Hak Asasi Manusia, Australia menyerukan perlunya penentuan nasib sendiri untuk rakyat Timor Timur. Berbagai demonstrasi dengan tuntutan agar Indonesia melepaskan Timor Timur terjadi didalam maupun luar negeri. Di jalur diplomatik, Australia juga membujuk PBB untuk mengeluarkan sebuah Resolusi Dewan Keamanan agar menginjakan pasukan multinasional dibawah 22 pimpinannya masuk ke Timor Timur dengan alasan kemanusiaan, menghentikan kekerasan dan mengembalikan perdamaian. Pengerahan pasukan Australia ke Timor Timur yang telah direncanakan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan sebelum keputusan referendum diambil oleh pemerintah Indonesia, akhirnya mendapat dukungan dunia internasional. Pasca berdirinya Timor Leste, Australia akhirnya memiliki partner baru dalam negosiasi pengolahan minyak di Celah Timor, yaitu Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Australia sangat paham bahwa RDTL membutuhkan dana yang sangat besar untuk membangun negaranya dan dana tersebut hanya bisa diperoleh melalui eksplorasi sumber daya alam di Laut Timor. Maka pada tanggal 20 Mei 2002 saat Timor Leste mendapatkan

kemerdekaannya dari PBB, Australia dan Timor Leste melakukan perjanjian pengolahan minyak bersama di Laut Timor. Namun, perjanjian lanjutan tentang pembagian keuntungan antara kedua negara sampai sekarang belum menemui titik temu. Pihak Australia pun tidak mau mundur atas penawaran pembagian keuntungan yang diajukannya karena jika RDTL tidak mau menindaklanjuti perjanjian pengolahan Celah Timor dengan Australia berarti tidak akan ada investor yang bisa mengolah sumber daya minyak Laut Timor dan resiko RDTL terpuruk dalam jurang kehancuran akan besar. Setelah melewati perjuangan panjang, akhirnya Australia memiliki posisi tawar untuk pengolahan Laut Timor yang lebih kuat dihadapan RDTL dibandingkan saat Timor Timur masih menjadi bagian dari Republik Indonesia.

b. Demonstrasi ... b. Demonstrasi Massa. Demonstrasi massa yang berlangsung selama ini tidak semuanya memiliki tujuan dan permasalahan yang jelas. Bahkan sering ditemui demonstran yang tidak mengetahui apa yang akan diperjuangkan dalam demonstrasi tersebut. Demonstrasi yang membawa tuntutan tidak masuk akal dan bersifat memaksa patut dicurigai sebagai indikasi adanya Proxy War yang tengah berlangsung di Indonesia. Demonstrasi buruh dan pekerja pabrik yang menuntut kenaikan gaji yang tidak wajar, penghapusan kontrak

kerja atau outsourcing dan tuntutan pemberian insentif bulanan dengan ancaman penggantian manajemen perusahaan atau mogok kerja merupakan contoh 23 demonstrasi yang irasional karena tuntutan-tuntutan tersebut jelas sulit untuk dipenuhi oleh perusahaan. Mengapa hal ini terjadi? Karena dalam Proxy War selalu mengeksploitasi hal-hal sensitive yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti buruh dan lain-lain dengan tujuan untuk melumpuhkan perusahaan-perusahaan domestik agar tidak mampu bersaing dengan perusahaan luar negeri dalam pasar global. Akibat dari demonstrasi buruh yang terjadi sepanjang tahun 2013, sebanyak 19 perusahaan di Jabodetabek milik warga negara Indonesia harus gulung tikar dan terpaksa merumahkan ribuan pekerjanya. Bukan saja di Jabodetabek, perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan juga mengalami hal yang sama. Dari 20 perusahaan kelapa sawit di pulau Sumatera yang pernah di demonstrasi oleh pekerjanya, semuanya adalah milik pemerintah atau swasta Indonesia. Bahkan pada 3 Januari 2013, sekitar 3.500 buruh kelapa sawit PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) melakukan aksi demonstrasi di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas untuk menuntut agar mereka di PHK dan selanjutnya manajemen pabrik dialihkan ke PT. Genting Plantation Nusantara dari Malaysia. c. Penerapan Regulasi

yang Merugikan. Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) merupakan produk perjanjian internasional yang diterbitkan atas prakarsa World Health Organization (WHO) dan Amerika Serikat. Regulasi ini diadopsi oleh Majelis Kesehatan Dunia pada 21 Mei 2003 dan mulai berlaku pada 27 Februari 2005. FCTC menggunakan label kesehatan sebagai dalih pengaturan ... pengaturan tembakau secara internasional. Namun materi FCTC sendiri lebih banyak mengatur masalah tata niaga, seperti pengurangan pasokan, pembatasan industri, standarisasi produk, CSR (Corporate Social responsibility) dan pajak Industri Hasil Tembakau (IHT). Peraturan internasional ini bertujuan untuk menekan semua negara agar melemahkan usaha tembakau dalam negerinya dengan alasan kesehatan. FCTC mengatur kandungan rokok dan larangan bau aromatik (cengkeh) untuk digunakan dalam produk rokok. Peraturan FCTC juga mengatur diversifikasi 24 penggantian tanaman tembakau ke tanaman lain. Diversifikasi lahan ini akan mematikan industri rokok kretek di Indonesia dan menjadi ancaman gulung tikar pabrik rokok kelas menengah kebawah yang sebagian besar merupakan industri rumahan. UKM rokok nasional akan tertekan karena aturan tarif cukai yang tinggi. Keberadaan FCTC tidak bisa menekan jumlah rokok yang dikonsumsi, melainkan merebut pasar rokok kretek di

Indonesia untuk diisi oleh rokok putih dengan tembakau impor yang diklaim kandungan tar dan nikotinnya rendah. Melalui FCTC dengan serangkaian isu kesehatan, industri global menekan pertanian dan industri nasional suatu negara, termasuk Indonesia. Padahal 6,1 juta penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada industri hasil tembakau dan pemasukan negara dari cukai rokok mencapai Rp. 10,4 triliun.

c. Peredaran Narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia diyakini memiliki keterkaitan dengan strategi Proxy War. Hal tersebut dilakukan untuk merusak generasi muda Indonesia sehingga bangsa Indonesia dimasa depan tidak memiliki generasi yang berkualitas tinggi. Direktur Diseminasi Informasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Drs. Gun Gun Siswadi, M.Si mengatakan bahwa “ kalau korupsi korbannya adalah ekonomi dan uang negara yang dicuri, sementara terorisme adalah nyawa orang yang tidak berdosa, sedangkan kejahatan narkoba adalah generasi yang hilang atau lost generation”. Peredaran narkoba di Indonesia sudah merajalela dengan berbagai bentuk dan sampai ke daerah perbatasan serta pelosok pedalaman. Ditresnarkoba Polda Metro ... Metro Jaya pada periode Juli sampai dengan September 2019 berhasil menangkap 12 tersangka pengedar Narkoba jenis sabu dan Extacy jaringan Jakarta-Pekanbaru-Malaysia. Polisi menyita

sedikitnya 18 kilogram (kg) sabu, 4.132 butir pil Extacy dan bahan baku pembuat Extacy (Press Release Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, pada hari Rabu, tanggal 11 September tahun 2019). Selain itu juga pihak BNN berhasil menangkap 7 pemasok Narkoba di dua tempat hiburan malam di wilayah Jakarta Barat. Pihak BNN berhasil menyita 3.000 butir Extacy jenis Minion. Dan masih banyak lagi tempat-tempat hiburan malam, rumah makan dan tempat rekreasi 25 yang menjadi pusat peredaran narkoba. Seakan-akan aparat berwajib tak kuasa mengendalikan derasnya peredaran obat-obatan terlarang di Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat prevalensi yang tinggi memang merupakan pasar yang sangat menarik dan menguntungkan bagi Bandar narkoba yang umumnya merupakan sindikat internasional. Jika diakhir abad ke-20 Indonesia masih berstatus sebagai negara transit, maka kini Indonesia sudah beralih menjadi negara konsumen. Pemakai narkoba menurut data BNN mengalami kenaikan dari 1,5 % penduduk pada tahun 2005 menjadi 2,6 % di tahun 2013 dan diperkirakan akan mencapai 2,8 % di tahun 2015 yang artinya lebih dari 5,1 juta penduduk Indonesia menyalahgunakan narkoba. Selain itu angka kematian tiap tahun akibat narkoba berada pada kisaran 15.000 jiwa. Fakta-

fakta diatas sangat memprihatinkan dan dapat menghancurkan generasi muda untuk jangka panjang. Narkoba telah menyerang secara massif mulai dari kalangan eksekutif muda sampai dengan anak sekolah. Melalui konspirasi internasional, generasi muda Indonesia tanpa sadar dapat dapat dihancurkan tanpa harus menggunakan kekuatan bersenjata. Aparat pemerintah pun sampai saat ini masih kewalahan untuk mencegah dan menguranginya.

5.8 Humanisme dan Pembangunan

W.S Rendra pernah mengibaratkan cendekiawan sebagai “mereka yang berumah di angin”, yang melihat hidup dan pergulatan manusia di atas bumi tidak pernah sempurna. Namun tentunya tidak semua cendekiawan masuk dalam kategori ini. Salah seorang di antaranya adalah Soedjatmoko, anak zaman yang sadar akan sejarah serta menolak “keharusan sejarah”. Di sisi itu ia bukan pula sang Resi yang melihat dunia tak lepas atau selalu dalam keadaan krisis, namun tak pernah mampu menemukan jalan keluar dari krisis itu.

Kesan inilah yang muncul tatkala menelusuri pemikiran Soedjatmoko dalam kumpulan tulisannya yang baru untuk pertama kalinya dibukukan (dalam bahasa Indonesia) ini. Sebagai cendekiawan ia dengan intend mengupas masalah-

masalah besar, diantaranya masalah-masalah pembangunan. Lewat berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial ia mengaji berbagai dimensi yang luas dalam pembangunan. Ia menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah. Di sinilah ia berbeda dengan Syahrir, Rosihan Anwar, Asrul Sani dan teman-teman seangkatannya yang lain, bahkan dengan “gurunya” sendiri, Takdir (STA). Seperti yang dikatakan Aswab Mahasin yang mengantar pilihan karangan ini, “di tengah arus kuat yang hendak membagi pembahasan soal-soal kebudayaan dan kemasyarakatan dalam bidang-bidang spesialisasi, ia tetap tegak berdiri bagai karang yang tak mau larut. Ia menolak menjadi ilmuwan dalam pagar disiplin akademis dan bertahan sebagai cendekiawan yang dengan penalaran rasional hendak merangkum berbagai pengalaman manusia dalam membudaya menjadi suatu susunan pengertian yang bisa dipahami, dikuasai dan dibawa kepada suatu jurusan besar: pembebasan manusia” (hal. IX).

Walaupun kumpulan karangan ini ditulis dalam waktu yang berbeda (1954-1980) dan untuk kepentingan yang berbeda pula, namun ada satu benang merah yang tak pernah lepas dari pikiran dan gagasannya. Yakni komitmennya terhadap manusia dan kemanusiaan. Dan di sinilah ia menempatkan diri sebagai seorang humanis. Tentang posisinya ini ia menulis dalam majalah *Konfrontasi* (1954) . . . “Kehidupan manusia tak dapat

dicakupi oleh politik dan filsafat politik saja. Tidak peduli politik apa dan filsafat mana. Hidup itu senantiasa terelakkan dari perangkap akal manusia. Sebab filsafat politik bersandarkan suatu pengertian tentang kehidupan itu sendiri. Esensi kehidupan itu tak dapat tertuangkan dalam bentuk kata - atau pengertian. Itu hanya dapat dialami dalam “rasa”. Setiap pengertian intelektual dan setiap susunan pengertian dalam suatu filsafat tertentu menemukan suatu reduksi kehidupan itu sendiri”.

Kalau kita telaah lebih mendalam lagi pikiran-pikiran yang dikembangkan oleh Soedjatmoko, maka akan terlintas kepada kita masa perjuangan Sutan Syahrir yang diberi gelar sebagai “born Asia”. Namun harus diakui bahwa pikiran Soedjatmoko mungkin saja tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang “sosialisma kerakyatan” yang ingin diwujudkan oleh Sutan Syahrir. Ia pernah menjadi anggota Konstituante mewakili Partai Sosialis Indonesia, yang pada akhirnya dibubarkan Soekarno pada tahun 1960.

Tulisannya yang pertama tentang pembangunan terbit sebagai cerminan dari keletihannya melihat percaturan politik yang memperjuangkan kepentingan golongan yang sempit dan keinginannya untuk mencantumkan urgensinya dalam agenda politik. Tentu saja hal itu juga mencerminkan minat-minat

intelektual maupun humanis, jika humanisma dapat disebut sebagai “filsafat tentang perubahan, yang menyiapkan orang untuk perubahan dan menggairahkan semangat perubahan” (hal. XVI). Walaupun ia dengan tegas memfokuskan perspektif kebudayaan dan kesejarahan, yang menitikberatkan pada dimensi manusia dalam pembangunan secara konsistensi.

Sebagai seorang humanis, tentunya ia menatap realitas manusia sebagai sebuah sistem terbuka. Dan sejarahnya pun, merupakan sejarah terbuka. Karena itu Soedjatmoko menolak pandangan yang melihat sejarah sebagai sistem tertutup, baik itu berasal dari pandangan lama yang menganggap sejarah sebagai lingkaran kekinian, maupun pandangan determinist's yang menganggap sejarah berjalan menurut hukum-hukum perkembangan tertentu, yang suka disebut “keharusan sejarah”. Ia menilai konsepsi-konsepsi Hegel, Spengler dan Marx sebagai sudah hancur. Kesadaran sejarah, pada akhirnya justru membebaskan manusia dari perangkap keharusan sejarah itu. Sejarah menjadi nisbi. Dan manusia menjadi “lebih sadar akan luasnya pilihan yang ia hadapi” yang tentu saja “menghadapkan dia kepada tanggungjawabnya yang tak terbatas”. (hal. XX).

Penulis kata pengantar buku ini dengan polos mengakui karangan Soedjatmoko memang terasa agak berat dibaca. Sulit pula membuat kesimpulan sederhana setelah kita mengikuti

pergumulan yang intens dengan permasalahannya. Meskipun kita sadar bahwa buah pikiran Soedjatmoko dalam masa gencar-gencarnya pembangunan ekonomi dicanangkan. Nampaknya ia berusaha meyakinkan beberapa alternatif dalam usaha memecahkan serentetan persoalan yang dihadapi oleh suatu negara yang sedang membangun. Kalau kita simak secara implisit maka produk pemikirannya cukup serius dalam rangka mewujudkan tatanan ekonomi yang sesuai dengan kesanggupan dan kepribadian bangsa Indonesia, bukan berarti kita digiring mengikuti pertarungan antara sistem kapitalisma dan sistem sosialisma ke dalam suatu lobang krisis yang berkepanjangan dan ketergantungan pada salah satu blok.

Akar kekuatan ekonomi kita akan ditentukan oleh seberapa jauh kesanggupan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia (human resource) digunakan sebagai modal dasar pembangunan nasional yang ditujukan kepada harkat dan martabat manusiawi. Maka pembangunan ekonomi dan pembangunan politik harus berjalan sejajar, agar manifestasi kekuatan suatu bangsa tidak cepat tenggelam dalam berbagai krisis dan ekonomi, seperti Brazil, Meksiko dan Polandia. Karena pembangunan senantiasa menciptakan perubahan sosial yang cepat dan acapkali menciptakan “gap” yang lebar menimbulkan konflik sosial di dalam masyarakat.

Soedjatmoko juga dengan tegas menolak buah pikiran W.W. Rostow dalam bukunya “The Stage of Economic Growth”, yang dikatakannya tidak menunjukkan jalan dan tidak memberikan kunci-kunci untuk memanipulasikan realitas sosial guna pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Suatu hal yang perlu kita ingat bahwa ketekunan Soedjatmoko dalam mengarungi samudera ilmu pengetahuan, sekurang-kurangnya ia sudah menemukan suatu untaian dalam berbagai friksi keunggulan negara-negara industri terkemuka di dunia dan dilema yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang. Hasil pemikirannya dalam salah satu tulisannya “Model Kebutuhan Dasar : Implikasinya Dalam kebijaksanaan Nasional” memperoleh hadiah Magsaysay dalam tahun 1978. Potret seorang anak yang berjuang dengan gigih dan selalu mempertahankan prinsipnya. Hingga kini ia masih tetap menjabat sebagai Rektor United Nations University di Tokyo. Pilihan karangan Soedjatmoko ini cukup baik untuk dikaji para akademisi-akademisi untuk memperluas cakrawala pengetahuan. Di sisi lain buku yang terbarunya *Development and Freedom* terbit lagi dalam 1980, sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh LP3S.

BAB VI

SISTEM KAPITALISME DI ERA GLOBALISASI

6.1. Pendahuluan

James N Rosenau (1980), dalam bukunya yang berjudul “*Order and Disorder in the Study of World Politics*”, in *Globalism Versus Realism: International Relations Third Debate* (perdebatan ketiga), menawarkan ke dalam perspektif ilmu hubungan internasional tiga label yaitu; Centric, Multicentric, serta Global Centric sebagai suatu pendekatan studi ilmu hubungan internasional. Paul R Viotti dan Mark V Kauppi (1990) melalui teori, image dan hubungan internasional menawarkan alternatif baru melalui tiga label (lihat table 1).

**Table 1. Alternative Images of International Relations:
Underlying Assumptions**

	Realism	Pluralism	Globalism
<i>Analytic Unit(s)</i>	1. State is the principal actor	1. State and nonstate actors are important	1. Classes, sate and societies, and non state actors operate as part of world capitalist system

Perkembangan Politik Internasional Era Perang Dingin

<i>View of actor(s)</i>	2. State is unitary actor	2. State disaggregated into components, some of which may operate transformally	2. International relations viewed from historical perspective, especially the continuous development of world capitalism
<i>Behavioral Dynamic</i>	3. State is rational actor seeking to maximize its own interest or national objectives in foreign policy	3. Foreign policy making and transnational processes involve conflict, bargaining, coalition, and compromise--not necessarily resulting in optimal outcomes	3. Focus is on patterns of dominance within and among societies
<i>Issues</i>	4. National security issues are most important	4. Multiple agenda with socioeconomic or welfare issues as, or more, important than national security questions	4. Economic factors are most important

(Paul R Viotti dan Mark V Kauppi, *International Relation Theory: Realism, Pluralism, Globalism*, : 569).

Realism, Pluralism dan Globalism (Paul R Viotti & Mark V Kauppi, *International Relation Theory-Realism, Pluralism, Globalism and Beyond, Third Edition*, : 2) :

menekankan bahwa “*The basic question we pose is whether the field is becoming less fragmented whether there are indications of movement toward a greater of consensus on how to approach the study of international phenomena. One could argue that this is not a burning issue, and in fact a multiplicity of interest, methods, paradigms, concepts, and value preferences ia actually beneficial and should be applauded. Greater unity, it is feared, could result in uniformity and intellectual tyranny of a dominant paradigm or school of thought. Hence, eclecticism is to be encouraged, and any sign of uniformity regarded with suspicion*”.

Teori kritis yang dikembangkan oleh Douglas Kellner terhadap *tehno-kapitalisme* dengan memfokuskan kepada realitas kapitalisme sekarang, di mana teknologi memegang peran yang semakin penting. Kellner yang sebelumnya adalah pemikir retorika tradisional beralih perhatiannya kepada perspektif globalisasi dan lebih umum ke orientasi new-marxian. Menurut Kellner, *kunci memahami globalisasi adalah menyusun teori tentangnya sebagai produk dari revolusi teknologi sekaligus restrukturisasi kapitalisme.*

Perubahan-perubahan ini harus saling berkaitan dengan faktor-faktor politik dan sosial. Jadi harus menengok kepada hubungan dialektis antara teknologi, ekonomi, politik dan

kultur. Ini berarti menyesuaikan diri bukan hanya dengan kesaling hubungan, tetapi juga konflik, kontradiksi dan ambiguitasnya.

Perubahan dalam dinamisasi ilmu pengetahuan sosial, khususnya ilmu hubungan internasional, terlihat dalam substansi pendekatan melalui keterkaitan kepada kelompok pemikiran (See Hermann, Kegley, and Rosenau 1987) (*school of thought*). Berakhirnya Perang Dingin mantan presiden Rusia, Mikhael Gorbachev, memberi catatan pada tahun 1992, *“In the major centre of world politics, the choice, it would seem, has today been made in favor of peace, cooperation, interaction, and overall security”, however, he warned, “A major international effort will be needed to render irreversible the shift in favor of a democratic world-and democratic for the whole humanity, not just half of it”*.

Menurut Sekjen PBB, Boutros–Ghali, pada tahun 1996 dalam tulisannya *the Economist* 337) menyatakan *“Globalization is the world long-term problem”* (idem) (world politics). Presiden Francois Mitterand of France di tahun 1983 mengingatkan bahwa, *“together we must urgently find solutions to real problems at hand especially unemployment and underdevelopment. This is the battlefield where outlines of the year 2000 will be drawn.*

Indian Prime Minister Indira Gandhi *predicted that either nuclear war will annihilate the human race and destroy the earth, thus disposing of any future, or men and women all over must raise their voices for peace and for an urgent attempt to combine the insight of civilizations of the contemporary knowledge. We can survive in peace and goodwill only by viewing the human race as one, and by looking at global problems of their totality*".

The peaceful end of the Cold War does not ensure a peaceful future. On the contrary, the insight of long-cycle and realist theories predict pessimistically that prevailing trends in the diffusion of economic power will lead to renewed competition, conflict, and perhaps even warfare among the great powers, and that the range of new problems and potential threats will multiply. As political scientist Robert Jervis explains "cyclical thinking suggests that, freed from the constraints of the Cold War, world politics will return to earlier patterns". Many of the basic generalizations of international politics remain unaltered: It is still anarchic in the sense that there is no international sovereign that can make and enforce laws and agreements. The security dilemma remains as well, with the problems it creates for states who would like to cooperate but whose security requirements do not mesh. Many

specific causes of conflict also remain, including desires for greater prestige, economic rivalries, hostile nationalisms, divergent perspectives on and incompatible standards of legitimacy, religious animosities, and territorial ambitions. To put it more generally, both aggression and spirals of insecurity and tension can still disturb the peace. (Jervis 1991-1992, 46) (Jervis, Robert. (1991-1992) "The Future of World Politics: Will it Resemble The Past?" *International Security* 16 (winter): 39-73).

These prescriptions adhere to a fundamental premise, as expressed in 1995 by Martti Ahtisaari, President of Finland; "*to deal with the great security challenges of our time, including population growth, the spread of weapons of mass destruction, crime, environmental degradation and ethnic conflicts, we must resolutely adopt new methods of managing change and building global security*". (*The Economist* 337 (January 5th, 1996).

Arena internasional yang diasumsikan kelompok realis, jika tidak ada kekuasaan di atas negara, hubungan antar negara akan cenderung konflik. Konflik akan terus terjadi, karena masing-masing negara tidak tunduk kepada kekuasaan atas nama suatu negara (sebagai contoh: PDI dan PD II). Kelompok ini lebih menekankan kepada kapabilitas negara, yang secara

langsung berkaitan erat dengan kapasitas atau peranan aktor-aktor dalam suatu negara. Hubungan antar negara di mana distribusi kekuasaan atas nama negara tidak merata, politik kekuasaan berada di atas hukum formal. Kekuatan negara menjadi bagian penting dalam hubungan antar negara. Oleh karena itu, para aktor dituntut tanggung-jawab mempertahankan kelangsungan hidup dan kepentingan keamanan negara.

Fenomena konflik internasional dan globalisasi (mythos dan realitas) melalui pendekatan realis dengan asumsi anarki ini, telah menggiring setiap negara, cenderung memaksimalkan kekuatannya melalui kapabilitas negara. Perlombaan senjata dengan alasan ketahanan nasional, telah menempati urutan pertama ataupun signifikan dalam pembiayaan anggaran belanja dari suatu negara. Di sisi lain, kekuasaan tidak dapat diukur, demikian pula distribusi kekuasaan atas nama negara, yang cenderung berubah-ubah. Fenomena ini terlihat pada sejumlah negara, melalui jatuh banggunya negara, seperti perang Russia dan Ukraina, karena tidak adanya konsensus dalam konflik antar negara, Dewan keamanan PBB serta bagaimana kekuasaan didistribusikan.

Perang antara Russia-Ukraina dapat dicatat sebagai penentuan atas kekuatan negara ataupun kapabilitas tersebut.

Yakni, atas nama keamanan domestik negara, perluasan wilayah, kapabilitas militer, diplomasi serta berbagai perjanjian, dan berperang, melakukan kontrol terhadap berbagai organisasi internasional.

Demikian juga pengaruhnya dalam perdagangan serta penguasaan atas faktor-faktor produksi, melalui teknologi tinggi yang dikuasai negara. Fokus hubungan internasional umumnya diarahkan secara langsung pada negara-negara paling berkuasa salah satunya Amerika Serikat. Karena selama ini negara-negara adi daya tersebut menentukan berbagai karakter politik internasional, periode sejarah dan peperangan serta peradamaian dunia.

Michael Walzer dalam dua bukunya “*Just and Unjust War*”, 1977 dan 1992, buku pertamanya, melalui refleksi perang Vietnam dan buku kedua, yang mendiskusikan Perang Teluk, ingin menggambarkan sebuah upaya ambisius dalam memodernisasi tradisi pemikiran sangat tua mengenai batasan-batasan etis dalam melakukan paksaan kepada setiap negara. Tradisi pemikiran itu dikenal dengan “teori perang adil”. Teori perang adil, memberikan prinsip dan aturan moral, membatasi alasan-alasan yang mendorong negara untuk berperang (*jus ad bellum*), dan juga membatasi tingkah laku negara-negara tersebut pada saat perang sudah berkobar (*jus in bello*). Sejak

berakhirnya Perang Dingin (*coldwar*), Walzer menggunakan teorinya untuk menjelaskan isu intervensi kemanusiaan dalam konteks perang sipil, sporadis atau perang dalam suatu negara.

Adalah ironi, jika berakhir konflik ideologi memberi arti berakhirnya semua konflik dalam tataran internasional. Kejatuhan atau runtuhnya Uni Soviet memberikan harapan baru, terlihat melalui hilangnya berbagai simbol-simbol lama seperti misalnya; runtuhnya tembok Berlin, hilangnya patung Stalin serta berbagai bendera federasi Rusia. Konflik ideologi yang terjadi antara sistem kapitalis liberalis yang ingin mempertahankan *statusquo* dan sistem komunis yang menuntut perubahan secara revolusioner.

Berbeda dengan perubahan ideologi pada konteks identitas dan fungsi dalam konflik kultural yang tidak atau akan selalu revolusioner. Konflik kultural tidak selalu memiliki sifat revolusioner, karena berkaitan dengan budaya di mana wilayah, ruang dan waktu serta perkembangan bersifat transisi, dinamis, dramatis. Fenomena ini dapat memberikan arti penting dalam substansi ideologi yang bersifat kultural yang sangat berbeda dalam melihat realitas politik dan ekonomi dalam tataran global. Yang pasti akan terjadi, dengan berakhirnya konflik ideologi kapitalis liberal dan komunisme, secara simultan mengubah struktur yang sebelumnya multi-polar ke sistem

bipolar (Bipolar: Konsentrasi negara-negara dan penggunaan kekuatan yang ada di dunia ini terpusat pada dua negara saja) kembali menjadi unipolar (Unipolar: Suatu sistem di dunia di mana kekuasaan, kekuatan dan pengaruh hanya terpusat pada satu negara saja).

Pemikiran Francis Fukuyama yang melihat perubahan setelah selesai Perang Dingin misalnya, dalam bukunya “*The end of History? After the battle of Jena*”, *The national Interest* 18 (1989, hal 15-25); terlihat juga berada dalam dua alur yang berbeda. Pada alur pertama, merujuk pada sejarah pemikiran mengenai prinsip pertama yang sah dari organisasi sosial politik yang memerintah.

Argumennya secara pokok merupakan sesuatu yang normatif. Pada akhir abad ke-20, kombinasi demokrasi liberal dan kapitalis telah terbukti superior di atas alternatif sistem politik dan ekonomi manapun. Alasannya terletak pada kemampuannya untuk memuaskan dorongan-dorongan dasar dari sifat alami manusia. Salah satunya adalah keinginan terhadap materi dan kekayaan, dan yang lain (yang lebih fundamental) adalah keinginan akan ‘pengakuan’ harga diri sebagai manusia dari orang-orang di sekitar kita. Kapitalisme adalah sistem ekonomi terbaik untuk memaksimalkan produksi barang dan jasa, dan untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan

dan teknologi demi menghasilkan kesejahteraan. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi hanya merupakan bagian dari sejarah. Fukuyama menggunakan konsep ‘pengakuan’ (*recognition*) untuk menerangkan superioritas demokrasi liberal di atas rival-rivalnya di arena politik. Meski pertumbuhan ekonomi dapat dimajukan di bawah bermacam-macam rezim politik, termasuk fasis, namun hanya demokrasi liberal yang dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia akan pengakuan, kebebasan politik, dan kesamaan.

Alur pemikiran yang kedua (bersifat realist sebagai kemenangan democrat liberal-penulis), Fukuyama juga mempelajari Plato dan Alexandre Kojeve. Dari Plato, Fukuyama meminjam ide Thymes, yang diterjemahkan secara beragam sebagai semangat (*spiritedness*), dorongan (*courage*), atau hasrat (*desire*). Megalothymia, adalah Thymos orang-orang besar, penggerak besar sejarah seperti Caesar dan Stalin. Sebaliknya, Isothymia adalah tuntutan sederhana akan pengakuan yang lebih berbentuk *Equality* (kesamaan) daripada superioritas.

Sejarah merupakan bentuk perjuangan antara keinginan-keinginan Thymos ini. Kejeniusan demokrasi liberal adalah karena dia mempersentasikan titik akhir dari perjuangan itu. Dialektika ‘tuan-budak’ adalah motor utama sejarah yang tidak

akan pernah bisa stabil sepanjang manusia terbagi antara ‘tuan-budak’. Yang terakhir tidak akan pernah menerima status subordinat mereka, dan kejeniusan demokrasi liberal kapitalis adalah kemampuannya untuk merekonsiliasi keingin Thymos.

Shadia B Druri “*The end of History and the new world order*” *International Journal* 48 (1992/93, hlm 95); meringkas argumen Fukuyama sebagai berikut: liberalisme mendamaikan dan mendepolitisasi dunia aristokrat mengenai ‘ke-tuanan’ dengan mengubah politik ke arah ekonomi. Liberalisme menentramkan Thymos para tuan sebagai orang pertama dan menggantinya dengan Thymos budak sebagai orang terakhir. Sebagai ganti superioritas dan dominasi, masyarakat berjuang untuk kesamaan (*equality*). Mereka yang tetap dominan memilih sistem kapitalis untuk mengejar kekayaan sebagai jalan keluar mereka.

Anthony Giddens, dekn LSI UK, dalam bukunya, “*Beyond left and right*” (Cambridge: Polity Press, 1994, hal 4), menyatakan dunia di penghujung abad ke-20, yang dicirikan “*manufactured uncertainty*” mengungkapkan sebuah kenyataan yang khas masa sekarang. Yaitu masa yang diliputi ketidakpastian. Oleh karena itu, akan mengarah kepada “*high consequence risk*” yang harus diambil oleh manusia pada akhir abad ke XX ini adalah jenis risiko yang mempunyai

konsekuensi yang amat jauh. Hal ini menjadi isu-isu yang relevan, karena akan melahirkan kekuatan masyarakat baru yang berkorelasi antara individu dan kolektif yang lebih menekankan kepada keadilan global yang akan dihadapkan kepada universalisme baru.

Penulis berbeda dengan Giddens, yang hanya menekankan kepada kemakmuran model Barat (*welfare*). Ini diterima sebagai suatu proses demokratisasi sosial pada masyarakat Barat. Khususnya dalam mempromosi kesejahteraan terhadap penduduknya, menyediakan berbagai pertahanan dalam upaya mencegah agresi ataupun infiltrasi serta mempertahankan pola hidup serta nilai-nilai masyarakatnya. Akan tetapi, keputusan jangka pendek negara, demi keuntungan sesaat, memiliki risiko memperburuk orang kelompok atau negara lain, dan pengejaran terhadapnya, dalam kondisi tertentu, tidak mustahil akan mengeluarkan biaya yang lebih besar.

Itu sebabnya, kepentingan nasional, suatu negara, yang didefinisikan secara “chauvinistic” oleh Machievelli dianggap sebagai counter produktif. Dalam menanggapi perubahan ini, Margareth Mead, seorang antropolog, menyatakan “*Substantially we all share, the same atmosphere today, and we can only save ourselves by saving other people also. There is*

no longer a contradiction between patriotism and concern of the world.” (Mead Margareth, (1968) “warfare Is Only an Invention—Not a Biological Necessity” pp.270-274 in Leon Bramson and George W.Goethals (eds), War, New York: Basic Books).

Samuel P. Huntington yang berjudul “*The Clash of Civilizations and the Remaking World Order*”, 1996 :28, dalam upaya melihat dunia baru setelah konflik Perang Dingin berakhir “*In the new world the most pervasive, important, and dangerous conflict will not be between social classes, rich and poor, or other economically defined ethnic groups, but between peoples belonging to different cultural entities*”. *Tribal wars and ethnic conflicts will occur within civilization. However, carries with it the potential of escalation as other states and groups from this civilization rally to the support of their “kin countries”*”.

Argumen Huntington di atas agaknya berbeda dengan penulis serta berbagai pakar lainnya. Sesungguhnya *Class of civilization* yang terjadi, hampir sebagian besar ditentukan oleh konflik antar *social class, rich and poor, or other economically defined ethnic group*, yang berasal dari peradaban Barat. Sejarah telah banyak mencatat konflik ideologi bersifat laten, yang telah berjalan ratusan tahun. Melalui kebangkitan

kapitalisme pada abad ke XV yang telah menghasilkan tatanan sosial yang rapuh pada masyarakat terjajah, karena berjalan berkelindaan dengan imperialisme dan kolonialisme. Huntington tidak mau menerima kritik hanya dengan paper pendek yang akhirnya menjadi salah satu dorongan serta tantangan bagi penulis buku maupun para pemerhati studi ilmu hubungan internasional.

Dalam tatanan kapitalisme model dominasi, melalui kelas sosial terdapat tekanan yang keras atas dasar hegemoni, pemaksaan ataupun penekanan dalam konteks sosial. Hegemoni ini, sebelumnya sudah pernah digugat Marx melalui hantu '*sosialisme dan komunisme*'. Keanehannya para pakar Barat umumnya tidak mengerti tentang kritik Marx. Umumnya para pakar lebih menekankan pada dimensi saintifik, tidak pada dampak ideologi. (For a discussion of Marxian methodology, see Bertell Ollman. "Marxian and Political Science: Prolegemenon to a Debate on Marx's Method." *Politics and Society* (Summer 1973), pp. 491-510. See. *Scope and methods of political science; An introduction to the methodology of political inquire*, Alan C. Isaak 1969, 1975, 1981, p.196) (ataukah benci sehingga tidak mau membaca secara teliti?). Contoh lain misalnya, lahirnya NAZI yang ditandai atas ketidak-puasan Jerman terhadap keputusan Komprensi

Versailles setelah PD I. Demikian pula tuduhan atas nama konflik kultural yang terjadi pada ‘kelompok jihat Islam’, adalah reaksi dari generasi muda Islam yang lahir di Eropa yang tergugah atas berbagai kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan Eropa yang mengambil ide Marx dan Hitler sebagai jawaban atas pencarian identitas yang bersandarkan kepada Islam. (Fukuyama, 2006).

Argumen ini juga sangat mengganggu penulis, disebabkan jihad yang tumbuh dalam spirit Islam “kesadaran” manusia akan kemerdekaan karena adanya Tauhid dan bukan karena pengaruh atau inspirasi dari “ideologi revolusioner” dari kelompok militant yang tidak sejalan dengan aqidah Islam sangat terbatas argumentasi tentang istilah jihad tidak selalu dalam konteks dengan kejahatan.

Peristiwa pemboman *World Trade Centre* (WTC), di New York, Amerika Serikat pada awal abad ke-21, menandai adanya perubahan yang signifikan dalam konteks kebijakan luar negeri maupun hubungan internasional antar negara dalam arena persaingan global. Fenomena baru yaitu konflik ataupun perang melawan terorisme memiliki implikasi yang luas serta bersifat nasional, transnasional dan internasional. Terorisme awalnya kurang mendapat perhatian dunia, karena substansi dianggap bersifat lokal dan regional. Tragedi WTC: ditandai

dengan besarnya korban sipil di daratan dan pusat keuangan dunia – New York, Amerika Serikat.

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebagai satu-satunya super-power yang sebelumnya lebih menekankan ke konteks hak-hak asasi manusia (HAM), bersifat universal dengan ciri tidak lagi memilah negara, wilayah, tempat, ruang dan waktu telah berubah. Serangan terorisme terus berkembang ke arah yang tidak terkendalikan. Seperti juga serangan pagi hari ke stasiun kereta api Atocha di pusat kota Madrid, Spanyol. Spanyol sebagai negara anggota Uni Eropa memiliki keterkaitan paling erat dengan Amerika Serikat sekaligus menempatkan sejumlah besar tentara di Irak. Pemboman di kereta api Madrid, tercatat untuk pertama kalinya negara ini mengalami trauma, hampir 200 tewas dan kurang lebih 1500 luka-luka.

Fenomena ini menjadi signifikan, karena serangan terjadi selang tiga hari menjelang pemilihan umum. Pola serangan ini dapat dijadikan alasan sebagai bagian dari upaya untuk mengganggu ataupun mempengaruhi stabilitas negara serta pemilihan umum maupun publik opini rakyat Spanyol. Sebelumnya telah ada janji dari partai oposisi yaitu partai Sosialis, apabila memenangkan pemilu akan segera menarik pasukannya dari Irak. Kemenangan yang diraih oleh partai

Sosialis ini justru mulai menghawatirkan berbagai pemerintahan di Eropa.

6.2. Pendekatan Era Globalisasi

Pertama, adanya kekhawatiran tunduknya pemerintah berdaulat terhadap ancaman teroris akan membawa kesan secara simultan, sekaligus memberikan angin segar tumbuhnya teroris baru sekaligus ketidak-stabilan global. Prancis dan Jerman sebagai bagian dari negara Eropa yang kurang menyetujui serangan Amerika Serikat terutama ke Irak terlihat mulai menyadari bahwa pemerintah negaranya tidak dapat menutup mata ataupun berdiam diri terhadap adanya berbagai ancaman di masa depan. Sebagai contoh terjadinya berbagai pengeboman di Kenya, Indonesia (Bali) dan Inggris (London) juga ikut menjadi korban.

Kedua, runtuhnya Uni Soviet sebagai salah satu super-power melahirkan tatanan baru yang dikenal sebagai bagian dari *era globalisasi*, kekuasaan absolut sebelumnya di tangan aktor negara besar atau adidaya, secara evolusi mulai kehilangan pengaruhnya, meskipun perubahan sering kali disangkal. Fenomena ini terjadi karena adanya kecenderungan bahwa perubahan yang selama ini dilihat, hanyalah merupakan perubahan dalam perimbangan kekuatan antar negara serta

adanya kecenderungan, untuk tidak menganggap pentingnya kemungkinan perubahan fundamental dalam dinamika sistem internasional.

Proteksi ekonomi negara-negara maju yang selama ini dikembangkan melalui pasar bebas dan kompetisi, aturan tidak didasarkan atas harmoni antar negara. Perlindungan yang ketat terhadap keuangan, investasi modal asing dan distribusi dengan alasan kepentingan nasional menjadi sesuatu yang tidak konsisten. Berbagai tantangan serta kompetisi perdagangan antar negara telah menjadi hambatan utama dalam berbagai kerjasama internasional. Misalnya, pemanasan global, konferensi Doha, Qatar. (Contoh kemunduran terlihat dalam sidang tahunan ke 7 para menteri anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Geneva, Swiss. Diawali dengan optimisme bahwa Putaran Doha dapat diselesaikan pada tahun 2010). Asumsi sebelumnya, bahwa era konflik nilai maupun material telah berakhir khususnya dalam dekade 70 dan 80-an sebagai akibat pecahnya USSR yang ditandai dengan runtuhnya ‘tembok Berlin dan berakhirnya perang dingin (Cold-War). Ternyata yang terjadi sebaliknya, munculnya negara-negara calon super-power baru serta adanya wilayah-wilayah luas bagian dari USSR menjadi rawan dan rentan.

Kedua fenomena ini disebabkan karena ideologi dan pola pikir negara-negara adidaya yang keluar melalui implementasi kebijakan luar negeri tercatat sebagai berikut: Pertama, hanya memfokuskan terhadap akibat ataupun dampak berbagai fenomena konflik. Setiap aspek pemikiran, hanya bertumpu pada pemikiran pragmatis. Melalui tingkah laku, intuisi, persepsi, dan peranannya aktor-aktor negara ini hanya mampu berpikir dalam kerangka strategis negara yang bersifat jangka pendek. Kedua, informasi yang didapat dalam upaya pembuatan kebijakan luar negeri (*public policy*), ironinya dipakai ataupun digunakan sebagai acuan dominan, hanya bersifat geografis ataupun kronologis. Akibatnya, realitas fenomena menjadi terpotong-potong. Karena realitas ditentukan oleh etnisitas, yang selama ini harus diakui, telah mendominasi pola pikir pemimpin negara ataupun para pembuat keputusan dalam negara, elit serta cendekiawan Barat. (The Cultural Atlas of Islam Karya Isma'il R Al-Faruqi dan Lois Lamy Al-Faruki terbitan Macmillan Publishing Company, New York, Amerika Serikat, 1986).

Ciri-cirinya terlihat sebagai berikut :

1. Pendekatan *geografis* dalam kajian ilmu hubungan internasional telah mendorong berbagai materialnya

berdasarkan wilayah. Dengan menekankan, ciri-ciri khusus sejarah wilayah sebagai esensi ataupun substansi tidak menyatukannya, sebagai suatu bagian secara keseluruhan atau menglobal. Metode ilmiah ini, hanya membenarkan data indrawi, material, kuantitatif, dan terukur. Dan telah membuat mereka tidak dapat melihat esensi yang termanifestasi dalam substansi atas berbagai fenomena politik, ekonomi dan sosial. Dalam telaahannya, akan senantiasa mencurigai segalanya, baik yang bersifat penilaian maupun bersifat universal. Data-data yang berbeda, dianggap sebagai relatif, subyektif ataupun bersifat pribadi.

2. Tabiat atau watak hegemoni yang dikenal dalam motto "*wright or wrong is my countries*", telah melahirkan berbagai individu, yang hanya berpikir dan bertindak atas dasar materialis yang dikaitkan dengan negara. Menghalalkan negara untuk berbuat apa saja, secara rahasia ataupun terbuka, secara halus ataupun kasar, terlihat selama ratusan tahun yang lalu. Khususnya pada zaman imperialisme dan kolonialisme, dalam upaya membangun dan memberikan kekayaan kepada negara di mana kapitalisme menjadi dominan, yang telah ditentang dan

digugat oleh Marx sebagai “hantu sosialisme” sejak abad ke-18, masih terus berjalan hingga saat ini.

3. *Stereotype*. Tuduhan yang sengaja dijatuhkan dan dijadikan konsep dalam bentuk propaganda, yang hanya didasarkan atas kecurigaan dan sekaligus dipakai sebagai alat propaganda baik domestik ataupun internasional. Penggunaan stereotype, tentu saja merugikan, karena berbeda dengan kenyataan di atas, dengan berbagai fenomena yang ada. Walaupun dulu pernah terjadi akan tetapi seiring dengan perubahan, terjadi pula perubahan sebagai akibat kemajuan pola pikir dan berbagai tuntutan sosial dan ekonomi, terutama kemajuan negara-negara maju.

Kemajuan sains dan teknologi, revolusi informasi dan teknologi dengan menyebarnya internet, televisi, terjadi hampir pada semua aspek kehidupan manusia secara menyeluruh atau global. Sebelumnya berbagai peristiwa atau fenomena dunia yang terjadi di belahan dunia lain membutuhkan waktu berbulan-bulan ataupun lebih lama. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di hampir seantero dunia dapat dijadikan topik berita pada saat yang sama. Kapitalisme yang memanfaatkan teknologi telah menggiring terjadinya ekspansi dan integrasi dari berbagai aktifitas ekonomi melalui apa yang disebut

dengan revolusi teknologi dalam informasi dan komunikasi. Khususnya “network informasi” perdagangan dan informasi keuangan, memungkinkan atau menciptakan terjadinya ‘pasar’ pada berbagai wilayah di dunia yang lain. Teknologi komunikasi telah memberikan revolusi terhadap diplomasi antar negara. Aktor-aktor negara dan non-negara ini dengan mudah dapat berkomunikasi menyelesaikan berbagai masalah hubungan antar negara. Pertanyaan sederhana yang muncul dari kemajuan sains dan teknologi ini yang telah memberikan potensi kesejahteraan pada manusia. Penggunaannya mampu mengangkat standar hidup miliaran manusia yang hidup dalam kemiskinan. Atau, mereka tetap berkonsentrasi menumpuk kekayaan kapitalis yang lebih besar seperti apa yang terjadi di negara-negara adidaya.

Pandangan tentang globalisasi dalam konteks kebijakan luar negeri dan hubungan internasional akan memberikan gambaran yang luas pada negara-negara yang baru berkembang di berbagai wilayah untuk mampu melahirkan sistem baru. Mekanisme sistem yang dikembangkan, berkaitan dengan munculnya, apa yang disebut kekuatan baru dalam fenomena internasional, transnasional dan nasional. Pertimbangan geo-strategi sangat diperlukan negara– negara baru berkembang, juga dimaksudkan untuk mencari suatu solusi, dengan cara

melahirkan berbagai sarana atau institusi dalam menggiring kekuatan negara-negara tersebut melalui berbagai kebijakan di masa mendatang. Mencoba untuk mentransformasikan institusi-institusi itu, khususnya dalam masyarakat di mana kita berada, dalam upaya penyelesaian regional bila terjadi konflik.

Argumentasi yang menyangkut tatanan sistem kapitalis “borjuis” dalam era globalisasi, juga akan meliputi perubahan keseimbangan melalui berbagai aspek kekuatan pada level ekonomi internasional. Yaitu perdagangan, keuangan, dan berbagai pertumbuhan ekonomi khususnya di benua Asia. Tercatat adanya fenomena baru yang berkaitan dengan ekonomi, yaitu dengan munculnya asumsi ‘domino ekonomi. (Teori domino: Teori Domino atau yang lazim disebut Domino Effect adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa apabila satu negara telah menganut ideologi tertentu). Sebelumnya didasarkan atas nama ideologi dan politik dalam keterkaitan pada politik internasional. Arus globalisasi akan melahirkan kecenderungan baru dalam ekonomi internasional yaitu domino ekonomi, di mana krisis pada satu aspek ekonomi negara adidaya, akan mempengaruhi atau melahirkan krisis moneter dan finansial yang sama di berbagai negara lainnya.

Adanya konflik nilai-nilai material dan spiritual, individualism versus kolektifism, traditionalism versus

modernism, sentralisasi versus desentralisasi, di samping ketidak-setujuan dalam nilai-nilai dasar moral terhadap nilai-nilai dasar lainnya ‘konsep materialisme’ dalam kapitalisme terlihat dalam pertarungan ataupun kompetisi ekonomi, teknologi dan politik setelah pudarnya konflik ideologi. Globalisasi yang digerakkan oleh berbagai pengaruh, khususnya ekonomi, politik dan sosial, yang menjadi pengaruh dominan, yaitu ekonomi, teknologi dan politik akan mengubah pola kehidupan manusia sehari-hari.

Sumber-sumber konflik yang dihadapi sekarang ini maupun ke depan dalam sistem dunia telah meningkat dari sejumlah keterkaitan antar negara serta multi-dimensional. Yang menjadi perhatian utama di sini antara lain : meningkatnya dampak lingkungan atau kerusakan bumi terhadap adanya aktivitas manusia, menipisnya sumber-sumber alam yang diperbaharui, meningkatnya sejumlah besar penduduk dunia, meningkatnya gap antara negara-negara maju dengan negara-negara baru berkembang serta ketergantungan terhadap teknologi. Di sisi seperti apa yang dikonsepsikan Herman Kahn sebagai *sensate* (See H. Kahn and A.J. Wiener, *The Year 2000; a Framework for Speculation on the Next Thirty Years*, Macmillan, New York, 1967: R.Aron, *Progress and Dillution: the Dialectics of Modern Society*, Pall Mall

Press, London, 1968; J.D. Douglas (ed), *Freedom and Tyranny : Social Problems in a Technological Society*, Knopf, New York, 1970. Dalam buku Zianuddin Sardar, *The Future of Muslim Civilization*, p. 80, Mansell Publishing Limited, London and New York, first edition 1987). (antara lain : empiris, kedunian-ini, sekuler, humanistik, pragmatik, utilitarian dan hedonistik---meningkatnya tren terhadap kebudayaan), stimulasi inovasi tidak didorong oleh kebutuhan nyata tetapi yang terjadi adalah pertumbuhan dan konsumsi yang tidak sama, meningkatnya pengangguran serta meningkatnya isolasi terhadap alam, keterasingan manusia terhadap alam, orang lain dan dari dirinya sendiri. Keadilan, di masa depan adalah rentan terhadap konflik yang tiada akhir, menjadi tuntutan bagi semua umat manusia. Sejarah telah mencatat, kebanyakan manusia secara umum telah menjadi korban, atas nama pemenuhan kepentingan nasional negara yang lebih kuat dalam kapabilitasnya, demi untuk melindungi rakyatnya. Melalui teori keadilan global inilah harapan miliaran umat manusia, khususnya, di negara-negara baru berkembang.

Secara umum terdapat dua pemikiran teoretis, dalam perspektif ilmu hubungan internasional. Yaitu para pakar yang mengejar apa yang disebut riset damai '*Peace Research*' yang berkaitan dengan pendekatan ataupun metodologi *Behavioral*

terhadap resolusi konflik dan pencegahan adanya peperangan. Di sisi lain, terdapat para pakar lain termasuk penulis khususnya yang berbicara tentang aturan dunia “*World Order*” dalam usaha untuk memberikan respons terhadap perubahan yang begitu cepat. Atau proses globalisasi dalam sistem global atau internasional yang memberikan perhatian terhadap berbagai isu kontemporer. Seperti di antaranya, yang menyangkut problem kependudukan, pertumbuhan, sumberdaya alam dan manusia, masyarakat dan lingkungan, difokuskan pada kemiskinan, serta keadilan “*dehumanization*”, dalam sistem internasional terlihat dalam perdebatan akhir abad ke-20.

Berbagai fenomena di atas dikaitkan dengan pemikiran dalam perkembangan teori-teori normatif, meskipun keduanya pakar-pakar empiris dan normatif mungkin dimotivasi oleh perhatian-perhatian yang sama karena kehancuran yang luar biasa oleh perang, mereka bergerak di dalam domain kekuasaan masing-masing. Pakar-pakar normatif diharapkan untuk menyediakan dasar-dasar logika dan filsafat untuk pilihan-pilihan nilai dari para pembuat keputusan dan yang lain menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seperti kapan perang itu dapat di jusifikasi ? Apakah negara-negara kaya dan masyarakat-masyarakatnya mempunyai kewajiban-kewajiban

untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung sebagai kolega atau kelompok negara-negara di dalam ‘*dunia ketiga*’?

Fokus diarahkan kepada berbagai alternatif sekaligus prediksi di masa mendatang “*Alternative World Future*”, di mana kedua pendekatan, seperti disampaikan oleh Beres dan Targ “*are avowedly normative in that they both aim at global transformation along the lines of certain preestablished value hierarchies*”. Dari kedua pendekatan ini, penulis mencoba untuk mengkombinasikan sebagai studi interdisipliner, melalui penggabungan atas dua disiplin ilmu. Yaitu politik dan ekonomi internasional. Metodologi diarahkan kepada penggabungan metode kualitatif dan kuantitatif sebagai sintesis ke arah normatif. Kedua pendekatan ini adalah interdisipliner, sebagai alat intelektual menuju ke arah *teori keadilan global*. Demikian juga dugaan ataupun prediksi yang perlu dibuktikan, diarahkan ke masa depan dalam konteks geo-strategi negara yang memiliki jangka pendek negara (8 tahun) dan prediksi dalam jangka panjang (15 tahun), (*analysis, forecasting and prediction*)

Dari sini lahir pertanyaan terkait: pendekatan ilmu sosial yang difokuskan dalam ilmu hubungan internasional, melalui kajian politik dan ekonomi. Faktor-faktor apa saja

yang menjadi akar konflik serta dinamika perubahan dalam kajian hubungan internasional? Apa substansi dan metodologi dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu hubungan internasional? Stimulasi dan katalisator serta gap yang terjadi oleh penggunaan kekuatan internasional. Apa implikasi *tatanan kapitalis bourgeois* (Takabur) dalam dominasi terhadap aspek politik dan ekonomi dalam sistem global? Konsep yang ditawarkan melalui periode-periode sistem *maintainer, transitioner and transformer*.

Apakah persaingan dan perubahan serta tekanan kebijakan politik luar negeri dan militer negara adidaya Amerika Serikat versus Uni Soviet dan sekaligus memasuki era baru telah selesai setelah Perang Dingin? Apakah sistem kapitalis yang memberikan tekanan terhadap nasionalisme dan demokrasi serta risiko kerjasama dan konflik internasional dalam hubungan antara aktor-aktor negara dan non-negara yang berkaitan dengan kepentingan serta keamanan nasional versus kemiskinan dan keadilan internasional akan terus berjalan? Bagaimana serta mengapa adanya pengaruh evolusi dan perubahan pada sistem global terhadap negara beserta institusi-institusi yang berperan seperti PBB sebagai lembaga yang menangani ataupun menengahi berbagai konflik internasional? Apa yang dapat diberikan oleh adanya teori baru

yang berkaitan dengan *pendekatan normatif* dalam *teori keadilan global* sebagai salah satu alat kajian ilmu hubungan internasional sebagai upaya pencegahan terjadinya perang dunia? Pertanyaan akhir di masa mendatang apakah harus terjadi pilihan dalam sistem global: membangun kembali pola baru distribusi dalam ekonomi ataukah konflik kadar tinggi yaitu terjadinya bukanlah suatu yang mustahil Perang Dunia III?.

6.3. Pembahasan Pandangan Tentang Strategi Global

Dalam kajian penelitian sebelumnya diatas telah disinggung mengenai penekanan terhadap pendekatan geografi yang mendorong berbagai materialnya berdasarkan wilayah atau regional. Konsekuensinya, politik dunia berasal dari fakta-fakta fisik, wilayah serta manusia. Pada akhirnya, melalui fakta-fakta terlihat mengalirnya—gerakan-gerakan manusia yang berkaitan dengan segala sesuatunya di hamparan bumi. Gerakan-gerakan ini melahirkan substansi ataupun esensi strategi. Meskipun strategi dianggap sangat penting seperti misalnya dalam seni tingkah laku militer, juga menjadi signifikan dalam implementasi keputusan politik dan ekonomi yang juga membutuhkan gerakan yang tampak dalam strategi. Fenomena gerak mungkin berupa pemesanan ataupun

kebutuhan yang mendesak sebagai sesuatu yang harus bergerak seperti misalnya; manusia, uang dan persenjataan yang diperkuat oleh ideologi dan teknologi.

Terpecahnya sistem feodal secara universal menggiring dengan segera kuatnya peranan negara serta pemerintahan dan menuju kepada peranan-peranan yang tidak dapat dikendalikan karena tidak adanya kekuatan di atas negara (sistem anarki) . Negara pada dasarnya melahirkan aktor-aktor yang dominan, meskipun seringkali berasal dari kelompok elit yang dipengaruhi oleh ideologi yang kaku. Sejarah mencatat orang-orang pada zaman pertengahan berpengalaman dengan beberapa tipe-tipe organisasi politik yang melahirkan strategi global melalui ideologi hingga sekarang ini.

Kebangkitan kota-kota dalam negara, sebagai contoh seperti Venetia, Italia, yang merupakan salah satu skema alternatif, pada organisasi ekonomi dan politik yang cenderung menuju ke arah global. Pada formasi yang dikaitkan dengan bentuk konfederasi yang didasarkan atas keterkaitan antar kota khususnya pada kepentingan-kepentingan perekonomian domestik. Yang paling terkenal dalam persekutuan ini adalah sistem merkantilisme sebagai 'Hanseatic League' yang didirikan dalam tahun 1358 untuk memproteksi perdagangan dalam melawan pambajakan laut. Peristiwa ini telah

menyebabkan 70 kota-kota di Eropa bergabung, dari wilayah Brugs, Belgia ke Novograd, Rusia, dan sekaligus menjadi kekuatan ekonomi yang besar. Apa yang penting di sini adalah negara-negara kota atau aliansinya menjadi fokus dalam organisasi politik. The Hanseatic League berakhir pada tahun 1667. Keberuntungan Venesia dan kota-kota lain yang berkembang, tetapi secara perlahan terlihat mulai menghilang. Kegagalan atas fenomena ini serta bertahannya negara untuk diidentifikasi menjadi alasan-alasan yang pragmatik. Hal yang menjadi penting dan esensial adalah pada 'kedaulatan negara yang menggantikan liga kota-kota'. Logika institusional mendorong kearah kemajuan dalam memobilisasikan sumber-sumber daya yang ada dalam masyarakat. Negara pada akhirnya mendapatkan perlengkapan yang lebih baik untuk mengatur perdagangan, menyediakan pertahanan dan memberikan kebutuhan-kebutuhan lain terhadap masyarakat.

Konsekuensi kemenangan atas nama negara sebagai sesuatu yang paling dominan-mode pemerintah—telah menemukan konsekuensi-konsekuensi secara mendasar untuk sistem internasional. Satu di antara ini adalah bahwa negara-negara menjadi aktor-aktor utama setelah 'konferensi Westphalia -1648', awalnya berlaku sistem internasional atau juga sering disebut sebagai lahirnya negara modern. Aktor-

aktor negara merupakan bintang yang terkenal hingga masa sekarang ini. Kebanyakan dari aksi-aksi aktor negara yang muncul dalam 'stage dunia' adalah tentang negara dan kelompoknya yang telah berinteraksi sejak awal (pionir). Lebih detail lagi dalam kenyataan bahwa negara-negara besar dan kuat ini tidak mengakui adanya otoritas di atasnya dalam sistem internasional. Dengan demikian, tidak ada otoritas pusat kekuasaan untuk memperkuat keteraturan internasional, apalagi mengatas-namakan keadilan global dalam hubungan antar negara.

Hubungan internasional dalam sistem politik anarki yang dikenal selama ini sebagai sesuatu yang harus diterima begitu saja. Meskipun tidak dimaksudkan bahwa dalam sistem internasional merupakan suatu kekacauan, tetapi hirarki informal yang didasarkan atas nama kekuatan negara yang dianggap lebih kuat, tetapi terbukti tidak mampu memperkuat keteraturan internasional. Sistem internasional biasanya beroperasi dalam suatu cara yang disebut sebagai masuk akal (reasonable). Ini terjadi karena umumnya negara-negara bangsa menemukan adanya kepentingan nasional untuk dipenuhi sesuai dengan harapan rakyatnya. Ketika suatu negara memutuskan bahwa itu adalah kepentingannya untuk ke luar pada sistem atau aturan internasional yang biasanya telah

diakui seperti yang pernah terlihat ketika Irak mengintervensi Kuwait dan Amerika Serikat mengintervensi Irak.

Kebangkitan kedaulatan negara sebagai aktor utama ditandai melalui suatu perubahan besar dan mungkin dapat dikatakan sebagai sifat alamiah sistem modern atas nama negara. Dengan diikuti oleh 'peace of Westphalia' negara-negara nasional terus-menerus mengumpulkan kekuatan seperti terlihat dalam kerajaan: Luis XIV dari Prancis (1643-1715), Frederick II dari Prusia (1740-1786) dan Peter the Great dari Rusia (1682-1725), mengkonsolidasikan kerajaan-kerajaan mereka dan bahkan memperluas kerajaannya menjadi 'empire'. Terdapat jarak kecepatan pertumbuhan pada dalam abad XVIII dan XIX yang terlihat dalam 3 tema besar yang muncul, yaitu, kehadiran sistem negara berdaulat yang modern, westernisasi sistem internasional dan lahirnya bibit sistem multipolar, bipolar dan unipolar.

Pada awal abad ke XVIII, umumnya raja Prancis memproklamkan teori tentang kedaulatan dan pemerintahan negara oleh apa yang disebut 'hak suci- le'tat l'estmoi-negara adalah saya' yang diproklamkan Luis XIV. Juga raja lain yaitu Luis XVI 1793. Raja ini telah kehilangan kepalanya terhadap asumsi awal bahwa rakyat yang mewakili kekuasaan negara dengan slogan, negara: dari rakyat, oleh rakyat dan

untuk rakyat yang dikenal sebagai doktrin kedaulatan yang populer. Kebangkitan kembali kedaulatan populer telah meletakkan dasar sejak hilangnya demokrasi orang-orang Athena dan republik Romawi. Hal ini menandai suatu perubahan besar dalam tujuan pada siapa negara dan bagaimana negara seharusnya diperintah. Hingga sekarang ini kepercayaan yang dimenangkan adalah raja-raja yang memerintah oleh hak-hak suci terhadap keduanya—teritorial dan rakyat, pada siapa yang menjadi subyek adalah bukan rakyat. Dapat dimengerti ketika itu rakyat hanya memiliki hak yang terbatas yang dikaitkan dengan negara. Pada masa itu adalah hak raja adalah bukan hak rakyat. Orang-orang Amerika Serikat sebagai pionir (1776) dan Prancis (1789) di mana revolusinya telah menentang filsafat ini. Demokrasi yang telah dibangun melalui revolusi dan prinsip-prinsip keutamaan kekuatan politik berakhir pada rakyat tidak pada monarki. Kedaulatan populer juga diperluas dengan konsep nasionalisme untuk memasukkan identifikasi massal dengan partisipasi dalam masalah-masalah negara. Jika rakyat memiliki negara dengan cara memiliki keduanya yaitu suatu rasa emosi yang besar terhadapnya serta tanggung-jawab yang besar untuk mendukungnya.

Suatu simbol pada perubahan adalah bahwa Napoleon Bonaparte dari Prancis (1799-1815) sebagai suatu negara

pertama yang benar-benar memiliki rasa patriotik pada draftnya/catatannya tentang kemampuan untuk membangun negara sebanyak 1 juta orang. Sejak pada awalnya di Amerika Serikat dan pada khususnya di Prancis, nasionalisme dan demokrasi menyebar melalui Eropa dan dengan cepat mempengaruhi pemerintah monarki dan konsep hak-hak suci kerajaan—runtuhnya dinasti-dinasti di Cina, Jerman, Austria-Hongaria, Rusia dan kerajaan Ottoman, dan di mana saja pada awal ke XX menandai berakhirnya pemerintah monarki. Nasionalisme dan kedaulatan populer adalah juga anti-tesis kepada kerajaan—kelompok multi-etnik yang besar dan dalam beberapa kasus kerajaan kolonial bahwa 'fenomena baru-kedaulatan nasional' dalam awal abad XIX telah dimulai sampai dengan PDI. Kerajaan kolonial — British empire, French empire, Belgium empire — jatuh dan pecah dalam pertengahan dan akhir abad ke XIX. Demikian juga kerajaan multi-etnik yang pada akhirnya meledak pada tahun 1991, ketika Uni-Soviet terjadi terfragmentasi kedalam 15 negara merdeka dan masuk ke dalam negara-negara Uni Eropa.

Penelitian tentang perubahan global disini difokuskan melalui adanya imej: tatanan kapitalisme borjuis sebagai kekuatan yang masih dominan terlihat dalam arus globalisasi serta keterkaitannya dalam kejatuhan keseimbangan kekuatan,

diplomasi, ketergantungan ekonomi dan intervensi kemanusiaan. Mendemostrasikan mengapa dasar pengertian politik internasional akan beralih dari pandangan aliran realis yang diperkuat kelompok konservatif ke aliran institusionalis menuju ke sistem distributif. Fokus diarahkan ke era baru yaitu adanya kekuatan dalam globalisasi yang telah memaksakan terjadinya dinamisasi perubahan kekuatan geo-politik baru dan keamanan yang bersifat regional yang diperkuat melalui hubungan trans-nasional yang memiliki substansi, sifat, dan fungsi global. Dari sini melahirkan tatanan baru politik dan ekonomi sekaligus menjadi unsur stabilitas alternatif sebagai bagian dari tawar menawar kekuatan melalui perubahan atas nama multipolar, bepolar, unipolar dan multipolar.

Menelusuri implikasi dari peranan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara superpower di dalam arena internasional setelah jatuhnya Uni Soviet dan terjadinya serangan 11 September 2001 serta krisis ekonomi global yang terjadi akhir-akhir ini (2008). Terjadinya implikasi perubahan yang saling berlawanan dihadapkan kepada kebijakan luar negeri AS dalam dimensi politik internasional, ekonomi kapitalis liberal, teknologi dan kultural disamping kekuatan militer, anti terorisme melalui intervensi militer serta dampaknya terhadap nasionalisme, demokrasi dan partai

politik. Pemerintahan Federal Amerika Serikat mewakili kepentingan domestik, terjebak secara internal maupun eksternal, sehingga terjadi kesempitan dalam ruang lingkup pembuatan keputusan luar negeri di arena internasional.

Terdapat berbagai kriteria sehingga tidak bisa dilihat melalui satu lensa. Perubahan dalam kekuatan global yang disaksikan mungkin bisa ditarik ke pengalaman sejarah, yaitu kebangkitan dan kehancuran negara atau imperium, seperti misalnya Cina, India dan Iran sebagai contoh dari sejarah lahir dan jatuh banggunya suatu negara ataupun imperium. Akhir dari Perang Dingin menggeser existensi ancaman timbal balik dalam upaya memastikan pencegahan senjata nuklir, meskipun demikian di sisi lain dis-integrasi Uni Soviet telah melahirkan adanya instabilitas baru. Pecahnya Soviet Empire melemahkan negara-negara sosialis sekaligus menjadikan sejumlah wilayah luas yang tidak aman.

Asumsi Kant dan Wilson bahwa sumber terjadinya bencana karena tidak adanya kerjasama negara-negara demokrasi. Di sisi lain negara pemenang perang menuntut adanya upeti, yaitu hak veto. Surutnya dukungan negara-negara maju melalui bantuannya, muncul konflik regional pada akhirnya akan mendorong lahirnya institusi regional baru. Di sisi lain perkembangan regional menuntut adanya penyelesaian

regional. Dengan demikian pula konflik tidak lagi bersifat kultural seperti tesis Huntington yang dapat diperdebatkan, akan tetapi konflik internal sebagai akibat kemiskinan serta tuntutan kesejahteraan umat manusia khususnya di negara-negara miskin yang menuntut keadilan secara global. Untuk mengerti arena internasional diperlukan intuisi dan rasa kebersamaan sebagai suatu seni tersendiri.

Tujuan penelitian awal dalam penciptaan teori baru yang dimaksudkan untuk: menelaah perkembangan, keterbatasan serta pengaruh perubahan dalam sistem internasional yang bersifat anarki dalam tatanan kapitalis burjuis yang bukan merupakan lahan yang subur untuk perubahan dan sekaligus perlu segera penciptaan lembaga regional untuk menyelesaikan konflik regional. Sejak dari liga bangsa-bangsa setelah selesai PD I dan PD II konflik terus berjalan. Untuk menjelaskan dan mencoba memahami perubahan geopolitik tersebut ditelusuri berbagai unit dalam substansi dan unsur ataupun aspek dinamisasi digunakan berbagai konsep yang telah melahirkan Teori Keadilan Global. Konsep-konsep yang ditawarkan dalam teori ini kemudian dijadikan instrumen yang diharapkan mampu memberikan analisis yang tajam terhadap dampak transformasi internasional dalam era globalisasi dalam kaitan geopolitik, pembuatan

keputusan, ekonomi dan perdagangan internasional, diplomasi, kemiskinan dan keadilan serta mengurangi kadar konflik .

Filsafat politik tradisional mencatat hukum moral atau kemanusiaan hanya berlaku pada hukum perjanjian kerjasama antar negara. Hukum perang memberikan suatu sugesti: mengapa perang dalam kadar tinggi misalnya: PD I dan II bisa terjadi dan apa dasar eksplanasi dilihat dari sisi kemanusiaan dan keadilan. Tantangan terhadap kemanusiaan kemudian menjadi tujuan akhir ilmu hubungan internasional sebagai ilmu yang mampu menggabungkan melalui metodologinya serta memiliki metode kualitatif melalui studi kasus dan kuantitatif yang bersifat deskriptif, analisis dan prediktif, yang tidak berkaitan dengan benar atau salah, tetapi berguna atau tidak, akan tetapi bentuk argumen solid atau tidak. Para pakar atau intelektual akademisi atau siapa saja yang berminat dalam kajian hubungan internasional diharapkan untuk dapat dijadikan alat dalam upaya mencegah konflik atau perang--kadar rendah atau tinggi---di masa mendatang.

Sementara itu mazhab pemikiran pertama dianggap terfokus pada ungkapan singkat “hasil” ekonomi secara keseluruhan, tetapi mazhab kedua melihat pada ungkapan yang lebih panjang, “proses-proses “perubahan dalam industri-industri dan sektor-sektor industri tertentu (perbedaan antara

hasil dan proses adalah penting dan bunga-bunga yang mewarnai pendekatan-pendekatan teoritis). Mazhab pertama mengarahkan dirinya pada teori umum tentang penyebab keadaan ekonomi secara keseluruhan, sementara mazhab kedua memberikan bukti bahwa hasil-hasil serupa diperoleh dari penyebab-penyebab yang berbeda. Pengarang-pengarang tersebut agaknya menolak mazhab pertama dan menyimpulkan bahwa adalah sia-sia untuk mencari pola-pola umum ekonomi secara keseluruhan (paling tidak pada saat yang bersamaan). Argumen tentang ketidaksesuaian antara kedua jenis studi tersebut lebih dari sekedar masalah metode, tetapi berhubungan dengan latar belakang asumsi-asumsi tentang teori dan epistemologi.

Ilmu hubungan internasional kemudian dikenal memiliki fenomena yang luas, kompleks dan rumit dan untuk menjelaskan hubungan dalam implikasi politik internasional, tidak ada suatu *trend* atau *trouble* yang berdiri sendiri. Demikian pula upaya untuk memberikan pemahaman dalam berbagai akar persoalan terdapat berbagai konsep dasar ilmu hubungan internasional yang bersifat tesis dan anti-tesis. Sebagai contoh: konsep-konsep dasar yang menyangkut stabilitas dan instabilitas yang bersifat domestik, regional dan trans-nasional berkaitan erat dengan mekanisme dalam

pembuatan keputusan atas nama negara. Hipotesis atau asumsi sementara menjadi penting dalam upaya untuk mencari terjadinya berbagai hubungan. Siklus perkembangan hubungan di mana prediksi menjadi penting, oleh karena telah memasuki era baru.

Era yang dikenal akhir-akhir ini adalah globalisasi yang bukan hanya penting secara individual, kelompok masyarakat, ataupun negara, akan tetapi hubungan antar negara yang bersifat trans-nasional, yang akan menggiring ilmu hubungan internasional untuk menemukan varian baru. Pergeseran dalam arena internasional ke arah regional akan menggiring dominasi ilmu-ilmu sosial serta pengaruhnya termasuk di dalamnya ilmu hubungan internasional. Terjadinya perubahan generasi sebagai akibat pendidikan terfokus ke berbagai wilayah yang bersifat regional. Kesempatan mendapatkan pendidikan karena lebih murah di wilayahnya.

Perubahan geo-politik dalam ekonomi, politik dan kerjasama lembaga internasional dalam era baru menyambut abad ke-21 ditandai dengan adanya perubahan geo-politik-tatanan kapitalis burjuis--dalam konteks ekonomi, politik, sosial dan kerjasama lembaga internasional. Perubahan terjadi sesuai dengan isu, asumsi dan potensi konflik yang terjadi

sebagai hubungan sebab akibat antar negara besar yaitu Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina.

BAB VII

PENUTUP

Perang Dingin yang terjadi antara AS dan Uni Soviet memberikan implikasi yang luas dalam sistem politik internasional. Ketegangan dan persaingan ideologi dan politik antara kedua negara tersebut mampu menarik negara-negara lain masuk dalam lingkaran pengaruh mereka. Walaupun AS dan Uni Soviet tidak berhadapan dalam kondisi perang secara langsung selama periode tersebut, nyatanya Perang Dingin mengakibatkan perubahan geopolitik wilayah, konflik bersenjata berdarah yang menyebabkan korban jiwa, konflik internal dan perpecahan berbagai negara di dunia, sampai hampir terjadinya perang nuklir. AS dan Uni Soviet berupaya untuk memperluas pengaruhnya ke berbagai negara, tidak hanya di daratan Eropa, tapi juga di Asia, Afrika dan Amerika Latin. AS giat melakukan propaganda anti-Soviet dan begitu pula dengan Uni Soviet aktif melakukan propaganda anti-Amerika dan sekutunya. Kedua negara sama-sama memiliki pandangan akan perlunya memperluas pengaruh ideologi dan politik ke berbagai belahan dunia. AS menerapkan politik pembendungan (*cointainment policy*) untuk mencegah

penyebaran pengaruh Uni Soviet dan Komunisme ke seluruh dunia. Politik containment didasarkan pada asumsi bahwa Uni Soviet berupaya melakukan ekspansi tanpa batas (limitless expansion) dan kebijakan Uni Soviet ini diinspirasi oleh pandangan Komunisme tentang konflik yang tak terhindarkan antara Kapitalisme dan Sosialisme.¹² Kebijakan di atas telah menciptakan konflik AS-Uni Soviet di berbagai negara. AS tidak rela bila suatu negara jatuh seutuhnya pada pengaruh Komunisme

Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat berharap Cina Nasionalis dapat mempertahankan di Asia Pasifik sebagai negara utama, memanfaatkan Komunis di satu sisi, dan menyeimbangkan kekuatan Jepang di sisi lain. Kemudian perang saudara pecah di Cina. Perkiraan Amerika salah, pemerintah Nasionalis Cina yang tampaknya kuat mendapati dirinya tidak berdaya, sementara komunis berkuasa. Fakta ini terbukti ketika Jenderal Mac Arthur menginstruksikan tentara Nasionalis China untuk menerima pemindahan tentara Jepang, perintahnya tidak dapat dilaksanakan karena seluruh wilayah di luar kota dikuasai oleh tentara komunis.

Sebenarnya tentara Cina Nasionalis dengan bantuan AS mampu mengalahkan tentara Cina Komunis tetapi pada waktu itu AS berpendapat bahwa hanya membawa malapetaka

ke Cina, bahwa Eropa lebih penting daripada Asia. Kondisi seperti itu dianggap mempercepat kemenangan Komunis Tiongkok, meskipun sumber-sumber AS tidak yakin bahwa Komunis akan memenangkan pertempuran. Pada tahun 1947 Presiden Harry Truman meninjau kebijakan terhadap Cina bahwa AS harus memberikan bantuan kepada Chiang Kai Shek dengan syarat bahwa Cina Nasionalis harus mereformasi bidang ekonomi dan politiknya dan melakukan yang terbaik di bawah Perwalian selama bertahun-tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut AS memberikan bantuan sebesar \$330 juta, a, o. \$ 125 juta untuk persenjataan. Cina berada dalam kekacauan besar dan bantuan senjata dibatalkan sehingga Chiang Kai Shek tidak dapat menerima sampai akhir tahun 1948. Tentara Chiang Kai Shek melemah sementara upaya untuk memerintah tentara komunis terus dilakukan. Setelah kejatuhannya, Chiang Kai Shek melarikan diri ke Taiwan pada Desember 1949.

Kebijakan luar negeri AS mulai berubah sejak Presiden Johnson dan para penasihatnya, AS perlu menunjukkan ketegasan terhadap ancaman militer China, terutama peran China dalam Perang Vietnam dan potensi kekuatan nuklirnya. Tindakan Johnson didukung oleh teori yang dikenal sebagai teori domino yang menyatakan bahwa

negara-negara non-komunis akan jatuh ke tangan komunis ketika komunis berhasil merebut Vietnam dengan paksa.

Ketika Presiden Nixon berkuasa pada tahun 1968, dia mengatakan bahwa di masa depan Komunis Tiongkok akan menjadi ancaman karena akan memiliki satu miliar penduduk dan akan memiliki senjata atom yang dapat diekspor ke seluruh dunia. Nixon menekankan perlunya memperluas kebijakan saat ini dan masa depan untuk dapat mengubah China komunis sehingga mereka ingin berdialog.

Untuk menormalkan hubungan antara AS dan Republik Rakyat Tiongkok (PRC), RRC mengajukan dua syarat sebagai berikut:

1. Bahwa AS harus mengurangi jumlah militernya di Asia.
2. Bahwa AS harus mengakui Taiwan sebagai salah satu provinsi di RRC. Untuk mengembangkan syarat pertama, AS mengembangkan konsep 'Nixon Doctrine.'

Di sisi lain Komunis China, Vietnam Utara dan Korea Utara tetap menjadi ancaman bagi perdamaian dunia dan AS akan menawarkan perlindungan ketika salah satu negara nuklir mengancam kemerdekaan salah satu sekutunya. Mengenai hal-hal yang berhubungan dengan agresi lain, AS akan menawarkan bantuan ekonomi dan militer sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. koneksi mikro dan

penyesuaian akan lebih realistis dalam evaluasi keberhasilan mikro investasi.

Perang dingin yang dilancarkan antara Kutub Barat yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Kutub Timur yang dimotori oleh Uni Soviet adalah perang ideologi dan senjata dimana negara-negara maju ingin mempertontonkan kekuasaan dari segi persenjataan. Selain itu perang adalah untuk memerkan persenjataan dimana persenjataan dapat dijual kepada negara-negara yang membutuhkan untuk kepentingan nasional negaranya demi keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hlm 108 22.

Anthony T., *Is the Cold War over?; A New Look at Communist Imperialism*, USA, The Capitol Hill Press, 1973.

Al Faruqi, Isma'il R., and Al Faruqi, Lois Lamya. 1998. *Atlas Budaya Islam: Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang* (Bandung: Penerbit Mizan).

Aikman, David. 1986. *Pacific Rim: area of change, area of opportunity* (Boston: Little, Brown and Company).
_____. 1994. *Pressure Groups* (London: HMSO).

Arnove, Anthony. 2006. *Iraq: The Logic of Withdrawal* (New York: The New Press).

Bahan Pembelajaran Proxy War, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan, 2020.

Bur, Gabor., *Hungarian Diplomacy and the Non-Aligned Movement in the Cold War*, Budapest, Universität Wien, 2010.

Burr, William, 'The Nixon Administration, the Horror Strategy and the Search for Limited Nuclear Options, 1969-

1972', dalam *Journal of Cold War Studies*, Vol.7, Issue 3, Summer 2005,

- Frankel, Joseph. *International Politics; Conflict and Harmony*, London: Cox and Wyman, Ltd., 1969.
- Fukuyama, Francis. 2005. *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Fierke, Karin M., and Jørgensen, Knud Erik. 2001. *International Relation: the next generation* (New York: M. E. Sharpe).
- Giddens, Anthony. 1999. *TJalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Griffeths, Martin. 2001. *Lima Puluh Pemikir: Studi Hubungan Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Greenspan, Alan. 2007. *The Age of Turbulence*. (New York: The Penguin Press)
- Gilpin, Robert, and Gilpin, Jean M. 1987. *The Political Economy of International Relations* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press).
- Huntington, Samuel P. 2003. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (New York: Simon & Schuster Paperbacks).
- Holsti, K. J. 1967. *International Politics: A Framework for Analysis* (London: Prentice-Hall International, Inc).

- Isaak, Allan C. 1981. *Scope and Methods of Political Science: An Introduction to the Methodology of Political Inquiry*, 3rd ed. (New York: The Dorsey Press)
- Jabeen, Mussarat and Muhammad Saleem Mazhar, 'Security Game: SEATO and CENTO as Economic and Military Assistance to Encircle Pakistan', dalam *Pakistan Economic and Social Review*, Vol. 49, No.1, Summer 2011,
- Kalinovsky, Artemy, 'Decision-Making and the Soviet War in Afghanistan: From Intervention to Withdrawal', dalam *Journal of Cold War Studies*, Vol.11, Issue 4, Fall, 2009,
- Mohtar Mas'oed (1992). *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisa dan Teorisasi*. Yogyakarta : Pusat Antar Universitas – Studi Sosial UGM. (hlm. 182).
- Laily Fitry. (2008). *European Union Strategy of Defence*. simplyrealist.wordpress.com/.../european-union-strategy-of-defence/. Diakses tanggal 16 Juni 2010.
- Lipset, Seymour Martin. 2007. *Political Man: Basis Sosial tentang Politik* (Yogyakarta: Pustaka Belajar).
- Long, David E., and Reich, Bernard. 2002. *The Government and Politics of the Middle East and North Africa*, 4th ed. (Westview Press).
- Lewis, Bernard. 2002. *What Went Wrong? : Western Impact and Middle Eastern Response* (London: Phoenix).

- Mc.Clellan, Scott. 2008. *What Happened: Inside the Bush White House and Washington's Culture of Deception* (New York: Public Affairs Press).
- Mansbach, Richard W dan Kirsten L. Rafferty., Pengantar Politik Global, Edisi Terjemahan, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2012.
- N. Wagner, 'NATO and the Warsaw Pact', dalam *Scientia Militaria*, South African Journal of Military Studies, Vol. 8, No. 4, 1978,
- Peni Hanggarini. (2002). Fenomena Integrasi Eropa (Catatan Hari Eropa, 9 Mei). Koran Tempo 10 Mei 2002. http://www.data.uni_eropa/Sejarah « KAJIAN EROPA.htm diakses tanggal 27 januari 2010
- Robertson, Charles L. *International Politics Since World War II; A Short History*, 2nd Edition, USA: John Wiley & Sons.Inc, 1975.
- Saif, Lubna., 'Pakistan and SEATO', dalam *Pakistan Journal of History and Culture*, Vol. XXVIII, No.2, 2007,
- Schuman, Fredrick L., *International Politics; The Western State System and the World Community*, Sixth Edition, USA, McGrew-Hill Company,Inc, 1958.
- Tow, William T., 'The Anzus Case Alliance Interests, Costs And Benefits in A 9/11 Context', dalam *Australian Army Journal* , Volume III, No. 2, March, 2006,

Tierney, Dominic, 'Pearl Harbor in Reverse; Moral Analogies in the Cuban Missile Crisis', dalam *Journal of Cold War Studie*, Vol. 9, Issue 3, Summer, 2007,

T. May Rudy. (2002). *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung : PT Refika Aditama. hlm 84.

Media Internet

Perang Dingin Antara Blok Barat dan Blok Timur. (2010). perang-dingin-antara-blok-baratdan.html Diakses tanggal 24 Januari 2010 5 <http://id.wikipedia.org/wiki/NATO#column-one> diakses tanggal 27 januari 2010.

Jung, Karsten., 'Willing or Waning? NATO's Role in an Age of Coalitions', , (diakses 31 Oktober 2015).

Umetsu, Hiroyuki., 'The Birth of ANZUS: America's Attempt to Create a Defense Linkage Between Northeast Asia and the Southwest Pacific', , (diakses 31 Oktober 2015).

North Atlantic Treaty Organization', , (diakses 31 Oktober 2015). 'The History of NATO and Warsaw Pact', , (diakses 31 Oktober 2015). '

The Non-Aligned Movement: Description and History', , (diakses 31 Oktober 2015) 'Treaties and alliances - NZ and the Cold War', , (diakses 31 Oktober 2015) 'Uni Soviet Blokade Berlin', , (diakses 29 Oktober

- Lueedi, Faruki, Ahmad, Perang Dingin dan Implikasinya terhadap Sistem Politik Internasional dalam Tinjauan High Politics, *Jurnal International Sociey*, Vol. IV, No. 1, 2017.
- Mc.Clellan, Scott. 2008. *What Happened: Inside the Bush White House and Washington's Culture of Deception* (New York: Public Affairs Press).
- Norberg, Johan. 2001. *Membela Kapitalisme Global* (Jakarta: The Freedom Institute).
- Nader, Ralph, Greider, William, and Atwood, Margaret, et al. 1993. *The Case against "Freetrade": GATT, NAFTA, and the Globalization of Corporate Power* (San Fransisco: Earth Island Press).
- Nathan, James A., and Oliver, James K. 1994. *Foreign Policy Making and the American Political System, 3rd ed.* (London: The Johns Hopkins University Press).
- Neack, Laura, Hey, Jeanne A. K., and Haney, Patrick J. *Foreign Policy Analysis: Continuity and Change in It's Generation* (New Jersey: Prentice-Hall, Inc).
- Neuman, W. La Wrence. 1991. *Social Research Methods: qualitative and quantitative approaches, 3rd ed.* (London: Allyn and Bacon).
- Papp, Daniel S. 1988. *Contemporary International Relation: Frameworks for Understanding, 2nd ed.* (New York: Macmillan Publishing Company).

Plano, Jack J., Olton, Roy, and Juanda, Wawan. 1999. *Kamus Hubungan Internasional, edisi ketiga*. (Putra A. Bardin, CV).

Parkinson, F. 1977. *The Philosophy of International Relation: A Study in the History of Thought* (London: SAGE Publications).

Pettman, Ralph. 1994. *International Politics: Balance of Power; Balance of Productivity; Balance of Ideologies* (Longman Chesire).

Rourke, John T. 2007. *International Politics on the World Stage, 11th ed.* (New York: McGraw-Hill International).

Stiglitz, Joseph E. 2006. *Making Globalization Work: The Next Steps to Global Justice* (New York: Penguin Books).

Snyder Glenn H., and Diesing, Paul. 1977. *Conflict Among Nations: Bargaining, Decision Making, and System Structure in International Crises* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press).

Turner, Bryan S. 2002. *Orientalisme, Posmodernisme dan Globalisme* (Jakarta: Riora Cipta)

Umar, Harun. 2008. *Federalism, Regionalism and Globalization* (Jakarta: FISIP UNAS Press).

Viotti, Paul, and Kauppi, Mark V. 1999. *International Relation Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond, 3rd ed.* (Boston: Allyn and Bacon).



Penulis: Dr. Drs. Harun Umar., M.Si lahir di Ternate Maluku Utara, 23 Desember 1953 adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional dari tahun 1983 sampai sekarang. Pangkat Akademik yang dimiliki Lektor Kepala sejak tahun 2001.

Mengajar Mata Kuliah : Analisis Kebijakan Luar Negeri, Hubungan Internasional Kawasan Afrika dan Timur Tengah, Geopolitik Studi Perang dan Damai, Pendidikan Pancasila, Globalisasi dan Regionalisme. Jabatan sekarang Kepala Lembaga Penerbitan Universitas Nasional. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 di FISIP tahun 1983 di Universitas Nasional, kemudian melanjutkan studi S2 di UNAS lulus tahun 2003. Pernah Studi di Universitas Carleton, Kanada tentang Gender Mainstraining and Public Policy tahun 1999. Kemudian menjadi Pembantu Dekan III FISIP, Kajur HI 2002-2006 dan 2014-2015, serta Kepala Lab. Sosial Politik FISIP-UNAS tahun 2006-2010. Dosen Dikti Nomor Urut Pengajar Nasional : (9903016425). Penulis Mantan Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pengalaman Kerja Pernah sebagai Asisten Deputy Urusan Lembaga Pemuda dan Olah Raga Kementrian Negara Derah Tertinggal Tahun 2005-2007; Asisten Deputy Urusan Kesejahteraan Anak Pada Kementrian Pemberdayaan Perempuan Tahun 2003-2005. Aktif mengikuti kegiatan Seminar dalam dan luar negeri dan juga sejak tahun 1979 menulis di Harian Merdeka dan berbagai jurnal-jurnal dan buku.